LITERASI PRESS

#Rembang Melawan

Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng



Editor: Dwicipta & Hendra Try Ardianto

LITERAS PRESS

#Rembang Melawan

Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng

Editor:
Dwicipta & Hendra Try Ardianto

LADANG KATA

#RembangMelawan
Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng

© 2015, Literasi Press

xxxii + 192; 14,5 cm x 21 cm
ISBN: 978-602-1093-11-5

Cetakan ke 1, April 2015

Editor: Dwicipta & Hendra Try Ardianto
Tata Letak: M. Baihaqi Lathif
Perancang Sampul: Sufi Suhaimi

Diterbitkan oleh:
Literasi Press
Jl. Pramuka, Gg. Trisula 02/01
Giwangan Yogyakarta 55163
085875768644, 08989698030
email: literasipress@gmail.com

Kerjasama dengan:
Ladang Kata
Kampung Basen No 388A RT16 RW4
Kotagede Yogyakarta
0274-8515771, 085743131220, 081326647850
email: ladangkata@mail.com

Pengantar Editor

#RembangMelawan adalah sebuah istilah yang populer di media sosial begitu konflik antara warga penolak tambang dan PT Semen Indonesia meledak. Istilah ini muncul sebagai reaksi dari perlawanan ibu-ibu Rembang yang ratusan hari tinggal di tenda perjuangan sebagai wujud protes atas rencana pengerukan sumber daya alam di Pegunungan Kendeng. Tidak hanya di media sosial, lahirnya ratusan bentuk solidaritas di berbagai daerah membuat konflik lingkungan di Rembang menjadi masalah nasional yang semakin serius dan melibatkan semakin banyak pihak. Dalam kasus di Rembang inilah, wajah negara yang kehilangan rakyat dan korporasi yang menyetir pemerintahan bisa tampak secara lebih telanjang.

Sayangnya, perjuangan ibu-ibu menyelamatkan alam dan mempertahankan lahan pertanian mereka malah mendapat sorotan negatif dari berbagai media massa *mainstream*: mulai media cetak hingga elektronik, dari yang berskala nasional sampai yang berskala lokal. Bukannya mengabarkan kebenaran, koran-koran dan beberapa *website* malah memberitakan dusta-dusta yang semakin memojokkan para ibu-ibu di Rembang. Jurnalisme

sebagian besar media *mainstream* telah melacurkan diri dengan begitu tidak senonohnya dalam konteks ini. Pada saat bersamaan, lahirnya berbagai bentuk solidaritas yang tak menginginkan terjadinya penghancuran lingkungan dan ekologi di kawasan pegunungan Kendeng Utara menjadi gejala sosial yang menggembirakan meski solidaritas semacam ini tak mendapatkan porsi semestinya di media *mainstream*. Dengan latar belakang demikian, maka buku ini diterbitkan. Jadi, selain berfungsi sebagai penyampai sepenggal kebenaran yang ingin disampaikan para penulisnya untuk sidang pembaca sekalian, buku ini juga menjalankan fungsi sebagai media kampanye dan membuka saluran lebih luas bagi berbagai bentuk solidaritas dan sikap ekonomi-politik-budaya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih luas.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang ditulis oleh beberapa orang dengan latar belakang yang beragam, mulai dari akademisi, aktivis, jurnalis, hingga para peneliti yang kredibilitasnya tidak diragukan. Mereka semua menulis bukan semata untuk membuat analisis, namun juga untuk menyuarakan suara-suara minor yang jarang sekali disampaikan media, termasuk menyuarakan hal-hal yang jarang sekali menjadi kajian utama di perguruan tinggi. Sebagian besar penulis ini merupakan figur-figur yang sejak lama gelisah dengan fenomena pengerukan sumber daya alam yang makin tak terkendali. Melalui komunitas dan ruang geraknya masing-masing, mereka melakukan kerja-kerja berbasis gerakan hingga kerja-kerja

berbasis pengetahuan epistemik. Jadi, para penulis ini bukan semata orang-orang yang berfokus pada persoalan lingkungan di Rembang, namun lebih luas dari itu: keadaan darurat ekologi dan agraria yang melanda negeri ini.

Kasus lingkungan di Rembang menjadi penting lantaran di tempat inilah kita bisa menyaksikan bagaimana sumber daya alam dihajar secara brutal tanpa mempedulikan kondisi objektif sekitarnya. Izin pendirian pabrik semen yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang kepada PT Semen Indonesia tidak mempedulikan keberadaan warga yang menggantungkan hidup dari kawasan itu. Secara telanjang izin ini juga melanggar secara membabi-buta penetapan kawasan pegunungan Kendeng Utara dan Cekungan Air Tanah Watuputih sebagai kawasan yang dikonservasi. Dengan demikian, kasus Rembang merupakan cerminan bagi berlangsungnya pengerukan dan penggerusan sumber daya alam di negeri ini secara massif. Rembang bisa menjadi refleksi bagi seluruh konflik lingkungan maupun agraria, mulai dari kasus perkebunan, pertambangan, hingga kasus-kasus pembabatan hutan yang terjadi nyaris merata di semua daerah. Dengan mengupas kasus Rembang dari berbagai aspek, maka sesungguhnya buku ini memberikan refleksi komprehensif tentang konflik ekologi-agraria di seluruh Indonesia.

Buku ini juga merupakan ikhtiar untuk menyokong gerakan rakyat orisinal yang dilakukan ibu-ibu Rembang, sekaligus menjadi ruang-alir berbagai solidaritas yang

tumbuh di banyak titik di negeri ini. Untuk itu, sejak awal penyusunan buku ini didedikasikan dalam *frame* mendukung gerakan penyelamatan lingkungan. Karena nalar dasar itulah, maka tidak ada sedikit pun niat kami melakukan kapitalisasi atau mencari keuntungan dalam penerbitan buku ini. Oleh karenanya, sejak awal kami telah sepakat bahwa 50% keuntungan buku ini akan disumbangkan untuk menyokong gerakan ibu-ibu di Rembang.

Karena buku ini muncul bukan dengan sendirinya, maka izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis yang sudah merelakan pemuatan kembali tulisannya tanpa diberi imbalan sepeser pun. Selain itu, sebagian dari tulisan di buku ini sebenarnya pernah dimuat diberbagai media. Untuk itu, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada media-media online yang telah mengizinkan penerbitan ulang tulisan-tulisannya dalam buku ini. Kami sampaikan terima kasih kepada literasi.co, daulathijau.org, islambergerak.com, nu.or.id, omahkendeng.org, dan jurnalperempuan.org, karena telah diizinkan secara gratis menerbitkan ulang tulisan yang telah mereka muat menjadi bagian dalam antologi tulisan ini.

Terima kasih juga untuk penerbit *Literasi Press* dan *Ladang Kata* karena telah membantu proses penerbitan. Secara khusus, kami haturkan banyak terima kasih untuk Baihaqi Lathif (percetakan *Ladang Kata*) karena telah

merelakan diri bekerja dan tidak mengambil keuntungan untuk jasa percetakan buku-buku ini.

Terakhir dan paling utama, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh petani dan ibu-ibu di Rembang yang hingga sekarang masih memiliki nafas perjuangan yang tiada henti, khususnya dalam membela lingkungan dan mengelola lahan. Kepada merekalah sesungguhnya buku ini kami persembahkan. []

Yogyakarta, 7 April 2015

Dwicipta & Hendra Try Ardianto

Daftar Isi

Pengantar Editor iii

(PROLOG)

Seberapa Darurat Alam Kita: Bercermin
dari Kasus Krisis Ekologi-Agraria di Rembang xiii

ANALISIS

1. Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara
   Pegunungan Rembang Madura
   Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 1
2. Izin Lingkungan PT Semen Indonesia
   di Rembang Harus Dibatalkan Demi Hukum 28
3. Mitos Kesejahteraan Melalui Pertambangan 35
4. Mengapa Pertambangan, Bukan Pertanian? 47
5. Benarkah Batu di Rembang
   "Tidak Memiliki Sumber Air"? 55

KRITIK

6. Ganjar Pranowo dan Keculasan
   Seorang Politisi Salon 65
7. Tanggung Jawab Kampus dan Ilmu
   Pengetahuan Atas Persoalan Kemanusiaan 76
8. Matinya Rasa Empati Sebagai Manusia 85

9. Instrumen Kekuasaan dalam Kasus Rembang ... 92

GERAKAN

10. Mengapa Saya Tidak Percaya Argumen Semen dan Bersikap Menolak Semen di Rembang? 109
11. Seruan Penyelamatan Lingkungan Gus Mus: Tafsir Atas Wawancara KH. Musthofa Bisri Tentang Pabrik Semen di Rembang 125
12. Perjuangan Ibu-ibu Petani Rembang Melawan Korporasi Tambang 135
13. Ibu-ibu Rembang dan Mata Pusaran Revolusi Indonesia 147

(EPILOG)

Ketika Tanah Air Indonesia Porak-poranda "Di Sanalah Aku Berdiri, Jadi Pandu Ibuku" 157

Tentang Penulis 186

Daftar Tabel

Tabel 1 - Pasal-pasal dalam RTRW Jateng
yang Menunjukkan bahwa Kawasan Watuputih
Merupakan Kawasan Imbuhan Air 30

Tabel 2 - Jumlah Usaha Pertanian Menurut
Kelompok Umur di Indonesia 48

Tabel 3 - IKLH Berdasarkan Tiga Provinsi
dengan Nilai Terburuk 49

Daftar Gambar

Gambar 1 - Fisiografi Pulau Jawa 5
Gambar 2 - Peta Geologi Kabupaten Rembang 7
Gambar 3 - Sebaran Mata Air dan Gua yang terdapat di Kawasan Pegunungan Watuputih 12
Gambar 4 - Peta Lokasi IUP PT. Semen Indonesia ... 19
Gambar 5 - Sayatan Melintang Gunung Watu Putih dan sekitarnya 62
Gambar 6 - Peta Geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Provinsi Jateng 98
Gambar 7 - Profil Kepemilikan Saham PT. Semen Indonesia 114
Gambar 8 - Penampakan Posisi IUP PT. Semen Indonesia dan Cakungan Air Tanah 116
Gambar 9 - Profil Antara Kebutuhan dan Cadangan Air di Jawa 117
Gambar 10 - Sebaran Industri Semen di Jawa 119

Daftar Foto

Foto 1 - Kenampakan Lorong Gua Temu
yang Memiliki Aliran Sungai Bawah Tanah Aktif 8
Foto 2 - Mata Air "Sumber Semen" 16
Foto 3 - Aksi Ibu-Ibu dengan Membawa
Hasil pertanian 38
Foto 4 - Aksi Bersama Mengkritisi
Para Akademisi UGM 79
Foto 5 - Pemukulan Polisi pada Ibu-Ibu
Menjadi Awal Isolasi Tenda 87
Foto 6 - Keadaan Tenda Perjuangan Ibu-Ibu
yang Menolak Tambang Semen 90
Foto 7 - Pernyataan Sikap Gus Mus 126
Foto 8 - Protes Ibu-Ibu di Depan Tapak
Pabrik PT. SI 138
Foto 9 - Doa Bersama Ibu-Ibu
di Tenda Perjuangan 143
Foto 10 - Aksi Bersama Ibu-Ibu
Menggruduk UGM 153

(PROLOG)

Seberapa Darurat Alam Kita: Bercermin dari Kasus Krisis Ekologi-Agraria di Rembang

Hendra Try Ardianto

"....mana ini Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan ketika konservasi dikhianati? Tak ada kata lain selain bersatupadulah #RembangMelawan"

Sebuah tulisan akan terlihat gagah jika mengutip pendapat ilmuwan kondang atau filsuf ternama di awal tulisannya. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya memilih mengutip sebuah status facebook teman saya: seorang mahasiswa yang masih muda, baru saja lulus sarjana, bukan ahli geologi, ahli pertambangan, atau pakar lingkungan. Saya kutip status dia karena saya tahu dia orang yang sangat konsisten membaca bahkan membagi-bagikan (*sharing*) tulisan-tulisan tentang sengkarut persoalan lingkungan di Rembang. Teman saya yang seperti ini tidak perlu menjadi ahli untuk bisa memahami mana yang benar mana yang keliru. "Kemana para menteri

ketika konservasi dikhianati" menjadi ungkapan cerdas sekaligus bernas untuk merefleksikan seberapa darurat alam kita saat ini. Ketika para birokrat mulai dari level rendahan hingga sekelas eselon 1, politisi, aktivis LSM, akademisi, bahkan menteri sudah tak menunjukkan batang hidungnya lagi, dengan penuh kesadaran dia justru mengajak semua orang—melalui facebooknya—membentuk barisan penyelamatan lingkungan.

Kutipan status facebook tersebut hadir sebagai tandingan atas sikap menghindar para pejabat hingga ilmuwan yang masuk lingkaran kepentingan korporasi. Saya sangat geram terhadap pihak-pihak yang bersembunyi di balik dalih "Anda tidak tahu karena bukan ahli di bidang itu", atau "Anda tidak tahu karena bukan orang asli daerah situ". Dari pejabat hingga para ilmuwan yang masuk lingkaran kepentingan tambang selalu saja bereaksi dengan cara semacam ini. Sedangkan mereka yang bersimpati dan terlibat dalam usaha penyelamatan lingkungan, dengan semena-mena dipaksa tutup mulut melalui cap bukan orang sana atau bukan ahli di bidang tersebut. Strategi menghindar semacam inilah yang digunakan oleh mereka untuk memuluskan segala praktik pengerukan sumber daya alam (SDA) di negeri ini. Justifikasi "Ini sudah disusun para ahli yang kredibel" serta klaim "Ini sudah disetujui masyarakat sekitar" menjadi ungkapan-ungkapan klise penuh manipulasi dari pihak korporasi atau pun penguasa. Demikian yang saya

temukan saat penelitian panjang memasuki belantara konflik lingkungan di Rembang.

Saya sendiri saat ini sedang menyelesaikan buku utuh tentang bagaimana wacana kesejahteraan dijejalkan dalam kasus konflik lingkungan di Rembang. Pertambangan akan memberi lapangan pekerjaan, memberi penghidupan, menyokong kekuatan ekonomi warga sekitar adalah mitos yang diulang-ulang. Richard M. Auty (1993) dalam disertasinya yang berjudul *Sustaining Development in Mineral Economies* telah menelanjangi mitos pertambangan ini. Temuan-temuan dalam disertasi itu menunjukan bahwa pengerukan alam secara besar-besaran ternyata menciptakan dampak negatif luar biasa: dari korupsi yang meraja-lela hingga kemiskinan yang tiada-tara.[1] Sebaliknya, orang-orang yang telah beberapa generasi hidup bersama alam dan mendapatkan kesejahteraan melalui pertanian, dianggap sebagai masyarakat di bawah garis kemiskinan. Inilah nilai-nilai dan pandangan-pandangan yang keliru yang perlu diluruskan.

Darurat Ekologi dan Agraria

Latar seperti apakah yang menjadikan konflik lingkungan di Rembang bisa memunculkan gejolak publik yang luar biasa hingga seperti sekarang? Ada beberapa jawaban terkait soal ini. Yang jelas, satu jawaban yang cukup akurat adalah karena kasus ini menjadi titik pertemuan antara krisis ekologi dan agraria yang berlangsung secara bersamaan. Darurat ekologi teridentifikasi karena daerah

yang akan ditambang merupakan kawasan lindung geologi yang harusnya dikonservasi. Sedangkan darurat agraria ditunjukkan dari model-model pemaksaan dalam pendirian pabrik semen. Lahan-lahan yang akan ditambang sama sekali belum dibebaskan. Artinya, cukup mudah memprediksi bahwa dikemudian hari akan terjadi praktik perampasan lahan (*land grabbing*) yang dilakukan negara maupun korporasi. Pertemuan dua nalar ini (*baca*: ekologi dan agraria) kemudian memperdidih titik-titik konflik yang ada di Indonesia, baik yang disebabkan konflik ekologi maupun konflik agraria. Tidak aneh jika muncul geliat solidaritas yang membuncah di berbagai daerah dalam menyuarakan persoalan Rembang. Tanpa diajak sekalipun mereka telah merasakan dan memahami bahwa pengerukan alam telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

"*Seberapa daruratkah alam kita?*" merupakan pertanyaan yang perlu kita dudukan secara serius. Namun, untuk menjelaskan itu, saya tidak akan memulai dari angka-angka atau data-data makro. Saya lebih berpikir untuk mengajukan sebuah pertanyaan penting. *Siapakah pihak yang menyebabkan kerusakan alam di Indonesia hingga sejauh ini?* Apakah rakyat biasa yang telah membuat alam Indonesia hancur berantakan? Negara? Ataukah korporasi? Aktor pertama, rakyat, jelas bukan pihak yang menghancurkan alam Indonesia. Aktor kedua bisa iya, bisa pula tidak. Satu-satunya jawaban paling presisi untuk menjawab pertanyaan itu adalah korporasi-

korporasi besar yang mengeruk sumber daya alam demi keuntungan mereka sendiri. Mari kita ingat-ingat, apa yang menyebabkan Teluk Buyat di Sulawesi Utara tercemar, apa yang menyebabkan munculnya lubang-lubang raksasa di Kalimantan, juga apa yang menyebabkan lumpur meluber dan menghabisi ratusan desa di Sidoarjo. Semua itu adalah ulah laknat perusahaan-perusahaan pengeruk SDA.

Setelah menemukan jawaban pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan kedua. *Siapakah yang paling diuntungkan dari pengerukan SDA di Indonesia?* Biasanya akan ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Di antaranya, pengerukan SDA dinilai bisa mengalirkan dana (bagi hasil / pajak) untuk sebuah daerah, lalu dipakai untuk menjalankan pembangunan. Atau, keberadaan korporasi (lewat program *coorporate social responsibility*) akan menghadirkan limpahan berkah untuk masyarakat. Jawaban demikian biasa kita temukan, tapi tidak menjawab pertanyaan secara detail, bahkan cenderung klise belaka. Jika mau jujur, pihak yang "paling diuntungkan" adalah korporasi itu sendiri. Contoh sederhana, sudah puluhan tahun lamanya kita menjadi saksi sekaligus korban atas keberadaan sebuah kontrak karya dimana pemerintah hanya mendapat royalti 1 – 3 %, sisanya diambil sendiri pihak korporasi. Kira-kira, bisnis bernalar apakah yang digunakan pemerintah Indonesia dalam kontrak karya dengan PT. Freeport di Bumi Cendrawasih itu? Kenyataan

semacam ini tentu ada diluar batas akal sehat manusia normal. Sayangnya, itulah yang terjadi.

Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, *adakah yang dirugikan (dikorbankan) dari pengerukan SDA di Indonesia?* Tampaknya kita semua sepakat bahwa rakyat kecil adalah pihak yang paling dirugikan. Sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, berapa korban yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pengerukan SDA. Mereka menjadi korban karena dipaksa menyerahkan lahan, dirampas kemampuan produksinya, bahkan ketika alam rusak atau terjadi bencana, merekalah yang menanggung beban. "Untung tak di dapat, buntung yang selalu merapat", merupakan gambaran yang selalu hadir dalam cerita-cerita pengerukan SDA di Indonesia.

Kerakusan dan keserakahan dalam mengeruk SDA telah menciptakan konflik yang luar biasa besar dan nyaris terjadi di semua tempat. Data yang diungkapkan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), pada kurun waktu 1970-2001 memberitahu kita bahwa telah terjadi sekitar 1.753 kasus yang melibatkan lebih dari 10 juta hektar lahan dan menjadikan lebih dari 1 juta orang sebagai korbannya.[2] Angka ini menjadi semakin mengerikan jika dilanjutkan dengan data yang dipaparkan oleh HuMa (2013) dimana dalam kurun waktu 6 tahun (206-2012) saja telah terjadi sekitar 232 kasus dan melibatkan areal seluas lebih dari 2 juta hektar.[3] Kenyataan ini mestinya sudah menjadi sirine tanda bahaya atas keberlangsungan

bukan saja alam/lingkungan, namun juga rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Kedaruratan ini semakin nyata seiring dengan *kengawuran-kengawuran* pemerintah dalam kebijakan-kebijakan penataan SDA. Sudah tahu hutan semakin sedikit, pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan dan pertambangan tetap dilakukan. Sudah tahu wilayah konservasi, izin penambangan tetap diberikan. Bahkan, pemerintah tidak malu-malu mengakui bahwa SDA hanyalah komoditi yang sekedar diperdagangkan. Nalar ini salah satunya muncul dalam kebijakan MP3EI (*Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*). Melalui MP3EI, Indonesia di bawah Rezim SBY secara terbuka menawarkan alam Indonesia laksana seseorang menawarkan sebuah kue yang bisa dibeli oleh orang yang mau dan mampu. Atas nama percepatan ekonomi, wilayah Indonesia dipilah-pilah sesuai kebutuhan pembeli (investor), tapi melupakan bahwa penawaran itu akan meluaskan konflik sosial (terkait ekologi-agraria) sampai ke tingkat yang paling ekstrem. Setali tiga uang, Rezim Jokowi kembali meneruskan kebijakan *ngawur* ini meski tanpa membawa embel-embel MP3EI lagi.

Kasus Rembang yang dihadirkan dalam buku ini bisa menjadi cermin yang sangat tepat untuk memahami dan merefleksikan keruwetan-keruwetan darurat ekologi dan agraria di Indonesia. Namun, sebelum jauh menjelaskan pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus Rembang, saya akan uraikan terlebih dahulu seberapa daruratkah kasus

di Rembang ini. Yang saya maksud dengan kedaruratan kasus Rembang bukan dalam konteks kerugian dan kerusakan apa yang akan dihasilkan, namun lebih pada konteks kebutuhan membangun barisan lebih kuat untuk menyelamatkan alam dan kehidupan petani di Rembang. Jika hanya gambaran kerusakan dan kerugian apa yang akan muncul, dengan membaca isi buku ini hingga tuntas, maka gambaran itu bisa didapatkan secara penuh. Tetapi, yang lebih genting adalah dinamika konflik yang kian meruncing dan membutuhkan gerakan bersama yang lebih masif.

Ada dua jawaban yang saya hadirkan mengapa kasus Rembang sudah memasuki fase darurat dan membutuhkan gerakan perjuangan penyelamatan yang lebih masif. *Pertama*, rencana pertambangan yang masih mendapatkan penolakan luar biasa besar ini ternyata tetap dipaksakan. Artinya, pihak korporasi secara jelas ingin memaksakan kehendak bahwa pengerukan tambang di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih tidak bisa ditolak lagi. Bahkan ketika Komnas HAM mengeluarkan teguran untuk menghentikan pendirian pabrik, seluruh pejabat lokal lebih memilih tutup mata pada suara Komnas HAM. *Kedua,* jika pertambangan semen skala besar akhirnya dilakukan di Rembang, maka tidak ada alasan lagi yang bisa digunakan untuk menolak praktik pertambangan di seluruh kawasan karst, baik di jalur Pegunungan Kendeng, Perbukitan Gombong, Wonogiri, Kalimantan Timur, hingga Sulawesi atau

Papua. Alasannya sangat jelas: rencana pertambangan di Rembang itu jelas-jelas berada tepat di tengah-tengah CAT Watuputih yang merupakan kawasan lindung geologi (berkarakter kawasan imbuhan air) yang harusnya di konservasi. Mengikuti logika efek domino, tentu saja akan mucul pengajuan izin-izin pertambangan yang luar biasa banyak di kawasan Pegunungan Kendeng dan tempat-tempat lain.[4] Ingat, Kendeng adalah kawasan karst terakhir di Jawa yang masih belum terjamah perusahaan tambang skala besar. Ini ibarat kue yang sangat lezat dan menggiurkan serta membikin banyak perusahaan berlomba memperebutkannya.

Dengan dua argumentasi di atas, kita sampai pada kesimpulan bahwa jika fase darurat ini tidak segera dihentikan, maka kita semua harus bersiap-siap menghadapi keadaan krisis yang lebih besar. Pertambangan di Rembang akan berpotensi membawa perubahan status pegunungan karst di seluruh kawasan Kendeng (dan juga tempat lain) menjadi areal-areal pertambangan. Itu artinya daya dukung dan daya topang alam, terutama di Jawa yang merupakan pulau terpadat penduduknya, akan kehilangan satu penyangga utama atas keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Di tahun-tahun akan datang kita akan disuguhi dengan kenyataan bahwa perang air, krisis ekologi, dan bencana-bencana akibat ulah manusia (*man-made disaster*) bukan lagi imaji atau ketakutan, namun akan muncul sebagai kenyataan-kenyataan yang mendirikan bulu roma kita!

Seputar Isi Buku

Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah isi buku yang Anda pegang saat ini merupakan karya yang sebelumnya telah berserak di berbagai media. Jadi, sejak awal tulisan-tulisan ini telah berdiri sendiri dan tidak terkoneksi dalam satu kesatuan gagasan yang utuh. Hal ini menjadi kelemahan tersendiri, dimana fokus utama persoalan menjadi masalah dasar nyaris setiap buku berjenis antologi. Meski disadari ada kekurangan, bukan berarti buku ini tidak ada kelebihan. Buku antologi memiliki kelebihan dalam hal kekayaan perspektif dan sebaran data yang beragam. Penyajian tulisan-tulisan yang semula terpisah menjadi satu kumpulan akan membuat pembaca dimanjakan dengan berbagai cara pandang baru dalam melihat sebuah persoalan.

Hal lain yang perlu diingat adalah semua tulisan dalam buku ini bukan lahir dari ruang hampa atau jatuh dari langit secara tiba-tiba. Setiap tulisan memiliki konteks ekonomi, politik, sosial, dan kulturalnya masing-masing, yakni untuk memberikan pemahaman, pandangan, bahkan jawaban atas persoalan yang sedang terjadi di Rembang. Para penulis ini bukan orang yang cuma duduk-duduk dan menjadi pengamat, namun mereka juga terlibat dalam kerja-kerja secara langsung untuk penyelamatan lingkungan di kawasan Pegunungan Kendeng. Jadi, mereka bukan sekedar penulis, akademisi, atau peneliti, tetapi Anda juga boleh menyebut mereka sebagai para pekerja sosial atau aktivis gerakan.

Meski merupakan tulisan yang sejatinya saling terpisah, namun tetap ada benang merah yang menyambungkan argumen antar tulisan. Benang merah itu dirangkai dalam tiga tema utama, yakni ANALISIS, KRITIK, dan GERAKAN. Analisis berisi uraian analitik tentang persoalan yang terjadi di Rembang, mulai dari segi ekologi, hukum, ekonomi-politik, kebijakan, hingga kegeologian. Sedangkan kritik berisi bahasan-bahasan yang mengkritisi berbagai persoalan yang muncul dari konflik lingkungan di Rembang, seperti kepemimpinan politik, tanggung jawab keilmuan, sisi kemanusiaan, hingga penggunaan kekuasaan. Terakhir, tema gerakan mengupas berbagai cara pandang melihat gerakan penolakan tambang semen di Pegunungan Kendeng.

ANALISIS pertama dibuka dengan tulisan berjudul *Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah*, yang ditulis beramai-ramai oleh Petrasa Wacana, Irfanianto, Abe Rodhialfalah, Sunu Widjanarko, Imron Fauzi, dan Ming-Ming Lukiarti. Tulisan ini sebenarnya makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional Kebumian ke-7 di UGM. Pembuatan makalah ini melalui proses penelitian yang panjang dan dilakukan secara partisipatif. Makalah ini ditempatkan di bagian pertama mengingat lewat tulisan inilah profil kawasan Karst yang akan ditambang PT. Semen Indonesia didudukkan secara jeli dan teliti. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, saat ini telah terjadi pemelintiran berita yang sangat masif dari

media-media massa dan para jurnalis dengan berbagai kepentingan masing-masing. Dengan membaca tulisan ini kesimpang-siuran berita tentang boleh tidaknya pertambangan di kawasan pegunungan Kendeng bisa didudukkan dengan kepala dingin. Akhirnya, para pembaca bisa memilih dan memilah dengan cermat berita-berita seputar konflik tambang di Rembang dan menentukan sikap yang jelas terkait isu ini.

Analisis kedua dilanjutkan oleh tulisan Bosman Batubara yang berjudul *Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia di Rembang Harus Dibatalkan*. Tulisan ini lahir sebagai tanggapan penulis yang melihat adanya kekeliruan pada nalar prosedural-formal pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemda Jateng) dalam pemberian izin lingkungan PT.SI. Lewat penelusuran seluruh regulasi yang mengatur pendirian pabrik semen, dari tingkatan paling tinggi (UUD 1945) hingga regulasi paling bawah, tampak jelas bahwa pemberian izin itu menyalahi skema RTRW yang ada, baik di Kabupaten Rembang maupun Provinsi Jawa Tengah. Harusnya, ketika rencana pertambangan ada yang menabrak RTRW, maka izin lingkungan harus dikembalikan kepada pemrakarsa. Dengan logika seperti itu, proses PTUN yang diprakarsai oleh warga dan Walhi tidak perlu dilakukan andaikan semua pihak memahami dan taat hukum.

Tulisan berikutnya berjudul *Mitos Kesejahteraan Melalui Pertambangan* karya Hendra Try Ardianto. Tulisan ini lahir sebagai *counter* nalar kesejahteraan yang dijadikan

justifikasi oleh Pemda Jateng dan PT. Semen Indonesia (PT.SI) untuk memperlancar proyek pertambangan semen di Rembang. Penulis melihat, bahwa dalam literatur yang ada terkait pertambangan, nalar memberi kesejahteraan bukan saja penuh perdebatan, tetapi juga sangat bermasalah. Dalam tulisan ini, penulis membeberkan berbagai studi yang menunjukkan relasi negatif antara kesejahteraan dan pertambangan. Melalui tulisan ini, penulis ingin mendudukkan dengan jelas bahwa nalar kesejahteraan bukan sesuatu yang *given,* tetapi harus melihat kesejarahan yang melekat pada relasi sosial-politik sebuah masyarakat.

Menyambung tulisan sebelumnya, dalam tulisan berjudul *Mengapa Pertambangan, Bukan Pertanian?* Hendra Try Ardianto juga mengkritik pola kebijakan yang keliru. Ketika menulis ini, penulis melihat kekeliruan kebijakan pertambangan, terlebih ketika pemerintah sedang menjanjikan kesejahteraan. Jika pemerintah memang berikhtiar untuk memberikan kesejahteraan warga, harusnya kebijakan pertanianlah yang lebih relevan, bukan kebijakan-kebijakan yang melancarkan jalannya industri ekstraktif di wilayahnya. Argumen demikian penulis ajukan karena kondisi ketahanan pangan, baik secara nasional dan regional (Jawa Tengah), berada dalam ancaman serius. Kebijakan pertambangan seperti pendirian pabrik semen di Rembang ini malah akan membuat posisi ketahanan pangan semakin memburuk.

Analisis terakhir disajikan Bosman Batubara dalam tulisan *Benarkah Batu di Rembang "tidak memiliki sumber air"*. Tulisan ini hadir sebagai jawaban atas kesaksian ahli-ahli UniversitasGadjah Mada (UGM) saat sidang gugatan izin lingkungan antara warga dan Walhi di satu pihak dengan PT. SI dan Gubernur Jawa Tengah di pihak lain. Penulis melihat bahwa Eko Haryono (dosen Fakultas Geografi) dan Heru Hendrayana (dosenTeknik Geologi) melakukan kesalahan fatal dalam memberikan kesaksian disidang PTUN Semarang, 19 Maret 2015. Salah satu kekeliruan yang ia angkat di sini adalah "tingkat interpretasi" yang dianggap penulis terlalu optimis, dan ini tidak lazim dalam khasanah ilmu geologi/hidrogeologi.

Memasuki tema KRITIK, bacaan dibuka oleh tulisan Dwicipta berjudul *Ganjar Pranowo dan Keculasan Seorang Politisi Salon*. Tulisan ini dikerjakan penulisnya persis beberapa jam setelah sesi dengar pendapat warga Tegaldowo dan Timbrangan bersama Gubernur Ganjar Pranowo. Penulis, yang terlibat dan menyaksikan langsung acara dengar pendapat itu, merasa ada yang bermasalah dengan gaya dan bentuk komunikasi politik sang Gubernur. Maka, tulisan ini pun dibuat sebagai bentuk kegelisahan atas pertanyaan, "bagaimana mungkin pemimpin yang begitu culas ini oleh banyak media massa (baik cetak maupun televisi) dianggap sebagai pemimpin yang pro-rakyat dan membela nasib *wong cilik*?". Pengalamannya bergerak dan terlibat advokasi berbagai konflik di Jawa Tengah, memberikan refleksi tersendiri dalam tulisan ini,

bahwa sang Gubernur, Ganjar Pranowo, adalah sosok yang penuh tipu daya bagi banyak rakyat kecil.

Kritik kedua dialamatkan pada para akademisi yang berbelok pada kepentingan-kepentingan korporasi. Kritik ini dilontarkan oleh A. Syatori dalam tulisannya berjudul *Tanggung Jawab Kampus dan Ilmu Pengetahuan*. Tulisan ini merupakan refleksi penulis atas pelacuran intelektual yang dilakukan beberapa kalangan akademisi. Penulis, yang juga menjadi bagian dari akademisi kampus, melancarkan otokritik keras bahwa penggunaan ilmu pengetahuan dalam banyak hal telah melupakan marwah dasar sebuah ilmu, yakni menjunjung tinggi kemanusiaan. Ilmu sebagai ilmu, bagi Gus Syatori (panggilan akrabnya), tidak akan memeroleh makna sejatinya jika hanya dijadikan alat untuk mengusai pihak yang lemah. Kritik dalam berilmu ini sekaligus menjadi pengingat agar kalangan akademisi bisa menjalankan "ilmu dan laku" dalam irama yang sama. Jika ilmu hanya dijadikan sebagai alat menindas, maka di situlah letak kehancuran praktik berilmu.

Kritik berikutnya berjudul *Matinya Rasa Empati sebagai Manusia* yang ditulis Hendra Try Ardianto. Tulisan ini merupakan ekspresi kegeraman penulis atas praktik isolasi yang dilakukan oleh aparat polisi dan jajaran PT. SI pada ibu-ibu penolak tambang. Penulis yang dulunya terbiasa keluar masuk dan tidur di tenda, kemudian dilarang lagi bersua dengan ibu-ibu di sana, menjadikan latar belakang kenapa tulisan ini dibuat. Praktik isolasi yang mirip dilakukan para penjajah kolonial di zaman dulu

merupakan alasan mengapa penulis merasa resah dan geram. Kekecewaan penulis terhadap perilaku semacam itu diutarakan dengan cermat dalam tulisan.

Adapun kritik terakhir dilakukan oleh Bosman Batubara melalui tulisan *Instrumen Kekuasaan dalam Kasus Rembang.* Tulisan ini sangat menarik karena bukan semata bercorak analisis, namun juga cerminan sikap politik sang Penulis. Sebagai seorang ahli geologi dan hidrologi, penulis melihat bagaimana instrumen pengetahuan (akademik) tentang kegeologian digunakan untuk memuluskan praktik-praktik kekuasaan dalam rencana pertambangan semen di Pegunungan Kendeng. Sedangkan sebagai aktivis gerakan yang cukup lama menjelajahi ragam konflik lingkungan, penulis juga secara detail menguraikan berbagai praktik perselingkuhan kapital dan para penguasa dalam memanipulasi dukungan atas pembangunan pabrik semen. Dari pembacaan intrumen -instrumen kekuasaan ini, penulis secara bernas menempatkan sebuah analisis sekaligus menghajar relasi kuasa yang dibangun korporasi dan negara.

Dalam tema GERAKAN, tulisan Hendra Try Ardianto berjudul *Mengapa Saya Tidak Percaya Argumen Semen dan Menolak Tambang Semen di Rembang* perlu mendapat tempat tersendiri. Tulisan ini lahir sebagai jawaban atas kegelisahan penulis akibat banyaknya informasi yang beredar di ruang publik yang mengarahkan pembentukan opini untuk bersikap pro-pertambangan. Tulisan ini sengaja disuguhkan dalam konteks menangkal bahkan menghajar

argumen-argumen pro-tambang semen, khususnya yang ada di Rembang. Meski hanya menggunakan argumen-argumen sederhana dan sekedar permukaan, namun tulisan ini mampu menghadirkan pembacaan ulang dan argumen menukik yang mudah dicerna oleh siapa pun. Di tengah kesimpang-siuaran dan penyesatan informasi yang berjejal di berbagai media publik, tulisan ini memberi jalan pintas untuk keluar dari tabir keruwetan informasi yang ada.

Melanjutkan argumen gerakan berikutnya, kita juga akan disuguhi sebuah ulasan tentang sikap politik tokoh, yakni KH. Musthofa Bisri (Gus Mus). Melalui tulisan *Seruan Penyelamatan Lingkungan Gus Mus*, Hendra Try Aridanto menafsir ulang wawancara Gus Mus tentang pabrik semen di Rembang. Sebagai warga Nahdliyin, sang Penulis menilai bahwa petuah-petuah kyai merupakan pegangan hidup yang perlu dijaga, terlebih ketika itu berasal dari kyai besar. Keterikatan penulis dengan tradisi NU menjadikan petuah KH. Musthofa Bisri (Gus Mus) sebagai seruan nyata yang harus disebarkan. Berlatar belakang demikian, maka penulis terpanggil untuk menterjemahkan petuah Gus Mus ke dalam konteks yang lebih riil sebagaimana yang dihadapi para petani dan ibu-ibu di Rembang.

Tulisan berikutnya adalah karya Ming-Ming Lukiarti yang berjudul *Perjuangan Ibu-ibu Petani Rembang Melawan Korporasi Tambang*. Tulisan ini merupakan tanggapan penulis atas berbagai cercaan yang menimpa ibu-ibu dan

petani penolak tambang di Rembang. Sebagai bagian dari gerakan penolakan tambang, penulis melihat tidak hanya ada kekeliruan informasi, namun ada upaya penyesatan dan penghakiman bahwa warga penolak tambang dianggap *waton suloyo* (memaksakan kehendak) tanpa bukti dan pengetahuan yang mencukupi. Melalui tulisan ini, ditunjukkan bukti-bukti konkret bagaimana gerakan penolakan yang ada didasarkan tidak saja pengetahuan sosial mereka, namun juga pengetahuan ilmiah yang dikumpulkan secara partisipatif antara warga dan kalangan akademisi yang fokus pada upaya penyelamatan lingkungan.

Karya terakhir yang menutup tema gerakan adalah tulisan Dwicipta yang berjudul *Ibu-Ibu Rembang dan Mata Pusaran Revolusi Indonesia*. Penulis yang memiliki latar belakang gerakan ini, melihat bahwa gerakan penolak tambang yang ada di Rembang merupakan sinyal kuat bagi revolusi Indonesia berikutnya. Dalam konteks tertentu, ada pesan tersembunyi bahwa reformasi 1998 tidak mengalami kesuksesan lantaran terbajak oleh elit-elit predator yang malah menyengsarakan rakyat. Tulisan ini disuguhkan dalam nalar mencuri perhatian orang bahwa ada geliat kuat lahirnya revolusi Indonesia baru, yang lebih dimotori oleh isu ekologi-agraria, bukan sekedar isu anti rezim sebagaimana terjadi di era Orde Baru.

Dari keseluruhan tema yang diangkat dalam buku ini, hampir semuanya membicarakan Rembang sebagai titik pijakannya. Dengan demikian, perlu ada uraian khusus

yang bisa memeras inti persoalan yang telah diuraikan panjang lebar. Di sinilah letak pentingnya membaca EPILOG yang ditulis Noer Fauzi Rachman dalam tulisan berjudul *Ketika Tanah Air Indonesia Porak-poranda "Disana lah Aku Berdiri, Jadi Pandu Ibuku"*. Tulisan ini sebenarnya adalah makalah yang dipresentasikan penulis dalam "Halaqoh Nasional Fiqh Sumber Daya Alam" di Pondok Buntet Pesantren Cirebon 2 April 2015 lalu. Dalam tulisan ini, terlihat jelas bagaimana narasi kebangsaan Indonesia telah melenceng jauh dari semangat pembentukannya. Melalui pendedahan pada konteks sumber daya alam (SDA), penulis secara jeli menunjukkan bagaimana kapitalisme beserta seluruh nalar yang mengikutinya telah memporaporandakan bangunan bangsa (dan negara) bernama Indonesia. Perluasan kapitalisme tidak hanya telah menghajar kedaulatan negara, namun juga sampai ke unit terkecil: desa. Oleh karena itu, tulisan ini merupakan epilog yang sangat bernas untuk mengunci seluruh tulisan-tulisan sebelumnya, dimana kasus konflik tambang di Rembang menjadi nukilan kecil dari keseluruhan narasi penghancuran kedaulatan SDA oleh perangkat-perangkat kapitalisme.

Demikianlah uraian panjang tentang isi buku. Semoga, melalui buku ini, para sidang pembaca tidak hanya mendapat pencerahan baru, namun juga tergerak untuk merapatkan barisan untuk kerja-kerja penyelematan lingkungan. Tanpa ada panggilan demikian, buku ini hanya akan menjadi saksi bisu atas kehancuran alam kita,

atau hanya akan teronggok dalam sejarah kelam negeri ini. Agar keadaan demikian tidak terjadi, maka mari saya ingatkan lagi satu pesan kawan saya dalam status facebooknya, "*Tak ada kata lain selain bersatupadulah*".

Selamat Membaca!

Selamat Bergerak!

Catatan:

[1] Baca Richard M. Auty. 1993. *Sustaining Development in Resource Economies: The Resource Curse Thesis*. London and New York: Routledge.

[2] Baca Yance Arizona. 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press. (hlm.139)

[3] Baca *http://huma.or.id/pusat-database-dan-informasi/outlook-konflik-sumberdaya-alam-dan-agraria-2012-3.html* (7/4/2015)

[4] Saat ini saja, antrian panjang perusahaan-perusahaan semen yang mengajukan izin usaha penambangan skala besar di Pegunungan Kendeng sudah sangat panjang. Beberapa yang tercatat adalah PT. Indocement, PT. Holcim, PT. Vanda Prima Lestari, PT. Sinar Tambang Arta, PT. Ultratec Mining, dan banyak lagi. Mereka semua telah mengajukan izin nyaris di seluruh kawasan Pegunungan Kendeng, dari Rembang, Pati, Blora, Grobogan, Kebumen, dan sekitarnya. Baca Tempo, 23 Desember 2014, "Kawasan Penyimpan Air Dikuasai Investor".

(BAGIAN 1)

Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah*

Petrasa Wacana, Irfanianto, Abe Rodhialfalah,
Sunu Widjanarko, Imron Fauzi,
Ming-Ming Lukiarti

Latar Belakang

Karst adalah suatu kawasan yang memiliki karateristik relief dan drainase yang khas, terutama karena derajat pelarutan batuan-batuannya yang intensif (Ford dan Willian, 1989). Fenomena bentang alam karst tercermin melalui banyaknya bukit-bukit kapur kerucut, munculnya

---

* Naskah ini merupakan hasil riset bersama antara *Acintyacunyata Speleological Club* (ASC) Yogyakarta, *Semarang Caver Associaton* (SCA), *Indonesia Caver Society* (ICS), dan *Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng* (JMPPK) Rembang. Tulisan ini pernah dimuat di website www.omahkendeng.org pada 9 Agustus 2014.

mataair-mataair pada rekahan batuan, mengalirnya sungai-sungai bawah tanah dengan lorong gua sebagai koridornya. Tidak jarang juga ditemukan lahan sangat kering di permukaan pada musim kemarau di bagian bukit karena memang sungai-sungai yang mengalir di permukaan sangat jarang. Karst memiliki fungsi strategis sebagai penyimpan cadangan air terbesar di bawah permukaan bagi wilayah di sekitar kawasan karst.

Bagian selatan Kabupaten Rembang terpapar pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Ia lebih memiliki fenomena bentang alam karst dan merupakan bagian dari kelurusan Pegunungan Karst Sukolilo yang membentang dari Grobogan, Pati dan Blora. Karena faktor geologis dan sosio-kultural inilah dalam Permen ESDM No 17 Tahun 2012 ia ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst, atau yang lebih dikenal sebagai Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara. Sebagai kawasan karst bagian selatan Rembang juga menjadi kawasan imbuhan air terbesar yang dikenal sebagai Pegunungan Watuputih atau Kawasan Karst Watuputih. Fungsinya sebagai pengimbuh air terbesar di Rembang membuat Kawasan Watuputih ditetapkan sebagai Cekungan Air Tanah lewat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011. Dalam lampiran Keppres No 26 Tahun 2011 poin 124, Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih masuk dalam klasifikasi CAT B yaitu CAT yang berada di lintas kabupaten antara Kabupaten Rembang dan Blora. Penetapan ini, yang tertuang dalam pasal 25 Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air,

menjadikan CAT Watuputih sebagai wilayah konservasi yang harus dilindungi dan dikelola dengan optimal agar terhindar dari kerusakan.

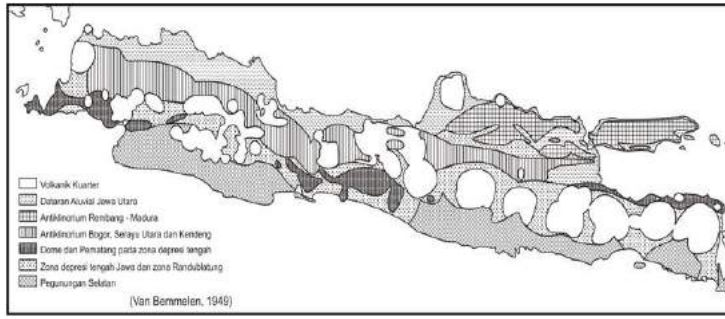
Penetapan kriteria sebuah tempat sebagai kawasan karst dan CAT yang mesti lestarikan menjadikan perlindungan kawasan karst harus menjadi perhatian utama dalam menentukan keberlanjutan ekologi di dalamnya. Indikasi bahwa kawasan ini dikelola secara tidak tepat asas harus diletakkan sebagai tindakan preventif dalam nalar pelestarian ruang dan ekologi yang ada di dalamnya. Pengelolaan kawasan karst yang tidak berorientasi pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan akan memunculkan risiko bencana terhadap aset-aset kehidupan dan penghidupan. Karenanya, informasi tentang keberadaan dan nilai kawasan kart tersebut perlu digali dan diinformasikan ke pelbagai pihak sehingga dapat dilakukan kebijakan dan praktek pembangunan yang baik di kawasan yang berorientasi kepada keberlanjutan kawasan dalam fungsi ekologisnya.

Fisiografi dan Morfologi

Kawasan karst Rembang berada di Zona Rembang (*antiklinorium* Rembang-Madura). Menurut Van Bemmelen (1949), Zona Rembang di bagian Utara dibatasi oleh Laut Jawa Utara, ke arah selatan berhubungan dengan Depresi Randublatung yang dibatasi oleh Sesar Kujung, ke arah barat berhubungan dengan Depresi Semarang–Pati, memanjang ke arah timur memasuki

wilayah Jawa Timur (Tuban, Lamongan, Gresik), melewati Pulau Madura, hingga ke Pulau Kangean. Zona Rembang membentang sejajar dengan zona Kendeng, dipisahkan oleh zona Randublatung (*lihat* Gambar 1). Zona ini merupakan zona patahan antara paparan karbonat di utara (Laut Jawa) dengan cekungan yang lebih dalam di selatan (zona Kendeng). Litologi penyusunnya campuran antara karbonat laut dangkal dengan klastika, serta lempung dan napal laut dalam. Morfologi kawasan Pegunungan Rembang secara umum merupakan area perbukitan karst yang teletak pada struktur perbukitan lipatan. Setelah perlipatan mengalami proses pelarutan, pada bagian puncak perbukitan karst di permukaan *(eksokarst)* ditemukan morfologi bukit-bukit kerucut *(conical hills)*, cekungan-cekungan hasil pelarutan (*dolina*), lembah-lembah aliran sungai yang membentuk mulut gua *(Sinkhole)*, mata air dan telaga karst ditemukan pada bagian bawah. Morfologi bawah permukaan *(endokarst)* kawasan karst tersebut juga membentuk morfologi sistem perguaan dan sungai bawah tanah. Pada bagian Utara dan Selatan, batas akhir batuan kapur/batugamping merupakan dataran.

Gambar 1
Fisiografi Pulau Jawa



Sumber: van Bemmelen, 1949

Geologi

Stratigrafi kawasan karst di Rembang menurut Pringgoprawiro (1983) berada di Formasi Ngrayong, Formasi Paciran, Formasi Wonocolo, Formasi Bulu. Formasi Ngrayong merupakan anggota formasi Tawun, terdiri dari batu pasir kuarsa, batu lempung dan batu gamping pasiran yang disusun oleh alga dan cangkang binatang laut. Umur dari unit ini Miosen Tengah, pada area N9-N12 (*lihat* Gambar 2).

Semula, Formasi Paciran oleh Van Bemmelen (1949) disebut sebagai *Karren Limestone*. Secara umum penyusunnya terdiri atas batugamping pejal dan dolomitan, dengan permukaan singkapan-singkapannya mengalami erosi membentuk apa yang disebut sebagai *karren surface*. Formasi ini dijumpai hanya di bagian utara dari Zona Rembang. Sementara itu, Pringgoprawiro (1983) menempatkan Formasi Paciran pada Kala Pliosen–

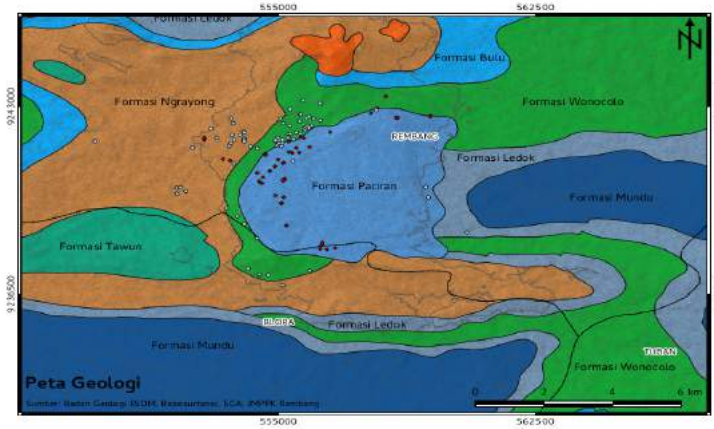
Awal Pleistosen, yang secara lateral setara dengan Formasi Mundu dan Lidah. Namun di beberapa tempat terdapat bukti umur yang menunjukkan bahwa formasi ini telah berkembang pada saat pembentukan Formasi Ledok dan Wonocolo.

Formasi Bulu tersusun oleh batugamping pasiran yang keras, berlapis baik, berwarna putih abu-abu, dengan sisipan napal pasiran. Pada batugampingnya dijumpai banyak *foraminifera* berukuran sangat besar dari spesies *Cycloclypeus (Katacycloclypeus)* annulatus yang berasosiasi dengan fragmen koral dan alga serta foramnifera kecil. Pringgoprawiro (1983) menggunakan nama Formasi Bulu sebagai nama resmi, dengan memasang lokasi tipe di Sungai Besek, dekat desa Bulu, Kabupaten Rembang. Pada peta geologi lembar Rembang (1 : 100.000), formasi ini melampar luas terutama di wilayah antiklonorium Rembang Utara. Satuan ini menebal ke arah barat, mencapai ketebalan hingga 360 m di sungai Larangan. Di bagian timur di sungai Besek dekat desa Bulu ketebalannya hanya 80 meter. Kondisi litologi dan kandungan fosilnya menunjukkan bahwa formasi ini diendapkan pada laut dangkal, terbuka pada Kala Miosen Tengah – Awal Miosen Akhir (N 13 – N 15).

Menurut Van Bemmelen (1949), Cekungan Jawa Timur bagian Utara *(North East Java Basin)* yaitu Zona Kendeng, Zona Rembang–Madura, Zona Paparan Laut Jawa (*Stable Platform*) dan Zona Depresi Randublatung. Keadaan struktur perlipatan pada Cekungan Jawa Timur

bagian Utara pada umumnya berarah Barat–Timur, sedangkan struktur patahannya umumnya berarah Timur Laut–Barat Daya dan ada beberapa sesar naik berarah Timur–Barat. Kondisi struktur geologi ini menyebabkan batugamping penyusun dasar dari karst di Rembang memiliki banyak rekahan. Rekahan-rekahan inilah yang menjadi awal terbentuknya gua dan sistemnya di kawasan karst lewat proses pelarutan geologi.

Gambar 2
Peta Geologi Kabupaten Rembang



Sumber: Badan Geologi, GIS diolah peneliti, 2013

Speleologi

Hasil penelitian Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah terhadap Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Di dalamnya

terdapat fenomena alam unik seperti adanya gua-gua alam dan sungai bawah tanah. Hasil pendataan secara berkala yang dilakukan oleh *Semarang Caver Association (SCA)* dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang terdata adanya 49 gua yang tersebar di sekitar wilayah Cekungan Air Tanah Watuputih dan 4 diantaranya merupakan gua yang memiliki sungai aktif. Proses karstifikasi di daerah Rembang dimulai sejak batugamping di daerah ini tersingkap di daratan hingga sekarang. Beberapa gua masih mengalami proses pelarutan. Proses karst di Rembang masih berlangsung hingga sekarang. Hal ini bisa dilihat dari adanya lorong-lorong gua dan sungai bawah tanah yang masih aktif (*lihat* Foto 1).

Foto 1
Kenampakan Lorong Gua Temu yang Memiliki Aliran Sungai Bawah Tanah Aktif [1]



Sumber: JMPPK Rembang

Lewat pengamatan lapangan, dijumpai beberapa gua dengan posisi mulut di dasar lembah, seperti Gua Temu di Desa Bitingan (Kecamatan Sale) dan Gua Manuk di Desa Wuni (Kecamatan Gunem). Pada musim hujan mulut-mulut gua tersebut merupakan jalur sungai periodik yang masuk ke dalam gua dan juga menjadi sungai utama yang keluar dari dalam gua. Mengikuti pola-pola patahan, rekahan, dan pola perlapisan, sebaran gua formasi Paciran dan Ngrayon di kawasan karst Rembang tersebar di Desa Tegaldowo, Desa Suntri, Desa Dowan, Desa Timbrangan, Desa Pasuncen dan Desa Kajar. Pola perkembangan lorong-lorong gua dikontrol oleh adanya struktur geologi. Ini ditunjukkan dengan kenampakan lorong memanjang yang terbentuk akibat pelarutan melalui rekahan-rekahan dan bidang-bidang patahan serta perkembangan dari pelarutan pada bidang-bidang perlapisan batuan yang dipengaruhi oleh rekahan-rekahan yang mengikuti pola perlapisan batuan. Sedangkan keberadaan mata air dan sumur banyak tersebar di formasi Paciran (merupakan Cekungan Air Tanah Watuputih), formasi Ngrayong dan formasi Wonocolo.

Hidrologi Karst

Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 109 sebaran mata air di wilayah CAT Watuputih yang menjadi mata air *parenial* dan mengalir di sepanjang musim kemarau maupun penghujan (*lihat* Gambar 3). Dari pengamatan lapangan, zona jenuh air berada di sekitar Sumber Semen dan Mata air Brubulan pada ketinggian 150 mdpl,

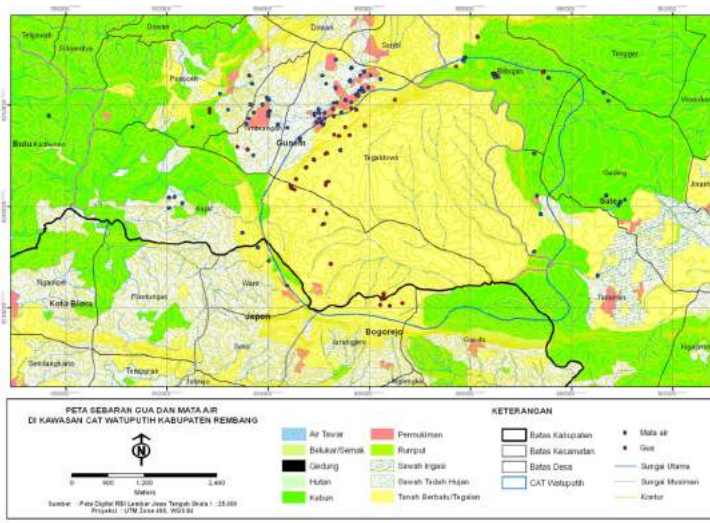
sedangkan zona peralihan pada ketinggian lebih kurang 190 mdpl. Temuan sebaran mata air pada zona ketinggian 100 – 350 mdpl teridentifikasi di area CAT Watuputih dan di wilayah yang berada di sebelah baratdaya, utara dan selatan Pegunungan Watuputih. Data ini menguatkan fungsi Pegunungan Watuputih sebagai kawasan karst dimana akuifer air masih berjalan dengan sangat baik. Temuan ini ditandai dengan mata air yang keluar melalui zona- zona rekahan pada setiap ketinggian. Pembentukan sistem sungai bawah permukaan yang ditemukan dalam Gua Temu menunjukkan bahwa Pegunungan Watuputih merupakan pegunungan yang mengalami proses karstifikasi aktif sebagai bagian dari Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara dan berfungsi sebagai epikarst penyimpan air yang sangat besar dan pemasok mata air yang ada disekitarnya.

Dari sudut pandang hidrogeologi, zona lemah pada batuan (kekar, rekahan, sesar) merupakan struktur geologi yang sangat berperan dalam mengontrol sistem hidrogeologi pada daerah yang penyusun utamanya batugamping. Fluida, dalam hal ini air, memiliki kecenderungan mengalir melalui zona lemah pada batuan yang secara morfologi ditunjukkan oleh adanya kelurusan-kelurusan morfologi. Menurut Klimchouk (1997) dalam Adji (2013), *epikarstic zone* atau lebih dikenal sebagai *subcutaneous zone* adalah zone teratas yang tersingkap dari batuan karst yang memiliki permeabilitas dan porositas karena proses pelebaran celahnya paling tinggi dibanding

lapisan-lapisan lain. Karenanya zona ini berperan sebagai media penyimpan air yang baik. Zona ini berperan sebagai penyedia aliran andalan bahkan pada periode kekeringan yang panjang. Haryono (2001) menyebutkan bahwa permukaan bukit karst berperan sebagai *reservoir* utama air di kawasan karst. Sebaliknya, di wilayah ini tidak ada zona untuk menyimpan aliran *conduit* karena geraknya sangat cepat dan segera mengalir ke laut. Zona epikarst merupakan konsentrasi air hasil infiltrasi air hujan (Adji, 2013).

Berdasarkan peta Hidrogeologi, akuifer di CAT Watuputih dikategorikan sebagai akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan, dan saluran. Akuifer ini diperkirakan mempunyai produktivitas sedang dengan penyebaran yang luas. Kelompok akuifer ini merupakan penyusun utama di CAT Watuputih, berada di bagian tengah daerah penyelidikan. Akuifer ini terbentuk oleh batugamping Formasi Paciran, yang terdiri dari batugamping pejal dan batugamping napalan, dengan kelulusan sedang sampai tinggi tergantung derajat karstifikasi pada batugamping. Dengan sifat-sifat batuan penyusunnya, produktivitas akuifer pada daerah penyelidikan terdapat setempat dan umumnya berupa akuifer produktif. Aliran air tanah pada sistem akuifer ini melalui zona celahan dan rekahan. Muka air tanah umumnya dalam dimana debit sumur serta mataair beragam dan umumnya rendah.

Gambar 3
Sebaran Mata Air dan Gua yang terdapat di Kawasan Pegunungan Watuputih



Sumber: Peta Digital RBI, dokumen ASC Yogyakarta

Berdasarkan Keppres Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, batas horizontal cekungan air tanah sesuai dengan batas litologi pada Peta Geologi. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, CAT Watuputih adalah CAT yang hanya terbentuk oleh batugamping yang merupakan litologi utama Formasi Paciran. Sesuai batuan penyusun akuifer di daerah ini, jenis akuifernya mempunyai klasifikasi dan batasan-batasan yang sama dengan akuifer karst. Akuifer karst dapat digambarkan sebagai sistem yang dibatasi oleh suatu daerah tangkapan air *(catchment area)* dengan sistem aliran melalui kontrol input dan output (Ford dan Williams, 1989). Input dalam

hubungannya dengan mekanisme air yang masuk di daerah karst dibagi menjadi dua yaitu *autogenic recharge* dan *allogenic recharge*. *Autogenic recharge* terjadi pada daerah dengan batuan relatif homogen berupa batuan karst dan air tertangkap secara langsung dari infilitrasi air hujan pada daerah tersebut. *Allogenic recharge* merupakan mekanisme yang umum terjadi karena kondisi geologi yang bersifat kompleks dan adanya aliran *run off* yang berasal dari daerah bukan karst masuk menuju akuifer karst.

Autogenic recharge pada umumnya bersifat difusif dimana air masuk melalui celahan pada singkapan batuan karst, sedangkan *allogenic recharge* umumnya terkonsentrasi (mekanisme *concentrated point input*) melalui *sinking streams*. Kedua mekanisme tersebut menghasilkan sifat kimia air tanah dan volume *recharge per unit area* yang berbeda. Untuk kontrol output, pada akuifer karst output-outputnya berupa mata air-mata air yang tersebar di sekitar CAT. Mataair karst sebagai output dari sistem hidrogeologi karst menggambarkan sistem pengaliran bawah tanah yang berkembang pada suatu daerah karst. Keberadaan mata air karst dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya topografi dan struktur geologi yang mengontrol mata air karst tersebut. Pada sumur gali yang dijumpai di sekitar daerah penyelidikan, diketahui bahwa daerah di sekitar cekungan juga terdapat sistem akuifer yang berbeda, yaitu akuifer tidak tertekan dengan penyusun *aluvium* muda dengan ketebalan yang cukup

tipis. Berdasarkan data hasil pengujian laboratorium air, kualitas air pada sumur gali ini cukup bagus. Parameter fisika dan kimia air dari sampel air mempunyai kadar nilai di bawah kadar maksimal yang diperbolehkan. Hanya kadar tembaga yang banyak dijumpai pada sumur gali yang mempunyai nilai di atas kadar maksimal yang diperbolehkan. Berdasarkan uji pemompaan yang dilakukan pada salah satu sumur gali (SG.6), diketahui x bahwa nilai *hydraulic conductivity* (K) pada akuifer ini adalah 1,60 x 10-3 m/s.

Luas batu gamping Formasi Paciran yang membentuk Gunung Watuputih lebih kurang 3020 Ha. Kawasan CAT Watuputih yang menjadi area imbuhan air sebesar 2555,09681 Ha (hasil perhitungan melalui Sistem Informasi Geografis). Ia menjadi kawasan resapan air terbesar yang menyuplai sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan Pegunungan Watuputih. Dari pengukuran lapangan berdasarkan data Amdal PT Semen Indonesia (2012), mata air terbesar adalah Sumber Semen dengan debit 600 lt/detik dan terletak di Desa Tahunan di bagian timur wilayah CAT Watuputih. Sementara mata air terkecil adalah Mata air Belik Watu dengan debit 0,02 liter/detik dan terletak di Desa Timbrangan di bagian barat area CAT Watuputih. Bila disimulasikan berdasarkan jumlah debit yang terukur di lapangan, dari 109 mata air yang ada di kawasan pegunungan karst Watuputih, estimasi volume air yang dihasilkan oleh mata air dalam satu hari adalah sebagai berikut: mata air yang terkecil

0,02 liter/detik dalam 1 hari/24 jam/3600 menit/86400 detik akan menghasilkan air 1728 liter dalam satu hari, mata air dengan debit terbesar 600 liter/detik dalam 1 hari akan menghasilkan 51.840.000 liter air. Kurang dari 10% dari debit itu dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya terdistribusi ke lahan pertanian. Ini menunjukkan bahwa air yang dihasilkan dari sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih melebihi kebutuhan dasar masyarakat terhadap air yang rata-rata 15 – 20 liter/hari/orang. Jika nilai ini divaluasi sebagai potensi ekonomi, maka jumlah air yang dihasilkan akan melebihi nilai yang didapat dari sektor pertambangan. Dengan demikian, keberadaan kegiatan penambangan berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan pasokan dan distribusi air pada sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih. Sumber Semen yang merupakan sumber utama pemenuhan kebutuhan air masyarakat di 14 Kecamatan (lihat Foto 2)—yang estimasinya bisa memenuhi kebutuhan 607.188 jiwa di 14 kecamatan Kabupaten Rembang (PDAM, 2013)—sebagian besar disuplai dari CAT Watuputih dan sebagian lagi dari sayap antiklin yang membentang antara Gunung Butak–Tengger maupun dari selatan Desa Tahunan.

Mata air di wilayah CAT ini sebagian besar tersebar di luar wilayah konfigurasi CAT yang telah ditetapkan oleh Keputusan Presiden. Mata air-mata air banyak dijumpai di bagian selatan, dan sebagian di bagian timur dan utara

Cekungan air tanah. Hanya ada dua mata air yang secara lokasi berada di wilayah cakupan Cekungan Air Tanah, yaitu Mata air Sendang Gondang dan Mata air Sendang Ngandong yang berada di desa Pancuran. Kedua mata air ini mempunyai debit yang tidak terlalu besar, yaitu kurang dari 1 liter/detik. Mata air-mata air lainnya tersebar di luar wilayah CAT ada di Desa Tegaldowo, Desa Suntri, Desa Dowan, Desa Timbrangan, Desa Pasuncen dan Desa Kajar. Debit airnya bervariasi dari yang relatif kecil (<0.5 liter/detik) sampai sangat besar, yang mencapai 600 liter/detik. Seluruh mata air yang ada dimanfaatkan untuk pertanian, kebutuhan sehari-hari seperti air minum, mencuci, dan peternakan.

Foto 2
Mata Air "Sumber Semen" [2]



Sumber: Dokumentasi JMPPK Rembang

Analisis Kebijakan Terhadap Perlindungan Kawasan Karst CAT Watuputih

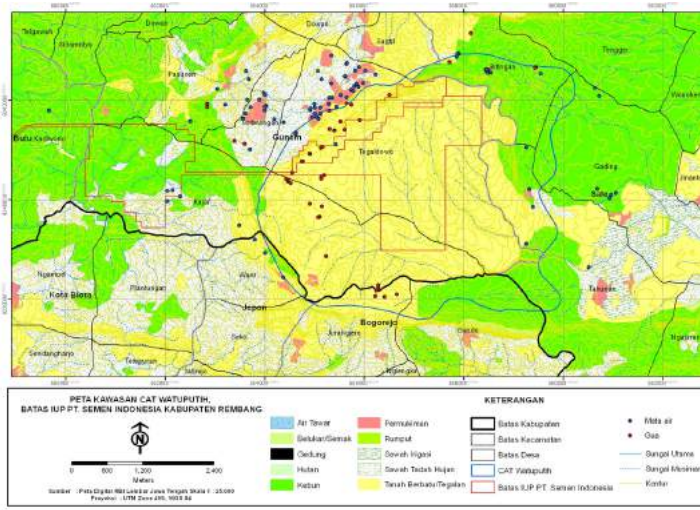
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang membawa semangat otonomi daerah memberikan ruang luas bagi pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten dalam membuat kebijakan maupun mengelola wilayahnya. Undang-undang ini memberi hak terhadap setiap daerah dalam mengatur kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung program pembangunan berkelanjutan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemanfaatan sumber daya yang ada di suatu daerah—termasuk sumber daya alam—menjadi kewenangan daerah sepanjang pengelolaannya dilaksanakan secara adil dan selaras. Yang perlu diperhatikan, setiap kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik fisik, biotik dan sosial. Masuknya investor-investor luar ke suatu daerah memberikan tawaran yang sangat menarik bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan dan mendukung program pembangunan wilayahnya dan untuk meningkatkan pendapatan bagi daerahnya. Persis di sinilah persoalan wewenang dan pengelolaan sumberdaya daerah bermula.

Sesuai klasifikasinya, kawasan karst adalah kawasan yang harus dilindungi. Secara ekologis, kawasan karst memiliki fungsi sangat penting baik sebagai penampung air tanah dalam jumlah besar maupun sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna. Kawasan karst juga merupakan wilayah yang menjadi ruang kajian para ahli dari berbagai disiplin ilmu karena menyimpan berbagai fenomena alam yang menarik. Namun demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kawasan karst pada umumnya masih rendah. Ini dibuktikan dengan adanya penambangan bahan galian golongan C di kawasan karst yang dilakukan oleh pabrik semen sebagai bahan baku untuk pembuatan semen. Hal ini menyebabkan rusak/hilangnya fungsi hidrologi yang meliputi sungai bawah tanah dan mata air, gua-gua dan flora-fauna yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan karst. Dalam konteks Kabupaten Rembang kawasan Pegunungan Watuputih merupakan kawasan karst yang yang menjadi *catchment area* bagi mata air dan berfungsi sebagai kontrol hidrologi bagi kawasan yang ada di sekitarnya. Dalam Perda No 6 Tahun 2010 tentang CAT Watuputih sebagai kawasan resapan air yang menjadi kawasan lindung geologi (pasal 63), penetapan kawasan CAT Watuputih sebagai kawasan lindung geologi diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2007 tentang RTRW Nasional pasal 53 – 60. Selanjutnya, dalam Perda No 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang, CAT Watuputih masuk ke dalam wilayah kawasan lindung geologi (pasal 19, a).

Sebagai kawasan lindung geologi kawasan CAT Watuputih merupakan kawasan yang memiliki potensi sumberdaya air yang menjadi penyuplai terbesar air bagi masyarakat di 14 kecamatan Kabupaten Rembang. Selanjutnya, keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dalam lampiran poin 124 menyebutkan bahwa Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih masuk dalam klasifikasi CAT B yaitu CAT yang berada di lintas kabupaten antara Kabupaten Rembang dan Blora. Hal ini menjadikan CAT Watuputih adalah sebagai wilayah konservasi yang harus dilindungi dan dikelola dengan optimal guna menjaga dari kerusakan wilayah CAT sebagaimana tertuang dalam pasal 25 Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Gambar 4

Peta Lokasi IUP PT. Semen Indonesia [3]



Sumber: Peta Digital RBI, diolah ASC Yogyakarta

Perubahan morfologi yang diakibatkan oleh perubahan lahan baik oleh pertambangan maupun degradasi lahan dalam skala yang masih di sekitar kawasan pegunungan Watuputih akan berpotensi pada hilangnya fungsi resapan air tanah di wilayah ini. Izin Usaha Pertambangan No 545/0249/2013 di wilayah Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yang dikeluarkan oleh Pemkab Rembang kepada PT. Semen Indonesia bisa menjadi bencana ekologis dan sosio-kultural yang besar mengingat posisi koordinatnya berada di kawasan Pegunungan Watuputih yang seharusnya dikonservasi dan dilindungi guna menjaga keberlanjutan kawasan karst dan kawasan resapan air tanah.

Potensi Risiko Terhadap Perubahan Morfologi Kawasan Karst Pegunungan Watuputih

Perubahan morfologi kawasan karst Pegunungan Watuputih akibat penambangan dapat mempengaruhi pola distribusi air di wilayah Rembang dan sekitarnya. Perubahan ini akan mengakibatkan terjadinya degradasi jumlah air yang tersimpan di dalam CAT Watuputih, menciptakan perubahan komposisi aliran dasar *(diffuse flow)* dibanding aliran total. Berdasarkan teori epikarst, penambangan bukit gamping akan mengurangi jumlah simpanan air *diffuse*, dan sebaliknya akan meningkatkan aliran *conduit* saat hujan. Dampak yang sangat tidak diharapkan adalah bertambahnya persentase aliran *conduit* saat musim hujan yang dapat mengakibatkan

banjir dan berkurangnya persentase aliran *diffuse* saat musim kemarau sehingga mata air akan menjadi kering.

Dalam izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemkab Rembang, PT Semen Indonesia direkomendasikan melakukan penambangan di area yang masuk ke dalam kawasan CAT Watuputih seluas 131,55 hektar (1.315.500 m2). Potensi risiko hilangnya air dapat dihitung berdasarkan hubungan curah hujan rata-rata di wilayah Kecamatan Gunem dan Sale 1500 mm/tahun (1,5 m). Dengan asumsi 50% curah hujan menjadi aliran permukaan dan 50% menjadi air tanah (0,75 m), porositas batugamping di kawasan CAT Watuputih pada zona epikarst 20%, dan dengan asumsi batugamping yang akan ditambang sampai pada kedalaman 20 meter, maka potensi kehilangan air yang tersimpan di mataair adalah:

> Estimasi curah hujan yang masuk ke airtanah x luas area pertambangan x kedalaman zona epikarst yang hilang x porsentase zona epikarst 0,75 m x 1.315.500 m2 x 20 m x 20% = 4.054.500 m3

Hilangnya fungsi epikarst akan mengakibatkan hilangnya fungsi resapan air pada kawasan CAT Watuputih di mana mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih mampu memenuhi kebutuhan untuk 607.198 jiwa di 14 kecamatan di Rembang. Dari hasil perhitungan di atas, berdasarkan estimasi standar, potensi hilangnya cadangan air di CAT Watuputih akibat dari rencana aktivitas penambangan ada sekitar 4 juta meter kubik air. Hasil perhitungan standar di atas perlu kajian lebih

mendalam guna menentukan angka yang lebih pasti. Penghitungan risiko berkurangnya jumlah air yang akan ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan bisa dilakukan lewat pembandingan penghitungan standar di atas dengan penghitungan riil selama minimal 2 kali musim hujan dan 2 kali musim kemarau. Penghitungan ini berguna untuk melihat perubahan dan hubungan antara kawasan karst dengan resapan air yang menyupali mata air yang terdapat di sekitar kawasan karst CAT Watuputih. Dalam konteks bencana, hilangnya fungsi resapan menyebabkan hilangnya jeda waktu air tersimpan, sehingga pada saat musim hujan, air yang seharusnya terserap ke dalam tanah akan berubah menjadi air permukaan/*run off*. Pada saat air hujan melebihi debit puncak air hujan biasanya, maka akan cepat menjadi bagian dari aliran air permukaan. Dampak lanjutannya jelas: hal ini berpotensi banjir di wilayah-wilayah yang berhubungan langsung dengan DAS yang bermuara pada CAT Watuputih.

Kesimpulan

1) Berdasarkan hasil kajian dan fakta di lapangan, kawasan Pegunungan Watuputih atau kawasan CAT Watuputih merupakan kawasan bentang alam karst yang memiliki morfologi permukaan (*eksokarst*) berupa bukit karst yang memanjang, tebing patahan yang memanjang, lembah-lembah hasil pelarutan (*dolina*) dan mata air Karst (*Karst spring*). Morfologi bawah permukaan (*endokarst*) ditemukan sistem

perguaan struktural dan sungai bawah tanah yang berkembang mengikuti pola rekahan.

2) Kawasan CAT Watuputih maengalami proses karstifikasi aktif. Ini dapat ditunjukkan dari distribusi sebaran mata air di setiap level ketinggian yang keluar melalui rekahan antar batuan. Perkembangan sistem hidrologi karst yang ditunjukkan oleh berkembangnya sistem perguaan dan sungai bawah permukaan yang mengikuti pola rekahan dan pola aliran akibat pelarutan.
3) Mata air dan sungai bawah tanah di Kawasan CAT Watuputih bersifat *parenial*/mengalir sepanjang musim.
4) Fungsi hidrologi di Kawasan CAT Watuputih merupakan pengontrol utama sistem ekologi yang meliputi hubungan antara komponen-komponen abiotik (tanah, batuan, sungai, air, dll), biotik (biota-biota gua serta flora dan fauna yang ada di kawasan Karst), dan kultur (lingkungan sosial, masyarakat, kebudayaan, dan adat istiadat) yang berinteraksi satu dengan lainnya membentuk suatu ekosistem dimana Karst menjadi kontrol utamanya.
5) Pegunungan Watuputih merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah resapan air CAT Watuputih yang menyimpan air untuk mata air yang ada di sekitar kawasan Pegunungan Watuputih

Rekomendasi

1) Menghentikan semua aktifitas rencana penambangan di lokasi CAT Watuputih
2) Meninjau kembali izin usaha tambang yang dikeluarkan pemerintah daerah karena izin ini berada di wilayah CAT Watuputih yang merupakan wilayah lindung geologi berdasarkan Perda No 6 Tahun 2010 dan Perda No 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Propinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Rembang dan dengan pertimbangan CAT Watuputih merupakan wilayah yang harus di konservasi sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air pasal 25 dimana penetapannya diatur lewat Keputusan Presiden No 26 Tahun 2011 lampiran point 124.
3) Memetakan gua dan sungai bawah tanah yang ada di CAT Watuputih dan sekitarnya.
4) Melakukan penelitian hidrologi mendalam terhadap kawasan karst CAT Watuputih dan sekitarnya untuk mengetahui fungsinya sebagai kawasan penangkap air hujan. Penelitian ditujukan guna memetakan jaringan aliran bawah permukaan. Minimal penelitian dilakukan selama 2 kali musim hujan dan 2 kali musim kemarau.
5) Melakukan penelitian terhadap kelelawar gua dengan pertimbangan penambangan dapat mengganggu kelelawar yang berfungsi sebagai predator hama,

penyebar biji-bijian tanaman, dan pembantu penyerbukan.

6) Melakukan inventarisasi situs budaya dan arkeologi di kawasan calon tambang dan sekitarnya.
7) Memberikan perlindungan kepada kawasan CAT Watuputih sebagai kawasan lindung geologi yang memiliki keunikan bentang alam karst, gua dan sumber air dari kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan morfologi baik skala kecil maupun secara massif. []

Catatan:

[1] Goa Temu terletak di Dusun Bitingan, Desa Bitingan Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

[2] Sumber Semen merupakan mata air yang terdapat di Dusun Tahunan, Desa Tahunan, Kecamatan Sale sebagian besar disuplai dari kawasan karst CAT Watuputih.

[3] Peta lokasi izin usaha pertambang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang yang berada di kawasan CAT Watuputih, di sekitar mata air dan gua-gua yang ada di Pegunungan Watuputih.

Literatur:

Adji, T,N, 2013. *Kondisi Tangkapan Sungai Bawah Tanah Karst Gunungsewu dan Kemungkinan Dapak Lingkungan Terhadap Sumberdaya Air (Hidrologi) Karena Aktivitas Manusia*. Paper diakses dari http://tjahyo- adji.staff.ugm.ac.id/ancaman_karst_aquifer.pdf

Anonim, 2012. Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Semen Indonesia, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Anonim, 2004. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air.

Anonim, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Nasional.

Anonim, 2010. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Anonim, 2011. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Rembang.

Anonim, 2011. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

Anonim, 2012. Peraturan Mentri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

Anonim, 2013. Surat Izin Wilayah Usaha Pertambangan No 545/0249/2013. PT Semen Indonesia, Kabupaten Rembang.

Bemmelen, R.W.V. 1970, *The Geology of Indonesia*. Vol IA General Geology of Indonesia and Adjacent Archipelagoes, Second Edition, Martinus Nilhoff, The Haque, Netherlands.

Ford D.C. dan P.W. Williams. 1989. *Karst Geomorphology and Hydrology*. London: Chapman and Hall.

Hariyono. 2001. *Nilai Hidrologi Bukit Karst*. Makalah dalam Seminar Nasional Ekohidrolik, Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada

Klimchouk, A. 1997. *The nature and principal characteristics of epikarst*. In: P.-Y. Jeannin (Editor), 12th International Congress of Speleology, La Chaux-de-Fonds, pp. 306.

Pringgoprawiro. 1983. *Biostratigrafi dan Paleogeografi Cekungan Jawa Timur: Suatu Pendekatan Baru*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

(BAGIAN 2)

Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang Harus Dibatalkan Demi Hukum*

Bosman Batubara

Pernyataan ini menjelaskan analisis FNKSDA bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk., di Kabupaten Rembang Jawa Tengah harus dibatalkan demi hukum. Izin ini, selanjutnya dalam pernyataan ini, akan disebut "Izin Lingkungan PT Semen Indonesia," mengingat sejak 20 Desember 2012 PT Semen Gresik (Persero) Tbk. berubah menjadi PT Semen Indonesi (Persero) Tbk. Izin ini dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo pada 7 Juni 2012 di Semarang. Argumentasi FNKSDA menuntut pembatalan demi hukum atas kasus operasi pabrik semen di Rembang ini dipaparkan pada bagian berikut.

---

* Tulisan ini pernah dimuat di website *www.daulathijau.org* pada 7 Desember 2014.

Perihal Analisis Mengenai Dampak Lingkunga (Amdal) diatur dalam Pasal 22-32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Namun resital-resital ini tidak detil mengatur cara mendapatkan sebuah Izin Lingkungan, dimana Amdal adalah salah satu unsur di dalamnya. Dalam Pasal 33 UU 32/2009 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Amdal akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Republik Indonesia, dengan ditandatangani Oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, pada 23 Februari 2012 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012). Dalam pasal 4 ayat (2) PP 27/2012 disebutkan bahwa lokasi rencana usaha wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Sementara dalam pasal 4 (3) disebutkan bahwa "dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa." Dalam pasal 5 disebutkan bahwa dokumen Amdal terdiri atas: a) Kerangka Acuan; b) Analisis Dampak Lingkungan Hidup/ Andal; dan c) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup/RKL-RPL. Dalam kasus Rembang, pemrakarsa adalah PT Semen Indonesia (SI).

Permasalahannya, Amdal PT SI bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031.

Adapun poin-poin yang bertentangan sebagai berikut:

"Pasal-pasal dalam Tabel 1 berikut dari Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 menunjukkan bahwa Cekungan Watuputih adalah "kawasan lindung geologi imbuhan air."

Tabel 1
Pasal-pasal dalam RTRW Jateng yang Menunjukkan bahwa Kawasan Watuputih Merupakan Kawasan Imbuhan Air

Pasal	Poin
Pasal 30	*Pola ruang wilayah provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya*
Pasal 31	*Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 30, meliputi:* *a) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;* *b) Kawasan perlindungan setempat;* *c) Kawasan suaka alam, kawasan pelesatarian alam, dan kawasan cagar budaya;* *d) Kawasan rencana bencana alam;* *e) Kawasan lindung geologi;* *f) Kawasan lindung lainnya.*
Pasal 40	*kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf d, tersebar di kabupaten/kota yang memiliki mata air*
Pasal 60	*Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e, terdiri dari:* *a. Kawasan lindung kars;* *b. Kawasan cagar alam geologi;* *c. Kawasan imbuhan air.*
Pasal 63	*Kawasan Imbuhan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c, meliputi kawasan resapan air tanah pada Cekungan Majenang, Cekungan Sidareja, Cekungan Nusa Kambangan, Cekungan Cilacap, Cekungan Kroya, Cekungan Banyumudal, Cekungan Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Kebumen-Purworejo, Cekungan Wonosobo, Cekungan Magelang-Temanggung, Cekungan Karanganyar-Boyolali, Cekungan Belimbing, Cekungan Eromoko, Cekungan Giritontro, Cekungan Semarang-Demak, Cekungan Randublatung, Cekungan Watuputih, Cekungan Lasem, Cekungan Pati-Rembang, Cekungan Kudus, Cekungan Jepara, Cekungan Ungaran, Cekungan Sidomulyo, Cekungan Rawapening, Cekungan Salatiga, Cekungan Kendal, Cekungan Subah, Cekungan Karang Kobar, Cekungan Pekalongan-Pemalang, Cekungan Tegal-Brebes, Cekungan Lebaksiu.*

Sedangkan pasal-pasal berikut memperlihatkan ketidaksesuaian antara dokumen Andal PT Semen Indonesia dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011-2031.

Pasal 19 berbunyi:

"Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf f berupa kawasan imbuhan air meliputi: Cekungan Watuputih; dan Cekungan Lasem."

Jadi, Cekungan Air Tanah Watuputih adalah kawasan imbuhan air yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi.

Di dalam dokumen Andal PT SI disebutkan rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo, Kajar, Kecamatan Gunem akan menggunakan luas lahan 520 ha. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011, pasal 27 ayat (2) dinyatakan:

Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 ha (delapan ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

1) *kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang;*
2) *kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 ha (dua ratus sembilan puluh satu hektar) berada di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 ha (dua ratus hektar) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; dan*

3) *kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 ha (dua ratus lima hektar) berada di wilayah Kecamatan Gunem.*

Bahwa dalam rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo, Kajar, Kecamatan Gunem di dalam dokumen Andal disebutkan akan menggunakan luas lahan 520 ha. Ini melebihi luas peruntukan yang diatur dalam Pasal 27 di atas yaitu 205 ha.

Dengan demikian, mengacu ke pasal 4 ayat (2) dan (3) PP 27/2012 seperti yang disampaikan di atas, seharusnya Amdal PT SI dikembalikan kepada pemrakarsa karena tidak sesuai dengan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang. Atas argumentasi ini pula, kami menilai Izin Lingkungan PT Semen Indonesia cacat dan karenanya harus dibatalkan. Karena itu kami menuntut:

Pembatalan Izin Lingkungan PT Semen Indonesia demi penegakan hukum (dalam hal ini PP 27/2012).

Untuk itu kami meminta kepada pihak yang berwenang agar melakukan tindakan hukum mencabut Izin PT Semen Indonesia di Rembang.

Yogyakarta, 7 Desember 2014

Tembusan:

1. *Presiden Republik Indonesia*
2. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*
3. *Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
4. *Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*
5. *Menteri Perindustrian Republik Indonesia*
6. *Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia*
7. *Gubernur Provinsi Jawa Tengah*
8. *Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah*
9. *Inspektur Provinsi Jawa Tengah*
10. *Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah*
11. *Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah*
12. *Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah*
13. *Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah*
14. *Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah*
15. *Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah*
16. *Kepala Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Tengah*
17. *Bupati Rembang*

18. *Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang*
19. *Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang*
20. *Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.*

(BAGIAN 3)

Mitos Kesejahteraan Melalui Pertambangan*

Hendra Try Ardianto

Di mana-mana, ketika ada perusahaan pertambangan akan melakukan eksploitasi, klaimnya selalu tentang upaya menghadirkan kesejahteraan. Dengan adanya investasi pertambangan skala besar, sebuah daerah akan mendapat penghasilan yang besar pula. Pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumberdaya manusia. Selain itu, kehadiran perusahaan besar akan memberikan dampak kesejahteraan bagi kawasan di sekitar pertambangan melalui serapan tenaga kerja maupun "kesejahteraan yang menetes" berupa kebangkitan ekonomi kawasan sekitar tambang. Kenyataan ini diamini oleh pandangan ekonomi neoklasik yang memahami pertambangan sebagai fungsi

---

* Tulisan ini pernah dimuat di *www.literasi.co* pada 10 Februari 2015.

produksi suatu negara. Secara teknis, fungsi tersebut akan menghasilkan *output* berupa tenaga kerja, modal, energi, dan material (Davis dan Tilton, 2002: 5).

Pertambangan juga dianggap mampu memfasilitasi transfer teknologi dan inovasi (Jeannet dan Liander 1978; Sachs 1970; Teece 1977). Dengan adanya teknologi mutakhir, kegiatan pembangunan bisa di-*scale-up*. Oleh karena itu, ekonom neoliberal melihat pengelolaan pertambangan akan lebih baik jika dilakukan oleh korporasi besar. Korporasi di bidang pertambangan dianggap memiliki teknologi tinggi sehingga bisa melakukan transfer teknologi yang ada ke daerah yang wilayahnya ditambang—inilah yang dikenal sebagai efek "pengalaman pembelajaran bersama" (Wright, 1999: 308–313). Selain ada transfer teknologi, pemerintah dan masyarakat lokal dinilai juga akan memperoleh banyak manfaat, seperti lapangan pekerjaan, pembelian lahan, proyek infrastruktur, investasi komunitas, kompensasi, dan ragam instrumen *corporate social responsibility* (Wall dan Pelon, 2011: 7). Itu berarti, pertambangan skala besar tidak hanya memberikan dampak positif bagi pemerintah nasional, tapi juga terhadap masyarakat lokal sekitar tambang. Singkat cerita, ada banyak argumentasi untuk membenarkan ekuivalensi pertambangan dan kesejahteraan.

Tulisan ini mengklaim bahwa nyaris semua pemerintah lokal di Indonesia menggunakan argumen di atas ketika memberikan izin-izin eksploitasi tambang

besar, tidak terkecuali dalam kasus Rembang. Pada saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo begitu antusias mengeluarkan izin-izin eksploitasi pertambangan di wilayah Pegunungan Kendeng untuk perusahaan-perusahaan semen.[1] Pemberian izin yang diklaim sebagai upaya untuk menghadirkan kesejahteraan melalui industrialisasi dimotori oleh perusahaan-perusahaan semen. Setelah berganti kepemimpinan, Ganjar Pranowo[2] selaku Gubernur Jateng tetap memakai narasi "kesejahteraan dari pertambangan" ini guna memuluskan jalan bagi perusahaan-perusahaan pertambangan semen. Berbekal argumen prosedural bahwa PT Semen Indonesia telah mengantongi izin-izin secara sah, dengan enteng visi "Jateng Ijo Royo-Royo" dilikuidasi sendiri oleh Ganjar.

Bagi negara dan korporasi, narasi kesejahteraan dihadirkan secara ekonomistik, yakni dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kawasan-kawasan yang dianggap sebagai lumbung kemiskinan dijadikan sasaran proyek-proyek pembangunan. Di sinilah letak argumentasi mengapa investasi pertambangan skala besar dibutuhkan, yakni keberadaan perusahaan besar untuk mengeksploitasi tambang adalah bagian dari proyek pembangunan, bahkan bagian dari skema pengentasan kemiskinan. Narasi-narasi semacam ini bukanlah hal baru. Nyaris dalam bentang sejarah pertambangan di dunia, perilaku pimpinan daerah/negara selalu menggunakan klaim-klaim tersebut. Sayangnya, dalam banyak hal, kesejahteraan yang

dibayangkan itu justru jauh panggang dari api. Artinya, pertambangan tidak selalu menghadirkan kesejahteraan. Sudah banyak studi yang mengungkapkan hal tersebut.

Foto 3
Aksi Ibu-Ibu dengan Membawa Hasil pertanian



Sumber: www.mongabay.co.id

Sebuah laporan Oxfam berjudul *Digging to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development* menunjukkan bahwa pertambangan tidak banyak memberi efek positif bagi sebuah negara. Dalam laporan tersebut, ditunjukkan bahwa pertambangan memiliki kontribusi yang sangat kecil bagi pendapatan suatu daerah, terutama di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Selain itu, perkembangan ekonomi lokal di kawasan pertambangan ternyata juga bukan lantaran dampak dari sektor pertambangan itu sendiri (Power 2002). Negara/daerah yang mengeksploitasi sumberdaya alam secara besar-

besaran tidak selalu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan beberapa variabel menunjukkan pertumbuhan ekonomi berjalan lebih lambat dibanding dengan negara/daerah yang tidak bergerak di sektor pertambangan (Sachs dan Warner 1997; 2001). Artinya, dari segi argumentasi pendapatan daerah maupun pertumbuhan ekonomi, klaim negara tentang manfaat adanya pertambangan semen di Rembang (dan daerah-daerah lain) tidak selalu relevan dan kurang meyakinkan.

Kehadiran pertambangan skala besar bahkan dituduh sebagai biang keladi konflik yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ketika muncul perusahaan tambang besar, kebanyakan akan diikuti dengan berbagai konflik, baik horizontal maupun vertikal. Kasus *conflict diamonds* di Angola, Sierra Leone, dan Kongo mengonfirmasi argumen tersebut. Di tiga negara ini, *conflict diamonds* telah menciptakan konflik sosial yang masif, bahkan tingkat kemiskinan yang ekstrem (Goreux 2001). Parahnya, pejabat-pejabat negara yang korup memelihara *conflict diamonds* itu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kasus serupa juga banyak terjadi di Indonesia.Konflik-konflik demikian selalu mengorbankan warga sekitar pertambangan dan menguntungkan elite-elite lokal setempat (Jatam 2005, 2006; Maimunah 2012).

Kehadiran pertambangan, khususnya di Indonesia, telah memberikan dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan. Jutaan hektar hutan yang digunduli, gunung-gunung yang dikeruk, dan sungai-sungai yang

tercemar, tidak lain adalah ulah perusahan-perusahaan pertambangan besar yang tidak bertanggung jawab (lihat Aditjondro 2003a, 2003b). Dari kerusakan itu, lagi-lagi masyarakat kecil yang menjadi korban (bahkan dikorbankan). Kemudian, dampak yang tidak kalah mengerikan dari keberadaan pertambangan adalah terjadinya bencana. Publik telah mengenal luas bagaimana kasus Lumpur Lapindo telah menghabisi kehidupan dan penghidupan warga Sidoarjo di puluhan desa hingga saat ini. Juga pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya, yang menjadi bukti tentang begitu berbahayanya dampak pertambangan.Bencana yang diakibatkan oleh tangan manusia atau *man-made disaster* semacam inilah yang perlu diwaspadai (Batubara 2010).

Jika demikian adanya, pertambangan untuk kesejahteraan sebenarnya hanyalah mitos. Pemerintah saat ini, khususnya Ganjar selaku Gubernur Jateng, sedang mencekokkan mitos ini kepada publik Jateng, khususnya warga Rembang. Ganjar, meski "malu-malu" mengakui pro-perusahaan semen, mencoba menutup mata terhadap suara-suara efek buruk dari pertambangan. Suara akan hilangnya mata air, hilangnya pekerjaan, kerusakan alam, dan sebagainya dianggap Ganjar sebagai suara minor yang tidak memiliki arti signifikan. Sebaliknya, kita bisa membaca Ganjar lebih percaya pada pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan pekerjaan, dan kebangkitan ekonomi dengan adanya perusahaan besar yang mengolah Pegunungan Kendeng menjadi bahan baku semen.

Budi Sulistijo,[3] pakar geoteknik dan hidrogeologi dari Institut Teknologi Bandung, bahkan memperkaya mitos kesejahteraan dan pertambangan lewat artikelnya di sebuah koran lokal. Ia menulis, "Sebenarnya ada upaya lain yang juga cerdas, yakni mengubah budaya pertanian yang banyak ditinggalkan generasi muda, menjadi budaya industri yang mengandalkan keahlian." Kalimat itu memperlihatkan bahwa usaha pertanian dianggap tidak menjanjikan kesejahteraan, dibuktikan dengan masih miskinnya warga Kecamatan Gunem di Rembang. Untuk itu, baginya, solusi mengentaskan kemiskinan adalah dengan menghadirkan industri, dalam hal ini pertambangan semen yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia. Argumen ini jelas sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup petani. Mengapa? Sebab, perubahan dari tradisi agraris menjadi industri diperhitungkan sesuka hati, bahkan cenderung dipaksakan. Bagaimana mungkin petani yang *notabane* berpendidikan formal terbatas bisa diserap oleh perusahaan padat modal? Umumnya yang terjadi, mereka hanya akan menjadi tenaga kasar yang penghasilannya bahkan lebih rendah bila dibandingkan dengan menjadi petani. Untuk itu, penulis menilai, argumen demikian selain berbahaya, juga bodoh. Saya anggap berbahaya karena jika dipaksakan akan menghabisi sektor agraris dan penghidupan ribuan petani di sana. Saya anggap bodoh karena argumen demikian sungguh ahistoris, dimana perubahan sosial-kultural tidak memperhitungkan aspek-aspek sosiologis yang ada di masyarakat.

Masyarakat agraris memiliki kekhasan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka menghidupi keluarga dengan cara bercocok tanam. Hasilnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan dijual untuk menambah penghasilan. Tidak aneh pula jika banyak orang saling memberikan (bertukar) hasil tanam kepada tetangga, sebab demikianlah kearifan tradisi agraris dibangun. Di sini, yang hendak saya katakan adalah membaca kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari konteks sosiologis masyarakat yang bersangkutan. Shiva (1997) pernah mengingatkan, kemiskinan tidak bisa dilihat hanya dari rumah berlantai tanah dan fondasi dari kayu karena sesungguhnya mereka bisa memenuhi kesejahteraan sesuai apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Dengan memaksakan adanya industri pertambangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat agraris, hal ini bisa dibaca sebagai upaya penghancuran tradisi agraris berikut dengan orang-orang yang ada didalamnya. Inilah yang menjadi alasan mengapa para petani menolak perusahaan tambang. Sebab, ancamannya memang begitu serius, yakni menyangkut kesejahteraan mereka. Jadi, apalagi namanya jika bukan "tambang untuk kesejahteraan" adalah mitos? Sesuatu yang jelas bertentangan dengan realitas kehidupan masyarakat agraris, khususnya di Rembang.[]

Catatan:

[1] Ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo pernah memberikan izin eksploitasi kepada PT Semen Gresik (sekarang PT Semen Indonesia) di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Namun, pada pertengahan 2009, gugatan warga ke pengadilan ternyata menang sehingga PT Semen Gresik akhirnya dipaksa membatalkan investasinya di Pati. Uniknya, pada 2012, izin serupa kembali diberikan kepada PT Semen Indonesia untuk beroperasi di Rembang.

[2] Ganjar, panggilan akrab dari Ganjar Pranowo, menjadi Gubernur Jateng sejak Agustus 2013. Ganjar diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Saat kampanye pemilihan gubernur, Ganjar selalu menggaungkan visi "Jateng Ijo Royo-Royo".

[3] Budi Sulistijo menulis opini di Suara Merdeka yang berjudul "Kawasan Kars dan Penambangan" (14 Juli 2014). Ia adalah pakar ITB yang menjadi tim peneliti untuk studi kelayakan operasional tambang semen di Rembang.

Literatur:

Aditjondro, G.J. 2003a. *Kebohongan-Kebohongan Negara: Perihal Kondisi Obyektif Lingkungan Hidup di Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. *2003b*. *Korban-Korban Pembangunan: Tilikan terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Batubara, B. 2010. "Defisit Pengetahuan Global Menghadapi *Man-Made Disaster* dan Implikasinya bagi Warga di Negara Berkembang." Dalam *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil*, disunting oleh H. Prasetya dan B. Batubara. Depok: Desantara Foundation.

Davis, G.A. dan J.E. Tilton. 2002. "Should Developing Countries Renounce Mining? A Perspective on The Debate". Versi 12 Desember. Diunduh pada 20 Juni 2014. http://inside.mines.edu/~gdavis/Papers/Davis_and_Tilton_2002.pdf

Goreux, L. 2001. "Conflict Diamonds".*Africa Region Working Paper Series No. 13*. Washington, D.C.:The World Bank Group.

Jeannet, J.-P.danB. Liander. 1978. "Some Patterns in the Transfer of Technology within Multinational Corporations".*Journal of International Business Studies* 9 (3): 108–118.doi:10.1057/palgrave.jibs.8490672.

Maimunah, Siti. 2012. *Negara Tambang dan Masyarakat Adat: Perspektif HAM dalam Pengelolaan Pertambangan yang Berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Malang: Intrans.

Muhammad, Chalid, Siti Maimunah, dan Aminuddin Kirom (penyunting). 2005. *Tambang dan Kemiskinan: Catatan Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia*, 2001-2003. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang.

Muhammad, Chalid dan Siti Maimunah (penyunting). 2006. *Tambang dan Penghancuran Lingkungan: Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang.

Power, T.M. 2002. "Digging to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development". Laporan. Oxfam America.

Sachs, I. 1970. "Transfer of Technology and Strategy of Industrialisation".*Economic and Political Weekly* 5 (29–31):1267+1269–1270.

Sachs, J.D. dan A.M. Warner. 1995. "Natural Resource Abundance and Economic Growth". *NBER Working Paper 5398*. Massachusetts: National Bureau of Economic Research.

_____. 2001. "The Curse of Natural Resources". *European Economic Review* 45: 827–838.

Shiva, V. 1997. *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Diterjemahkan oleh Hira Jhamtani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Teece, D.J. 1977. "Technology Transfer by Multinational Firm: The Resource Cost of Transferring Technological Know-How". *TheEconomic Journal*87 (346): 242–261.

Wall, E.danR. Pelon. 2011. "Sharing Mining Benefits in Developing Countries: The Experience with Foundations, Trusts, and Funds". *Extractive Industries for Development Series No. 21*. The World Bank.

Wright, G. 1999. "Can a Nation Learn? American Technology as a Network Phenomenon". Dalam *Learning by Doing in Markets, Firms, and Countries*, disunting oleh N. R. Lamoreaux, D.M.G. Raff, dan P. Temin. Chicago: University of Chicago Press.

(BAGIAN 4)

Mengapa Pertambangan, Bukan Pertanian?*

Hendra Try Ardianto

Dalam berbagai kesempatan, saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lalu, Joko Widodo (Jokowi) selalu menggaungkan visi besar tentang kedaulatan pangan. Setelah menjadi presiden, visi ini menjadi ujian besar karena ia harus bertindak konkret pada upaya pemenuhannya. Menurut data statistik yang ada, kondisi pertanian Indonesia dalam keadaan terancam. *Sensus Pertanian Tahun 2013* mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir (2003-2013) telah terjadi penurunan sekitar 5 juta rumah tangga yang bergerak dalam usaha pertanian di Indonesia[1]. Selain penurunan itu, ancaman akan regenerasi usaha pertanian juga cukup serius. Saat ini, usaha pertanian lebih banyak dikelola oleh mereka yang sebagian besar generasi tua, sedangkan generasi

---

* Tulisan ini pernah dimuat di website *www.islambergerak.com* pada 30 Maret 2015.

muda tidak banyak menaruh minat bergelut dalam usaha pertanian (*lihat* Tabel 2). Keadaan ini bisa dibaca sebagai awal dari kehancuran masyarakat agraris di Indonesia, dengan keberlanjutan usaha pertanian akan semakin terancam di masa mendatang.

Tabel 2
Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kelompok Umur di Indonesia

No.	Kelompok Umur	Jumlah
1.	<15	3.297
2.	15-24	229.943
3.	25-35	3.129.644
4.	36-44	6.885.100
5.	45-54	7.325.544
6.	55-64	5.229.903
7.	≥65	3.332.038
Jumlah		**26.135.469**

Sumber: diolah dari Survey Pertanian Indonesia 2013

Di pihak lain, pada masa Pilkada 2013, Ganjar Pranowo berkeliling ke desa-desa di Jawa Tengah (Jateng) untuk mengkampanyekan "Jateng Ijo-Royo". Efek dari kampanye ini cukup luar biasa: Ganjar mendapat simpati publik dengan terpilih sebagai gubernur. "Jateng Ijo-Royo-Royo" bukannya slogan yang tidak bermakna, namun berkonotasi keberpihakan pada alam/lingkungan yang ada di Jateng yang sudah semakin memburuk. Kampanye "Jateng Ijo Royo-Royo" begitu tepat dipilih Ganjar karena

Jateng sendiri menyandang status provinsi yang memiliki *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* (IKLH)[2] terburuk ketiga di Indonesia (*lihat* Tabel 3). Buruknya kondisi lingkungan ini diakibatkan limbah industri yang telah mencemari udara, sungai, bahkan penggundulan hutan. Untuk itu, "Jateng Ijo-Royo-Royo" memiliki makna ideologis, yakni penyelamatan terhadap lingkungan yang telah semakin hancur di Jateng.

Tabel 3
IKLH Berdasarkan Tiga Provinsi dengan Nilai Terburuk

No	Provinsi	IKLH 2011	IKLH 2010	IKLH 2009	Rank 2011	Rank 2010	Rank 2009
1.	Jawa Tengah	49.82	50.48	55.40	28	25	20
2.	Banten	48.98	48.98	50.86	29	28	24
3.	DKI Jakarta	41.31	41.81	41.73	30	29	28

Sumber: diolah dari IKLH Indonesia 2011

Dari uraian diatas, saya hendak mengatakan bahwa jika muncul ancaman kehancuran sektor pertanian dan kerusakan lingkungan hidup, maka para pembuat kebijakan harus mengambil tindakan proaktif untuk menyelamatkan kedua kondisi itu. Sayangnya yang terjadi malah sebaliknya. Bukannya memperkuat basis agraris, para pejabat (pembuat kebijakan) malah mengalihfungsikan lahan-lahan pertanian dan kehutanan untuk industri-industri pertambangan. Bukannya melakukan upaya penyelamatan lingkungan, sebaliknya malah menarik perusahaan-perusahaan tambang yang

berdampak buruk terhadap lingkungan. Para pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat ini telah melupakan visi-misi dalam kampanye sebelumnya. Janji politik kembali menemukan nasibnya sebagai kontrak yang begitu saja terlupakan ketika sang politisi sudah terpilih.

Pilihan kebijakan pertambangan di Kabupaten Rembang semakin tidak masuk akal mengingat sebagian besar masyarakat di sana bekerja di sektor pertanian. Menurut data BPS, pada 2011, jumlah rumah tangga yang ada di Rembang adalah 166.194 rumah tangga[3]. Jika data tersebut disandingkan dengan *Sensus* Pertanian *Kabupaten Rembang 2013*,[4] dimana jumlah rumah tangga yang melakukan usaha pertanian ada sebanyak 108.359 rumah tangga, maka itu artinya kurang lebih 2/3 rumah tangga yang ada di Rembang menyandarkan kehidupannya di sektor pertanian. Bagaimana mungkin para pembuat kebijakan lebih memilih membuka usaha pertambangan sementara sebagian besar masyarakat menggantungkan diri pada sektor pertanian? Selain itu, pertambangan dan pertanian adalah dua sektor yang berbeda sama sekali. Pertambangan lebih mengedepankan padat modal, sedangkan pertanian lebih pada padat karya. Keterserapan tenaga kerja jelas lebih banyak pada usaha yang padat karya.

Tidak hanya itu, satu dekade ini (2003-2013), jumlah rumah tangga usaha pertanian di Rembang telah menurun sebanyak 17.900 rumah tangga. Penurunan usaha pertanian ini juga berpengaruh pada penurunan

terhadap produksi ternak. Selama 2011-2013 telah terjadi penurunan sebesar 36.321 ternak (minus 23,76%). Kenyataan ini menunjukkan adanya degradasi yang serius dari sektor pertanian di Rembang. Menyusutnya usaha pertanian semacam ini sebenarnya terjadi di banyak tempat, dimana lahan-lahan pertanian sudah beralih fungsi menjadi pemukiman dan usaha-usaha non-pertanian yang lain. Konteks ini seharusnya menjadi sesuatu yang diwaspadai para pembuat kebijakan. Ancaman kedaulatan pangan di masa mendatang bukan lagi perkiraan di atas kertas, namun telah menjadi momok yang niscaya akan hadir dalam kehidupan sehari-hari warga Rembang. Sebab, kehancuran sektor pertanian, khususnya di Rembang, sudah ada di depan mata lewat rencana pendirian pabrik semen.

Hadirnya perusahaan skala besar dalam sektor pertambangan, terlebih pertambangan semen yang *notabane*-nya memiliki daya pengaruh besar terhadap lingkungan, jelas merupakan kebijakan yang kontra-produktif terhadap kondisi darurat pertanian yang ada di Rembang. Padahal jelas—meski pemerintah dan perusahaan tidak mengakui adanya dampak buruk pertambangan—dokumen AMDAL memberikan uraian detail apa saja dampak buruk yang akan terjadi, mulai dari penurunan kualitas udara, kerusakan flora dan fauna, kerusakan bentang alam, kerusakan fisik jalan dan lain sebagainya[5]. Apalagi rencana pertambangan itu dilakukan di Kecamatan Gunem, dimana ketahanan

ekonomi masyarakat sejak lama ditopang dari sektor pertanian. Hal ini ditunjukan dari hasil *Survey Pertanian Kab. Rembang 2013*, dimana Kecamatan Gunem adalah satu-satunya kecamatan di Kabupaten Rembang yang selama 10 tahun tidak mengalami penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian[6]. Artinya, masyarakat Gunem masih berhasil mempertahankan generasinya dalam usaha pertanian.

Sebagai penutup, lewat paparan di atas saya hendak mengatakan bahwa kebutuhan menyelamatkan sektor pertanian dan lingkungan terbukti tidak pernah menjadi pilihan yang diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan. Sebaliknya, mengambil kebijakan melalui investasi pertambangan justru menjadi prioritas mereka meskipun hal ini bisa semakin memperparah kodisi pertanian dan lingkungan. Ini semua bisa terjadi bukan lantaran kesalahan menganalisis kebijakan secara cermat, namun memang karena para pembuat kebijakan memiliki kepentingan yang berbeda dengan nalar publik. Para pembuat kebijakan hanya mementingkan bagaimana caranya meningkatkan pendapatan daerah (PAD) tanpa peduli bahwa banyak orang sedang terancam akibat kebijakan pertambangan[7]. Tidaklah mengherankan jika di level legislatif kebijakan pertambangan ini berjalan begitu mulus, DPRD yang seharusnya menjadi pengawas eksekutif tentu akan banyak mendapat limpahan berkah jika PAD naik[8].

Apakah hal semacam ini layak kita diamkan. Kalau tidak, inilah saatnya kita semua harus segera bergerak melawannya! []

Catatan:

[1] Pada 2013, jumlah usaha pertanian sebanyak 26.135.469 rumah tangga. Jika dibandingkan dengan tahun 2003, telah terjadi penurunan sebesar 5.096.715 rumah tangga (lihat Sensus Pertanian 2013).

[2] Indeks ini dihitung berdasarkan kualitas tiga indikator, yakni kualitas udara, kualitas air, dan tutupan hutan. Hasil penghitungan IKLH 2011, Jateng menduduki peringkat ke-28 dari 31 daerah yang disurvey. (lihat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2011).

[3] Rembang dalam Angka 2012.

[4] Sensus Pertanian Kabupaten Rembang 2013.

[5] Lihat ANDAL Bab IV Evaluasi Dampak.

[6] Dari penurunan sebesar 17.900 rumah tangga usaha pertanian di Rembang, satu-satunya wilayah yang tidak mengalami penurunan dalam 10 tahun hanya Kecamatan Gunem. Lihat Sensus Pertanian Rembang 2013.

[7] Hilmy Mochtar (2006) dalam disertasinya pernah menguraikan hal serupa. Di awal 1990-an, pembangunan PT. Semen Gresik (sekarang PT. Semen Indonesia) di Kabupaten Tuban lebih diwarnai perdebatan eksekutif (Pemda Tuban) dan legislatif (DPRD)

terkait tentang persoalan PAD yang diperoleh dari pertambangan PT. Semen Gresik.

[8] Menurut PP 37 Tahun 2006 sebagai perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, gaji anggota DPRD bergantung pada kapasitas keuangan daerah. Jika suatu daerah memiliki kapasitas keuangan tinggi, maka gaji anggota DPRD pun akan semakin tinggi.

(BAGIAN 5)

Benarkah Batu di Rembang "Tidak Memiliki Sumber Air"?*

Bosman Batubara

Persidangan terhadap kasus Izin Lingkungan PT Semen Indonesia (SI) Tbk. di Rembang berujung pada penggrudukan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) oleh massa petani dan ibu-ibu Rembang. UGM menjadi sasasaran karena dua orang akademisinya, Eko Haryono (EH) (dosen Fakultas Geografi), dan Heru Hendrayana (HH) (dosen Teknik Geologi) tampil sebagai saksi ahli pihak PT SI dalam persidangan. Kesaksian yang dianggap bermasalah bagi warga Rembang inilah yang menjadi pangkal persoalan. Namun, sebelum menguraikan apa persoalan yang dipermasalahkan tersebut, perlu dijelaskan bagaimana teknis sebuah Amdal dikerjakan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 27/2012 disebutkan bahwa *Analisis Mengenai Dampak*

---

* Tulisan ini pernah dimuat di website *www.literasi.co* pada 23 Maret 2015.

Lingkungan (Amdal) terdiri atas: a) Kerangka Acuan; b) Analisis Dampak Lingkungan Hidup/ Andal; dan c) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup/RKL-RPL. Istilah-istilah ini perlu dijelaskan di awal agar tidak membingungkan. Hal ini harus dilakukan karena pemberitaan di *Tribunnews* (19 Maret 2015) memuat kesaksian HH sebagai berikut:

> Heru mengatakan PT Semen Indonesia Tbk melakukan penambangan batu gamping (kapur) sebagai bahan baku semen. Batu seperti ini berada di wilayah yang tidak memiliki sumber air... "*Jadi tidak ada masalah dalam pembangunan pabrik semen di Rembang*"

Tulisan ini menilik argumentasi HH dari dua titik tolak. *Pertama*, bahwa nada pasti yang ditunjukkan oleh pernyataan tersebut tidak lazim dalam dunia ilmu geologi/hidrologi yang penuh dengan interpetasi (dan ketakpastian). *Kedua*, dengan menghadirkan data dan interpretasi tandingan, tulisan ini menunjukkan bahwa keterangan saksi ahli PT SI keliru.

Pertama, soal interpretasi. Pemodelan dalam peta geologi dan juga peta hidrogeologi (air tanah) pada dasarnya adalah usaha untuk menampilkan apa yang ada di alam, dibantu dengan sudut pandang skala, maka sesuatu menjadi lebih kecil dan dengan itu menjadi lebih *mobile,* sehingga harapannya, kompleksitas alam bisa dipahami dari sebuah model. Namun penting dicatat di sini, peta ataupun model, bukanlah alam itu sendiri. Peta

atau model adalah satu realita. Sementara alam yang nyata adalah realita yang lain.

Dalam Andal PT SI di Rembang data yang digunakan adalah data pemboran dan data geolistrik. Pemboran dilakukan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan baik melalui data *geological (rock core)* maupun *geophysical log*. Sementara survei geolistrik dilakukan untuk mengetahui tahanan jenis lapisan batuan di bawah permukaan. Metode lain yang lebih sederhana yang bisa dipakai misalnya, pemetaan geologi dengan melakukan pengamatan singkapan dan pengukuran kedudukan perlapisan batuan.

Ketiga metode di atas menghadirkan interpretasi masing-masing. Dalam BAB III Andal PT SI disebutkan bahwa ada data pemboran. Saya berusaha mencari-cari berapa titik bor yang digunakan, namun sependek yang dapat saya temukan tidak disebutkan secara jelas jumlah titik bor yang digunakan. Jadi, kemungkinan besar titik bor yang digunakan adalah 5. Keterangan tentang diameter bor juga tidak saya temukan dalam dokumen Andal, namun saya perkirakan tidak lebih dari 10 cm. Dengan demikian, bisa dibayangkan lokasi penambangan seluas 520 hektar [PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. 2012] dicoba diidentifikasi dengan menggunakan 5 titik bor. Poin saya, sekalipun digunakan 10 atau 50 titik bor, itu tetaplah tidak merepresentasikan secara persis seluruh area.

Hal yang sama terjadi dengan survei geolistrik. Model yang disajikan dalam dokumen Andal PT SI jelas memperlihatkan unsur interpretasi ini. Hal ini misalnya ditampilkan dalam bentuk "garis putus-putus" sebagai tanda ketidakpastian, atau tingkat keyakinan si penginterpretasi yang relatif lemah terhadap apa yang ia interpretasikan. Bandingkan misalnya andaikan sebuah tanda dalam peta geologi ditampilkan dengan garis tegas. Dalam metode pemetaan geologi melalui pengamatan singkapan dan pengukuran kedudukan perlapisan batuan, hal yang sama juga berlaku. Dari beberapa titik yang dilakukan pengumpulan data, para geolog biasanya akan menyusun peta geologi. Lebih jauh, semua sumber data seperti data pemboran, data geolistrik, dan data pemetaan geologi melalui pengamatan singkapan dan pengukuran kedudukan perlapisan batuan, kemudian dikombinasikan untuk membentuk model geologi yang kemudian ditampilkan dalam bentuk peta 2 dimensi maupun bagan 3 dimensi.

Persis di titik inilah tulisan ini melihat sumber-sumber ketakpastian dalam kerja geolog: dari transformasi data 1 dimensi (data pengeboran serta data pengamatan singkapan dan pengkuran kedudukan perlapisan batuan) ke 2 dimensi (peta); dan karena logika ekstrapolasi yang sama kembali dipakai, ketakpastian yang sama muncul dalam proses transformasi 2 dimensi (peta) menjadi bagan 3 dimensi yang bersifat volumetrik.

Tidak seperti HH yang kalau mengacu kutipan di atas memberikan pernyataan bernada pasti, padahal dokumen Andal PT SI sendiri sangat menyadari sifat interpretatif yang dikandungnya. Hal ini terlihat dari penggunaan kata "diperkirakan" pada sub-bab "Kuantitas Air" yang muncul berulang-ulang dalam dokumen tersebut, seperti yang disajikan dalam kutipan berikut:

> *Kegiatan PT Semen Gresik terhadap kondisi hidrologi dan hidrogeologi diperkirakan terutama akan berdampak pada mata air yang berada di tenggara areal IUP PT Semen Gresik. Dampak ini dapat diperkirakan dengan keberadaan jaringan lembah permukaan di aeral IUP yang bermuara ke arah Tenggara* (PT. Semen Gresik Tbk. 2012, halaman 48 Bab V, garis bawah dari penulis).

Atau seperti:

> *Mata air Brubulan diperkirakan akan terkena dampak dari kegiatan penambangan PT Semen Gresik karena sistem lorong (conduit) dari Mata air Brubulan mempunyai jaringan hingga ke areal IUP PT Semen Gresik* (PT. Semen Gresik Tbk. 2012, halaman 49 Bab V; garis bawah dari penulis).

Dari penggunaan kata "diperkirakan" dalam kutipan yang ditampilkan di atas, terlihat jelas dimensi interpretasi dalam dokumen Andal PT SI. Dan memang demikianlah biasanya cara berargumentasi dalam disiplin ilmu geologi. *Dus*, perdebatan bukanlah hal asing. Khalayak mungkin masih segar ingatannya soal perdebatan para geolog soal penyebab Lumpur Lapindo. Tulisan ini tidak akan masuk ke kasus Lapindo lebih jauh, kalau tertarik,

direkomendasikan untuk membaca Batubara dan Waluyo (2012).

Kedua, data pembanding untuk memperlihatkan kesalahan argumentasi HH. Pada argumennya yang dikutip di atas, HH menyatakan bahwa "*Batu seperti ini berada di wilayah yang tidak memiliki sumber air*." Kemungkinan besar apa yang dimaksud oleh HH sebagai "sumber air" dalam kesaksiannya adalah air yang muncul dari dalam tanah, bisa jadi berbentuk mata air. Argumen ini bersandar pada fakta bahwa HH seorang hidrogeolog.

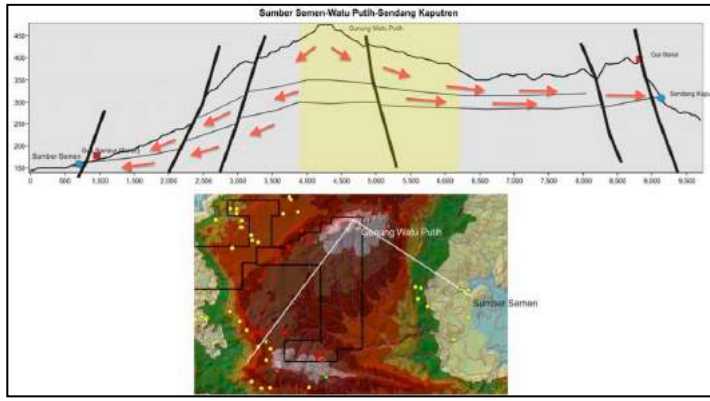
Setentang ini, dimulai dari fakta *pertama*. Pertanyaan sederhana, apakah yang dimaksud "sumber air" cuma air yang keluar dari dalam tanah? Bagaimana dengan aliran air permukaan yang muncul pada saat terjadinya hujan dan ditampung manusia sebagai bentuk cadangan air, ataupun digunakan tumbuhan dan binatang untuk melanjutkan kehidupannya? Kalau aliran air permukaan yang tergantung musim ini juga bisa disebut sebagai "sumber air" maka dengan telak kita bisa melihat masalah dalam argumentasi HH. Karena, berdasarkan peta yang disajikan oleh PT SI dalam dokumen Andal, terlihat jelas bahwa lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SI dipenuhi dengan garis-garis putus-putus yang merepresentasikan kontur permukaan yang berbentuk lembah. Lembah-lembah seperti ini, kalau definisi "sumber air" juga mencakup aliran permukaan, pada musim tertentu berfungsi sebagai sumber air.

Fakta *kedua*, argumentasi HH yang menyatakan bahwa batu yang akan ditambang tidak memiliki sumber air, harus ditelaah secara seksama. Dalam dokumen gugatan warga dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang sekarang dalam masa persidangan di PTUN Semarang, disebutkan ada 3 *ponor* (lubang masuknya air ke dalam tanah pada ekosistem karst) di dalam area IUP PT SI (lihat Tim Advokasi Peduli Lingkungan 2014, hlm. 29-30). Apa artinya?

Artinya HH secara paradigmatik memisahkan "sumber air," yang kemungkinan dalam pengertian HH adalah mata air yang keluar dari tanah, dengan *ponor* sebagai "lubang masuknya air ke dalam tanah pada ekosistem karst." Kalau berpikir sistemik, maka argumentasi HH bisa dites sebagai berikut. Apakah *ponor* sebagai "lubang masuknya air ke dalam tanah pada ekosistem karst" adalah bagian yang terpisah dari "mata air yang keluar dari tanah," ataukah keduanya ada dalam satu sistem yang saling berhubungan? Penulis percaya yang kedua. Alasannya sederhana, "air masuk" dan "air keluar" adalah bagian yang berbeda dari satu ekosistem karst yang sama, dan dengan demikian berarti bukan sesuatu yang terpisahkan. Dengan tidak munculnya keberadaan *ponor* serta cara pandang inheren yang memisahkan "air masuk" dengan "air keluar," dapat disebut bahwa HH telah terpenjara pada sudut pandang yang tidak sistemik dalam melihat ekosistem karst.

Fakta *ketiga*, peta sayatan melintang di sekitar Gunung Watu Putih dan hubungannya dengan mata air di sekitarnya seperti disajikan dalam Gambar 5 berikut.

Gambar 5
Sayatan Melintang Gunung Watu Putih dan sekitarnya



Sumber: Dokumen Andal PT SI; tanda panah merah pada bagian atas dari penulis.

Mengingat dimensi "interpretasi dalam ilmu hidrologi" seperti yang disampaikan pada bagian sebelumnya, maka aliran air tanah juga bisa diinterpretasikan bergerak seperti tanda panah merah dalam Gambar 5. Dengan demikian, ini bisa membantah argumen bahwa pengaruh penambangan di sekitar Gunung Watu Putih terhadap mata air Sumber Semen sangat kecil seperti argumentasi yang coba dibangun oleh Andal PT SI. Argumentasi PT SI sehubungan dengan mata air Sumber Semen ini bukan tanpa alasan. Sumber Semen adalah sumber air buat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rembang dengan

debit 80 liter/detik dan untuk irigasi dengan debit 477 liter/detik (Hidayat 2013, hlm. 95).

Fakta *keempat*, argumentasi HH akan semakin hambar kalau dihadapkan dengan pengakuan warga Rembang berdasarkan pengamatan lapangan. Dalam keterangannya kepada *Kompas* (16 Agustus 2014), Djumadi menyatakan bahwa Amdal PT SI tak sesuai fakta. Ketidaksesuaian ini misalnya terlihat dari Amdal yang menyebutkan bahwa di kawasan ini hanya ada 9 gua, padahal dirinya menemukan 49 goa, dengan 4 diantaranya memiliki sungai bawah tanah. Ketaksesuaian kedua terletak pada keterangan dalam Amdal yang menyebutkan Goa Megah berkedalaman 115 m dan merupakan goa kering. Padahal menurut Djumadi kedalamannya hanya 20 m dan memiliki sungai bawah tanah.

Dengan demikian, berdasarkan dua argumentasi kunci yang disampaikan (nada yang terlalu pasti pada keterangan saksi ahli PT SI serta data dan interpretasi tandingan yang menunjukkan kesalahannya), maka tulisan ini tak memiliki cara lain untuk mengakhiri dirinya selain memberikan rekomendasi kepada PTUN Semarang untuk memenangkan gugatan warga dan WALHI. Hal ini penulis lakukan karena argumen-argumen saksi ahli, EH dan HH menyalahi nalar ilmu geologi yang penuh perdebatan (ketidakpastian), kecuali jika kesaksiannya itu harus dibilang sebagai kesaksian yang penuh manipulasi. []

Literatur:

Batubara, Bosman, dan Paring Waluyo Utomo, 2012, *Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Migas di Sidoarjo*. INSIST Press, Yogyakarta.

Batubara, Bosman, 2014, *Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang Harus Dibatalkan Demi Hukum*. 7 Desember. Diakses di: *http://www.daulathijau.org/?p=414;* pada 22 Maret 2015.

Hidayat, Guswakhid, 2013. *Kajian Optimalisasi dan Strategi Sumber Daya Air di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah* (Tesis). Semarang: Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Kompas, 2014. *PBNU: Hentikan Pabrik Semen Rembang*. Koran KOMPAS Halaman 13, Sabtu 16 Agustus 2014.

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., 2012, *Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)*.

Tim Advokasi Peduli Lingkungan, 2014, *Dokumen Gugatan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 668.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah*.

Tribunnews, 2015, *Pakar Hidrologi UGM Sebut Batu Gamping di Rembang Tidak Mengandung Air*. 19 Maret. Diakses di: http://jateng.tribunnews.com/2015/03/19/pakar-hidrologi-ugm-sebut-batu-gamping-di-rembang-tidak-mengandung-air; pada 22 Maret 2015.

(BAGIAN 6)

Ganjar Pranowo dan Keculasan Seorang Politisi Salon*

Dwicipta

"Jangan menjadi salon politikus!"
Bung Karno dalam Sarinah.

Begitu resmi dicalonkan sebagai calon Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo langsung dipopulerkan sebagai seorang politisi cerdas disamping diprofilkan sebagai politisi muda, energik, dan menarik. Dalam selimut euforia keberhasilan Joko Widodo yang menarik perhatian publik, di tengah kerja keras PDI-P meyakinkan kandang bantengnya sendiri atas profil politisi yang selalu tampil pintar di layar televisi, publik Jawa tengah *'dipaksa'* menaruh harapan besar pada lelaki kelahiran Karanganyar lebih dari 45 tahun lalu tersebut. Maka tidak mengherankan apabila sejak pertama kali menduduki kursi

---

* Tulisan ini pernah dimuat di website *www.daulathijau.org* pada 13 Juli 2014.

kepemimpinan politik Jawa Tengah, rakyat menunggu-nunggu seperti apa prestasi yang akan ditorehkan oleh Ganjar Pranowo yang dikampanyekan sebagai politisi muda, cerdas, energik, dan menarik.

Cobaan pertama yang harus dihadapinya sebagai gubernur adalah ketika sekelompok anak muda yang ingin mengadakan diskusi dan bedah buku Tan Malaka karya Harry A Poeze diprotes dan diintimidasi oleh berbagai kelompok yang mengaku dirinya 'anti-komunis.' Tindakan berlebihan elemen-elemen masyarakat yang mengaku dirinya anti-komunis ini mendapatkan reaksi hebat di media sosial seperti facebook dan twitter. Publik media sosial beramai-ramai menyerukan Ganjar Pranowo selaku pemimpin politik Jawa tengah untuk turun tangan langsung dalam mengawal amanat konstitusi tentang kebebasan mengemukakan pendapat. Apa respon Ganjar Pranowo? Begitu desakan menghebat, secara *innocent* ia menyatakan bahwa dirinya tidak diberitahu perihal heboh rencana bedah buku Tan Malaka di Semarang. Desakan hebat itu pula yang membuatnya mengikuti nalar sehat publik dan menjadi penjamin terselenggaranya acara.

Cobaan serius berikutnya adalah kasus Urutsewu. Para petani wilayah pesisir Urutsewu, Kebumen, yang telah bertahun-tahun tak memeroleh kejelasan atas tanah mereka yang diklaim oleh tentara bekerja bahu-membahu dengan para seniman, akademisi, intelektual, dan mahasiswa guna memeringati 3 tahun tragedi penembakan petani Setrojenar. Kasus ini meledak di media

massa *mainstream* maupun media sosial karena fitnah Suara Merdeka bahwa elemen gerakan yang terlibat acara kesenian di Urutsewu memeroleh dana sebesar 9 milyar. Salah satu efek dari ledakan isu ini adalah besarnya tuntutan publik agar Ganjar Pranowo bisa memediasi konflik antara TNI dan warga Urutsewu atas tanah yang diklaim TNI itu. Di sini Ganjar Pranowo melakukan serangkaian blunder yang bertolak-belakang dengan citra-dirinya sebagai politisi cerdas. Pertama, tanpa bertemu terlebih dahulu dengan para petani Urutsewu yang menjadi satu di antara subyek paling berkepentingan dalam kasus Urutsewu, Ganjar melakukan pertemuan dengan Bupati Kebumen dan Kasdam IV Diponegoro. Setelah mengadakan pertemuan itu, ia mengeluarkan pernyataan yang menjadi blunder kedua: "Kalau TNI merasa memiliki tanah di Urutsewu, mereka dipersilahkan untuk melakukan permohonan sertifikasi tanah ke BPN." Blunder ketiga, yang membuat pemimpin politik ini mengingkari citra yang dibangunnya sejak kampanye sebagai politisi yang cerdas, energik dan menarik adalah ini: sejak mencuatnya kasus Urutsewu, ia belum pernah melakukan dengar-pendapat langsung dengan warga Urutsewu. Alih-alih menggunakan pendekatan kerakyatan seperti yang menjadi jargon partainya, Ganjar Pranowo lebih suka menggunakan pendekatan manipulatif dengan melakukan pertemuan dengan Bupati dan Kasdam IV Diponegoro yang sangat elitis. Blunder berikutnya, untuk menutupi keculasan-keculasan yang sudah terlanjur diketahui publik itu, ia melakukan politik pencitraan

dengan aksi marah-marahnya di Jembatan Timbang Batang dengan membawa awak media sehingga berita itu menjadi heboh sesaat di media massa nasional serta sukses mengubur isu Urutsewu yang eskalasinya mulai meningkat.

Kisah sang Gubernur parlente ini tak berhenti di kasus Urutsewu. Berjarak dua bulan dari kasus Urutsewu di Kebumen, Ganjar dihadapkan dengan ujian kepemimpinan berikutnya. Pada tanggal 16 Juni 2014, kerusuhan pecah saat pihak pabrik Semen Indonesia yang akan mengadakan peletakan batu pertama di tapak pabrik diprotes warga Tegaldowo dan Timbrangan. Polisi dan tentara bertindak brutal dengan melemparkan Murtini (petani desa Timbrangan) dan Suparmi (petani desa Tegaldowo) ke semak-semak hingga pingsan, melakukan pengejaran terhadap warga yang memantau dan mendokumentasikan aksi warga dari kejauhan. Akibat tindakan brutal itu, enam orang yang sedang melakukan dokumentasi aksi ditangkap. Polisi juga melakukan tindakan brutal dengan mengobrak-abrik tenda keprihatinan warga, melarang adanya alat penerangan, sampai menghalang-halangi masuknya logistik ke tapak pabrik yang menjadi tempat diadakannya aksi warga.

Heboh di media sosial dan media massa lokal maupun nasional kembali terjadi. Berbagai kelompok masyarakat menyatakan simpatinya atas tindakan sewenang-wenang aparat lewat berbagai saluran. Aksi solidaritas terjadi hampir di seluruh Indonesia. Seruan agar Gubernur

Ganjar Pranowo memediasi konflik antara warga dan pihak semen kembali naik dalam tensi yang lebih tinggi. Seruan bertubi-tubi dari berbagai lapisan di masyarakat, aksi solidaritas yang diselenggarakan di banyak kota di Indonesia, dan *sweeping* terhadap simpatisan yang datang ke lokasi aksi keprihatinan warga di dekat tapak pabrik oleh preman membuat Ganjar akhirnya mau mengadakan dengar-pendapat dengan warga Tegaldowo dan Timbrangan. Rombongan yang ikut dalam audiensi ini adalah Ming Lukiarti, Baskoro, Marno, Adin, seorang pegiat gua yang meneliti gua-gua di wilayah Rembang dan Pati, dan beberapa orang lainnya. Mas Marno, salah satu peserta dengar-pendapat dengan Gubernur, bercerita tentang pengalaman audiensi dengan Ganjar Pranowo di Semarang. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal sekali Ganjar telah secara semena-mena menyeleksi orang-orang yang melakukan audiensi dengannya. Dari ceritanya pula muncul keterangan bahwa Ganjar memarahi orang-orang di Semarang yang melakukan aksi solidaritas untuk warga Rembang yang menolak pendirian pabrik semen. Itu sebabnya di saat bertemu pertamakali dengan Ganjar ia mau salaman, setelah proses audiensi, ia memutuskan untuk tidak bersalaman dengan Ganjar. Apa yang dikatakan Marno ini memeroleh penegasan karena sehari sebelum bertemu dengan Marno, saya mengadakan wawancara dengan Adin Mbuh soal audiensi dengan Gubernur. Dalam kata-kata Adin, "Dia nampaknya masih ingat aku soal diskusi Tan Malaka itu. Waktu audiensi dia ngakunya tidak tahu apa-apa soal Rembang sampai

orang ramai memaki-mami dia di media sosial. Diskusi Tan Malaka Ganjar juga ngakunya tidak tahu apa-apa tapi di-*bully* di media sosial. Dia ngomong begitu karena tahu aku ikut dalam rombongan orang yang ikut audiensi." Penegasan makin kuat didapatkan dari MW, seorang anggota klub peneliti gua (speleologi). Dalam kata-kata MW: "Ganjar menanyai orang-orang yang beraudiensi dengan dia. Kalau bukan warga asli Rembang dia tidak mau ngomong. Aku ditanyai, dan ketika kujawab sedang meneliti gua di Rembang, dia langsung tak mau berbicara denganku."

Politik eksklusi terhadap aktor-aktor di luar warga lokal yang menolak pendirian pabrik semen yang dilakukan oleh Ganjar ini secara telak menampar wajah Soekarno maupun wajah ideologi partainya yang terus memberi teladan kedekatannya dengan massa bawah (kaum marhaen sebagaimana petani yang menolak pendirian pabrik semen). Eksklusi para aktivis lingkungan, arkeologis, atau ahli karst yang ikut dalam pembicaraan soal penolakan pabrik semen bisa diartikan bahwa Ganjar adalah pemimpin politik yang ingin melestarikan kebodohan (dan kebebalan) warganya sendiri. Warga atau massa bawah yang sehari-hari hanya bertani tak akan pernah tahu soal lambung air di bawah karst, benda-benda arkeologis yang bisa membuat warga lokal mengetahui sejarah nenek moyang dan peradabannya, kehancuran lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi pabrik semen, dan pengetahuan-

pengetahuan lain yang membuat warga yakin bahwa di balik kemiskinan permukaan tanah kapur yang mereka tempati, wilayah Gunung Kendeng di Rembang menjaga keseimbangan hidup bukan hanya warga Rembang namun juga wilayah-wilayah lainnya. Pembodohan mana yang lebih memalukan daripada yang dilakukan oleh seorang pemimpin politik yang mengklaim dirinya sebagai perwakilan *wong cilik ini*?

Tindakan Ganjar ini menjadi anti-tesis dari ucapan Soekarno yang mengeluhkan susahnya mendidik rakyat supaya cerdas. Dalam kata-kata Soekarno, *"Mendidik rakyat supaya cerdas butuh waktu bertahun-tahun."* Ganjar memang bukan Soekarno. Sikap politik Ganjar yang secara tersirat namun secara sistematis berusaha membuat bodoh rakyatnya apabila diterjemahkan dalam kata-kata akan berkebalikan dengan kata-kata Soekarno:*"Menjadikan rakyat terus menerus bodoh tak perlu waktu bertahun-tahun!"* Beraudiensilah para warga Jawa Tengah yang mengalami berbagai macam persoalan dan ajak-sertalah para ahli hukum, ahli lingkungan, ahli karst, ahli kesenian yang ingin menjelaskan kepentingan warga dari perspektif ilmunya masing-masing dan saksikan bagaimana Ganjar menyingkirkan para ahli itu dengan alasan bukan penduduk lokal yang punya kepentingan konkret atas persoalannya. Warga Wonogiri yang mengalami persoalan serupa dengan Rembang dan Pati, warga Wonosobo yang sedang dalam konflik tanah, warga Batang yang sedang menghadapi konflik dengan korporasi berwujud PLTU,

warga Jepara yang sedang berhadapan dengan PLTN, silahkan buktikan keculasan Gubernur yang dicitrakan cerdas dan menarik ini!

Kekenesan sebagai politisi salon tampak dalam berbagai pernyataan-pernyaaannya. Dalam audiensi antara Ganjar dan warga penolak pabrik PT. Semen Indonesia kemarin, ia mengeluarkan pernyataan bahwa sebelum datang ke lokasi itu ia sudah membaca semua informasi tentang isu pabrik semen di Rembang. Saat mengucapkan kata-kata itu, pancaran mukanya tampak terang, wajahnya manis, dan senyum kecilnya mengembang. Hal ini justru berkebalikan dengan responnya saat diminta menanggapi desakan agar mengurusi kasus Rembang dan Urutsewu di media sosial. Dia membuat pernyataan bahwa dirinya tidak tahu duduk perkara apa-apa tapi dimaki-maki di media sosial. Di satu sisi Ganjar menempatkan dirinya sebagai orang yang bermuka manis kepada warga (agar ia mendapatkan simpati dari warga), sementara di sisi lainnya ia menampilkan diri sebagai orang yang naif dan *innocent*. Permainan teater busuk apalagi yang dimainkan Ganjar ini, demikian pikir saya.

Pikiran soal cara berpikir Ganjar yang berusaha bermuka manis di hadapan warganya dan memasang wajah *innocent* atau naif di hadapan banjir kritik media sosial saat ditanya wartawan (itupun wartawan yang tak kritis-kritis amat dan dianggap akan aman memberikan pemberitaan) ini menemukan simetrinya pada cara berpikir elitis dan perebutan ruang pengaruh antara

dirinya dengan elite nasional lain yang dianggap bisa menggerus otoritasnya. Hal ini didasari dengan sebuah fenomena sehari sebelum hadirnya Ganjar Pranowo di dekat tapak pabrik. Hari Kamis, Alissa Wahid (putri kedua Gusdur) datang ke lokasi ibu-ibu yang menentang pendirian pabrik Semen Indonesia di Desa Kadiwono (Dukuh Tambak Selo). Lokasi tapak pabrik itu tanahnya sebagian milik Desa Kajar (Kec.Gunem) dan sebagian lagi milik Kadiwono (Kec. Bulu). Kehadiran Alissa diartikan Ganjar sebagai dukungan seorang elite nasional terhadap ibu-ibu yang menentang pendirian pabrik semen. Dalam ekstrem yang lain, kehadiran Alissa di lokasi sengketa itu juga dianggap merongrong kewibawaan dia sebagai Gubernur atau pemimpin politik Jawa Tengah.

Barangkali berangkat dari pertimbangan itu ia kemudian memutuskan untuk datang dan menyorongkan muka manisnya ke warga yang berada di lokasi sengketa. Ia berharap kewibawaannya sebagai pemimpin politik bisa kembali dengan hadir di lokasi tapak pabrik. Yang tidak ia perkirakan adalah reaksi warga setelah beraudiensi dengannya: Beberapa warga tidak mau bersalaman dengannya! Bagaimana Ganjar sebagai pemimpin politik—apalagi pemimpin politik dalam kacamata etika Jawa yang sangat patronisik—bisa ditolak oleh warga yang tidak terdidik secara formal dan tak mengalami pendidikan politik non-formal yang baik? Kalau saja Ganjar memiliki sensibilitas sebagai seorang pemimpin politik yang berkarakter, yang mengamalkan ajaran

trisakti Bung Karno mengingat dirinya yang konon seorang nasionalis, yang memiliki simpati terhadap massa bawah yang menjadi pembela gigih PDI-P selama enam tahun terakhir, ia tentu akan membaca bahwa sikap warga yang menolak bersalaman adalah sinyal dari berpisahnya massa bawah dengan pemimpinnya. Hal ini biasanya akan diikuti dengan arus ketidakpercayaan politik yang meluas terhadap berbagai kebijakannya ke depan.

Selama mendengarkan audiensi antara Ganjar Pranowo dengan warga, saya jadi betul-betul teringat dengan apa yang dikatakan Galeano: Persoalan terbesar manusia adalah karena ia lebih banyak menggunakan mulutnya yang hanya satu, sementara sepasang telinga, mata, dan lubang hidung serta indera perabanya yang jumlahnya tak terbatas tak dipakai. Dalam kasus seorang pemimpin yang tengah menemui warganya yang sedang dilibat persoalan, diktum Galeano ini hampir menemukan kebenaran mutlaknya. Ganjar Pranowo, politisi yang berpenampilan elegan, berambut rapi, dan bermuka manis itu lebih banyak mengeksploitasi mulutnya daripada menggunakan mata dan telinganya untuk menghadapi warganya. Ia bahkan tak menggunakan kehalusan telapak tangannya untuk merasakan derita rakyat bawah yang mengajaknya bersalaman. Dengan posisi berjongkok di depan para perempuan yang menolak pendirian pabrik semen yang berteduh di bawah tenda keprihatinan mereka, ia bergaya layaknya seorang raja sedang bertemu dengan kawulanya. Jemari tangan dan gerakan kepala

pemimpin politik tertinggi di Jawa Tengah ini memberi isyarat siapa yang akan mengeluarkan uneg-unegnya. Di hadapan dan belakangnya para wartawan dan juru kamera sibuk mengambil foto dan merekam peristiwa itu. Betapa sial: isyarat memerintah itu tak dibarengi dengan kesediaannya mendengar dan menyimak betul-betul curahan hati warganya. Mulutnya gatal dan segera mengeluarkan segala pemanis atau dengan nada bicara seorang raja menghentikan keluhan warga sekehendak dirinya.

Seluruh perilaku dan cara berpikir seperti yang ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo di atas, tanpa bisa dibantah lagi, adalah ciri-ciri pemimpin politik yang ditakutkan Soekarno akan menjangkiti pemimpin-pemimpin yang mengaku-aku sebagai perwakilan rakyat atau massa bawah. Enam puluh lima tahun yang lalu, lewat bukunya yang fenomenal berjudul Sarinah, Bung Karno telah mewanti-wanti agar politisi jangan sampai menjadi salon politikus. Dan enam puluh tahun kemudian, dikandang banteng sendiri di Jawa Tengah, lewat kasus pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang, Ganjar Pranowo mengkhianati kata-kata Bung Karno. Pengkhianat di kandang banteng itu sendiri! []

Rembang, 28 Juni 2014

(BAGIAN 7)

Tanggung Jawab Kampus dan Ilmu Pengetahuan Atas Persoalan Kemanusiaan*

A. Syatori

(I)

Jum'at, 20 Maret 2015 telah terjadi satu peristiwa yang patut direnungkan: Ibu-ibu Rembang yang menolak rencana eksploitasi semen di wilayah Pegunungan karst Kendeng Utara datang "ngluruk" salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Rencana eksploitasi itu dianggap mengancam keberlangsungan air bagi kehidupan mereka.

Ngluruk ini dipicu oleh kesaksian dua dosen UGM, yakni Eko Haryono dan Heru Hendrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Kamis 19 Maret 2015 mengenai status kawasan karst Rembang (bagian

* Tulisan ini pernah dimuat di website *www.islambergerak.com* pada 22 Maret 2015.

dari karst Kendeng). Kesaksian mereka berdua dianggap tidak sedikitpun berpihak pada kepentingan rakyat yang sedang berjuang mempertahankan sumber mata air dan kelestarian Pegunungan Kendeng Utara dari ancaman pertambangan semen yang akan dilakukan oleh PT. Semen Indonesia. Untuk itu, tulisan ini akan sedikit mempertanyakan dan mempersoalkan "Ilmu Pengetahuan" yang dikembangkan di kampus-kampus Indonesia dan keberpihakannya terhadap persoalan-persoalan kemanusian.

(II)

Ilmu Pengetahuan (IP) merupakan entitas pembeda umat manusia dengan makhluk lain. Ia tidak bersifat *given*, namun lebih merupakan usaha dalam mensinergikan kepekaan batin (*intuition*), ketajaman intelektual, dan kepekaan sosial. Entitas pembeda tadi dimaksudkan sekaligus difungsikan sebagai *tools* dalam realisasi tugas-tugas ke-khalifah-annya. Dengan IP tersebut tidak mustahil manusia mampu menciptakan peradabannya, membawa akibat-akibat, maupun perubahan-perubahan besar terhadap kodratnya, dan, termasuk juga, kemampuannya untuk menemukan kedaulatan, otonomi, kemandirian, atau bahkan menunjukkan predikatnya sebagai makhluk beradab (*civilized*).

Sementara itu, IP muncul–termasuk juga di dalamnya Ilmu Agama–sebagai reaksi dan refleksi kritis manusia terhadap segala persoalan hidup secara keseluruhan. Dengan kata lain, IP merupakan sesuatu yang digali,

dikembangkan–bisa jadi arahnya pada akomodasi kepentingan manusia dalam konteks dinamika sosial–dan bersifat tidak netral (*neutral* alias *value-laden*) maupun bebas nilai (*value free*).

IP modern menunjukkan wajah yang kurang simpatik terhadap kepentingan kemanusiaan, kukuh dengan kerangka rasionalitas, objektivitas, dan berhasrat kuat menjauh dari kepentingan kemanusiaan. IP dianggap sahih jika objektif dan lepas dari kepentingan-kepentingan subyektif, bersikap netral tehadap fakta atau objek, dan merupakan deskripsi murni tentang fakta. Jadi, IP di satu pihak, tak dapat mempengaruhi atau mengubah objeknya. Sementara, di pihak lain, IP merupakan sesuatu yang tak berubah (*constant*), beku, dan mati. Oleh karenanya manusia tidak dapat memengaruhi IP. Dengan kata lain, IP bekerja demi IP itu sendiri, lepas dari konteks mekanika kongkrit manusia sehari-hari yang real, dan membiarkan fakta itu apa adanya tanpa menarik konsekuensi-konsekuensi praktis untuk mengubahnya.

Dengan cara ini, IP menjadi layaknya ideologi yang melestarikan *status quo* dan penipuan ideologis (*ideologically-deceiving*). Hal demikian terjadi karena menutupi kenyataan bahwa IP sesungguhnya hanya salah satu kegiatan manusia kongkrit. Implikasi yang paling memprihatinkan dari watak IP modern tersebut adalah bahwa permasalahan -permasalahan kemanusiaan seperti kemiskinan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan sebagainya merupakan objek kajian yang diikat

secara objektif tanpa 'berniat' untuk diubah dan diselesaikan. Sementara itu, pada gugus lain, IP dan teknologi modern yang sebenarnya dapat membebaskan manusia dari permasalahan hidupnya ternyata menjadi sistem penguasaan yang total, tidak mengabdi pada manusia. Hukum-hukum teknologi seperti ektensifikasi, otomatisasi, standarisasi, dan mekanisasi seharusnya dapat membebaskan manusia dari kerja fisik. Namun, kenyataanya, hukum-hukum tersebut menjadi prinsip-prinsip kaku yang mengatur umat manusia. Teknologi memaksakan tuntutan-tuntutan ekonomis dan politisnya pada manusia.

Foto 4
Aksi Bersama Mengkritisi Para Akademisi UGM



Sumber: dokumentasi warga penolak tambang

Melalui rasionalitas teknologis, penataan masyarakat semakin bersifat rasional, produktif, teknis dan total, tetapi dalam kondisi demikian setiap perubahan kualitatif pada sistem itu harus disingkirkan. Perubahan-perubahan dapat dibiarkan sejauh dapat dicocokkan dengan sistem sebagai keseluruhan. Artinya, IP dapat berguna hanya sejauh dapat diterapkan pada keseluruhan sistem sehingga dapat dioperasikan (*operateable*). Bahwa masyarakat terperangkap di dalam kontrol teknologis tidak selalu berarti bahwa kontrol itu diketahui secara sadar dan jelas. Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat justru menunjukkan dirinya sebagai masyarakat yang bebas dan terbuka. Dalam bidang ekonomi misalnya, kelimpahan kapital telah membuka alternatif seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menikmati apa saja sesuka hatinya. Akan tetapi hal itu hanya superfisial saja. Para konsumen hanya menginginkan apa yang dikehendaki dan ditetapkan sistem.

Sementara itu, di sisi lain, ilmu-ilmu keagamaan juga tetap kukuh dengan kerangka normativitasnya; atur sana atur sini. Ilmu-ilmu keagamaan menggiring manusia (dan pemeluknya) untuk berebut benar atas tafsir keagamaannya, lalu saling menyalahkan dan akhirnya membuat mereka terfragmentasi dan terjebak pada kehidupan sektarian. Agama yang semestinya membawa damai malah menebarkan benih pertentangan, permusuhan dan konflik antar pemeluknya. Fenomena radikalisme agama sudah lebih dari cukup membuktikan

betapa agama begitu menjadi menakutkan dan mengancam ketentraman hidup manusia. Pertanyaannya sekarang, ada apakah dengan ilmu-ilmu keagamaan sehingga membiarkan fenomena itu terjadi? Ataukah justru fenomena itu didukung dan diafirmasi oleh ilmu-ilmu kegamaan itu? Di sisi yang lain, ilmu-ilmu keagamaan seolah tidak peduli dengan perubahan sosial dan permasalahan-permasalahan manusia. Ilmu-ilmu keagamaan hanya menyediakan 'daya atur' untuk kehidupan manusia. Ia tidak menyediakan dan memiliki 'daya analisis' dan 'daya ubah' atas realitas dan permasalahan hidup manusia. Ilmu-ilmu keagamaan sibuk dengan dan untuk dirinya sendiri.

Sampai pada situasi yang paling memprihatinkan, baik IP modern (ilmu alam dan ilmu sosial) maupun ilmu-ilmu keagamaan tampak sibuk dengan dan untuk dirinya sendiri, lepas dari tanggungjawabnya mengabdi pada kepentingan-kepentingan manusia. Ini berarti IP sedang berada pada situasi krisis yang memprihatinkan bagi kehidupan manusia. Maka, sudah selayaknya dan saatnya upaya serius untuk merevitalisasi dan mengembalikan IP pada tanggung jawab kulturalnya untuk mengabdi pada kepentingan-kepentingan manusia. Apapun bentuk dan jenis IP mesti diintegrasikan pada tugas suci memanusiakan manusia. Lalu, bangunan paradigmatik dan filosofis seperti apakah yang mesti dirumuskan untuk mengembalikan tugas suci IP tersebut?

(III)

Sebagai agen yang langsung bersentuhan dengan IP dan masyarakat, Perguruan Tinggi di Indonesia punya tanggung jawab terhadap persoalan masyarakat/kemanusiaan. Menyangkut persoalan tersebut, pertanyaan yang mesti direspon segera adalah bagaimana tanggung jawab Perguruan Tinggi terhadap masalah, misalnya, ancaman kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial –baik berbasis agama, aliran agama, etnis, kelas, jenis kelamin, gender, maupun negara? Di samping itu juga, fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kampus-kampus Indonesia masih belum menyentuh aspek tersebut.

Sementara fungsi pengajaran masih bersifat normatif dan konvensional: terfokus di kelas, hanya *transfer of knowledge*, dan materi pengajaran juga masih bersifat konseptual. Aspek-aspek yang bersifat responsif pada persoalan-persoalan kemanusiaan, lingkungan, dan kemiskinan belum mendapat tempat yang semestinya. Hal ini dapat dilihat pada kurikulum dan pendekatan pengajaran di Perguruan Tinggi Indonesia. Fungsi riset maupun pengabdian juga masih terkonsentrasi pada alasan-alasan pragmatis *cum* untuk kenaikan pangkat. Sampai sekarang belum ada evaluasi dan kesadaran menyeluruh terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang sedang dihadapi bangsa ini. Kasus "*ngluruk*" ibu-ibu pejuang karst Pegunungan Kendeng ke kampus UGM merupakan contoh konkret yang bisa menggambarkan paradoks ini.

Kondisi Perguruan Tinggi Indonesia yang semacam ini, sepi dari keberpihakan persoalan-persoalan sosial/kemanusiaan, terkait dengan banyak hal, yang salah satunya adalah paradigma keilmuan yang fragmentaris pada ranah epistemologi-pragmatis dalam aspek aksiologis. Banyak pihak belum begitu bisa memahami keterkaitan antara ilmu dengan obyek material dan formalnya. Selain itu juga banyak pihak meyakini netralitas ilmu. Akibatnya masalah ketidakadilan sosial tidak menjadi tanggung jawab ilmu dan ilmuwan (dosen), melainkan tanggungjawab aktivis sosial dan politisi. Faktor lain terkait juga dengan pragmatisme pasar, di mana Perguruan Tinggi Indonesia lebih merespon kebutuhan pasar dibanding kepekaan mencari jalan keluar bagi persoalan-persoalan sosial/kemanusiaan. Dalam hal ini, kritikan dalam bentuk plesetan dari UGM (*Universitas Gaweane Mroyek*) patut untuk direnungkan.

Lebih jauh, berdasarkan refleksi di atas diharapkan landasan paradigmatik itu akan menjadi dasar pengembangan Perguruan Tinggi Indonesia ke depan. Pertanyaan mendasar yang harus direnungkan lebih dalam adalah apakah yang harus dikembangkan agar fakultas dan jurusan yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi Indonesia ini tidak hanya akan menjadi alat legitimasi atas proses-proses eksploitatif yang terkandung pada diri ilmu pengetahuan itu? Misalnya, dalam konteks Fakultas Keguruan, kesadaran kognitif seperti apakah yang perlu dikembangkan agar tidak semata-mata menjadi

budak ilmu pengetahuan yang sekedar bertujuan untuk memenuhi tuntutan pasar global? Dalam konteks Fakultas Ekonomi, model kelembagaan keuangan semacam apakah yang perlu dikembangkan agar tidak semata hanya mendukung pada sistem eksploitatif-kapitalistik pasar? Dalam konteks Fakultas Agama dan Humaniora, model penafsiran, filsafat, pemahaman sejarah, dan dakwah seperti apakah yang perlu dikembangkan agar tidak semata-mata melanggengkan pemikiran yang dominatif (*mainstream*) dan destruktif? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan mendasar yang harus dijawab jika suatu Perguruan Tinggi tidak mau "*diluruk*" oleh rakyat yang merasa dirugikan atau bahkan ditindas oleh keilmuan atau ilmuwan yang diproduksi oleh Perguruan Tinggi itu. []

(BAGIAN 8)

Matinya Rasa Empati Sebagai Manusia*

Hendra Try Ardianto

Satpam : *Maaf mas, mau kemana, dari mana, mau apa?*

Saya : *Mau ke tenda pak? Dari UGM. Mau membesuk warga di tenda.*

Satpam : *Wah, orang luar dilarang ke tenda mas.*

Saya : *Alasannya?*

Satpam : *Sebentar saya panggilkan komandan. (Beberapa saat kemudian, salah seorang anggota Brimob datang)*

Brimob : *Mas mau apa ke tenda?*

Saya : *Menjenguk warga di tenda.*

Brimob : *Maksudnya, dari UGM lalu mau ke tenda itu untuk apa?*

Saya : *Saya dari UGM mau ke tenda untuk menjenguk warga. Adapun saya sendiri sedang penelitian untuk kepentingan tesis.*

---

* Tulisan ini diambil dari note facebook penulis.

Brimob : *Begini ya mas, sekarang orang luar dilarang ke tenda. Hal ini dilakukan agar tidak memperkeruh keadaan. Sekarang ini provokasi mudah sekali terjadi.*

Saya : *Saya tidak sedang memprovokasi. Saya sedang penelitian. Ini ada surat penelitian dari kampus. (Saya tunjukan surat penelitian dari UGM)*

Brimob : *Secara prosedur, jika mas punya surat izin dari PT. Semen Indonesia di Rembang, jenengan boleh masuk. Jika tidak punya, maaf Anda tidak bisa kesana.*

Saya : *Meskipun hanya menjenguk beberapa menit saja.*

Brimob : *Iya. Tetap tidak bisa.*

Percakapan ini adalah ilustrasi pengalaman saya ketika akan mengunjungi warga yang tinggal di tenda depan proyek pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia (selanjutnya PT. SI) di Rembang. Saya mungkin hanya satu dari puluhan atau mungkin ratusan orang yang ditolak dan dilarang masuk ke tenda perjuangan warga Rembang yang menolak pertambangan semen. Setelah ada kasus pemukulan polisi terhadap ibu-ibu sekitar November 2014, jalan menuju pabrik di portal besi. Satpam PT. SI dan polisi pun membangun tenda dan berjaga untuk mengisolasi warga dari pengunjung luar.

Dulu, sebelum portal itu ada, saya atau siapapun bebas masuk. Saya bahkan pernah menginap di tenda itu selama beberapa malam. Tinggal di tenda ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Pengalaman

berpramuka saat sekolah yang begitu menggembirakan, ternyata tidak berlaku di sini. Di malam hari, udara malam begitu menusuk tulang. Maklum, tenda ini bukan tenda ala pramuka yang tertutup rapat sebagaimana diajarkan para pembina pramuka dulu. Tenda ini hanya sebatas terpal yang dipancang dengan beberapa bambu. Udara dingin dan angin malam serasa makin menyiksa, meskipun tanah beralaskan tikar terasa agak hangat. Di siang hari tidak kalah menyesakkan bagi saya. Panas terik matahari begitu menyengat persis di ubun-ubun kepala, sementara gulungan debu tebal bertebaran akibat keluar masuknya truk-truk proyek. *Ya*, saya akui saya kurang tahan dengan kondisi kala itu. Padahal, saya sendiri belum merasakan bagaimana suasana saat hujan lebat, tentu lebih memilukan.

Foto 5
Pemukulan Polisi pada Ibu-Ibu
Menjadi Awal Isolasi Tenda



Sumber: Diambil dari video dokumentasi warga penolak PT. SI

Satu-satunya kekuatan yang membuat saya bertahan adalah rasa empati pada ibu-ibu yang menolak pendirian pabrik semen itu. Saya tidak melihat satu pun kesusahan di raut muka ibu-ibu di sana. Malah saya menemukan mereka bergembira, bahkan menunjukkan semangat yang menggebu. Kadang mereka saling bergosip dari hal remeh temeh; seputar hasil panen, masakan, ternak, hingga *rerasan* tentang konflik keras yang mereka hadapi; tentang polisi, tentang satpam-satpam semen, tentang ustad-ustad bayaran, sampai cerita tetangga mereka yang baru saja mendapat uang dari PT.SI. Saya yakin mereka tetap merasakan hawa dingin dan panasnya terik matahari sebagaimana saya rasakan. Kecerian dan semangat yang terpancar dari aktivitas di tenda itulah yang membuat saya semakin tegar dan bisa bertahan tinggal di tenda.

Beberapa hari di tenda ternyata membentuk ikatan batin saya dengan ibu-ibu di tenda. Kadang saya teringat akan ibu saya di rumah yang sudah mulai menua dan kadang pula sakit. Rasa sayang pada ibu saya inilah yang menggerakkan diri saya untuk selalu berempati dengan ibu-ibu di tenda. Apalagi mereka sedang memperjuangkan tanah dan lingkungannya dari para pemodal perusak lingkungan. Sejak kecil, saya diajar berbagai hal oleh ibu saya. Dan, ajaran-ajaran itu adalah ilmu yang mengarah saya sebagai manusia. Saya kira semua ibu di dunia ini umumnya demikian.

Kegeraman yang teramat sangat kini mengeram di dada dan kepala saya melihat sekarang ibu-ibu di tenda

diisolasi. Seolah-olah mereka adalah *pesakitan* berbahaya yang tidak patut dijenguk atau dibesuk. Jika Anda memiliki teman sakit, pasti kita tergerak untuk menjenguknya. Bahkan, jika kondisi parah sekalipun, tak jarang rumah sakit masih mengijinkan orang menjenguk rekannya yang menderita sakit, meski hanya sebentar. Begitupun ketika ada teman di penjara. Meskipun pengadilan memutuskan bersalah, Anda sebagai teman pasti tetap menjenguknya. Karena begitulah sepatutnya manusia; berempati terhadap sesama.

Apa yang salah dengan ibu-ibu ini sehingga mereka diperlakukan bak pesakitan? Bukankah mereka orang-orang baik. Ibu-ibu desa mungkin memang berpendidikan terbatas, tapi mereka memiliki pengetahuan yang lebih arif dibanding orang-orang dari universitas. Mereka memiliki banyak sekali pengetahuan untuk mengelola alam, dan mereka telah menjalankannya. Sebaliknya, mereka dari universitas memperlakukan ilmunya seolah alam sebuah mesin yang bisa diutak-atik. Jika alam rusak, orang universitas melihat sebagai kesalahan dalam '*maintenance*' alam, bukan karena praktik pemerkosaan alam akibat ilmunya sendiri. *Ya*, meskipun tidak semua orang dari kampus seperti itu, saya sepakat. *Nah*, jika ibu-ibu yang baik begitu adanya, mengapa praktik isolasi ini masih terjadi, padahal kita semua sama sebagai manusia.

Foto 6
Keadaan Tenda Perjuangan Ibu-Ibu
yang Menolak Tambang Semen



Sumber: foto adalah dokumentasi warga penolak PT. SI

Karena itu, jika Anda sudah melarang dan menghalagi orang saling menjenguk dan membesuk, maka saat itu juga empati Anda sebagai manusia telah mati. Anda tidak bisa lagi mengidentifikasi diri sebagai manusia, karena Anda telah kehilangan sisi kemanusiaan. Mungkin Anda tidak percaya dengan "surga di telapak kaki ibu", *iya silahkan*. Tapi, jika Anda tidak percaya manusia harus saling berempati, maka tanggalkanlah status diri Anda itu sebagai manusia. Demikianlah pikiran-pikiran yang mengelayuti otak saya saat ini.

Kalau dengan mengisolasi ibu-ibu di tenda, para ibu-ibu akan kehilangan kekuatan dan pijakan, Anda salah besar. Saya dan ratusan bahkan ribuan orang tetap akan berempati pada mereka. Saya sendiri sebagai

peneliti sosial di sana, hingga sekarang masih belum bisa menemukan kekuatan apa yang membuat orang bertahan hingga ratusan hari di tenda yang begitu memilukan itu. Kekuatan itu memang belum saya temukan, tapi saya sudah bisa merasakan.

Saya teringat pesan kyai saya. Yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain bukan karena derajatnya, namun karena manusia itu berlaku sebagai manusia. Makanya, jika ada binatang yang memiliki kisah sebagaimana sifat-sifat yang mirip manusia, sering orang mengindentifikasi itu sebagai binatang yang manusiawi. Saya bukan mengatakan kalian yang mengisolasi ibu-ibu itu tidak manusiawi, *lho*. Cuma, saya hanya mengingatkan Anda sekalian manusia berlakulah selayaknya manusia. Saya anggap kalian saat ini khilaf, dan itu manusiawi juga. Tapi saatnya untuk bertobat. Itu poin saya.

Ingat, doa orang-orang yang tertindas itu mujarab. Semoga Anda tidak didoakan yang buruk-buruk oleh mereka yang kalian tindas. Hanya itu doa saya untuk kalian yang menindas. Amin! []

Yogyakarta, 10 Februari 2015

(BAGIAN 9)

Instrumen Kekuasaan dalam Kasus Rembang*

Bosman Batubara

Dua minggu dari sekarang (2 April 2015), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang akan memutuskan gugatan 6 orang warga (Joko Prianto, Sukimin, Suyasir, Rutono, Sujono, dan Sulijan) bersama dengan Yayasan *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia* (Walhi) terhadap Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang telah mengeluarkan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jateng.

Pengadilan, kata filsuf Michel Foucault (1980), bukan lagi merupakan ekspresi asali keadilan popular, namun dalam kesejarahannya terlihat bahwa ia sudah berubah untuk menjerat, mengontrol, dan mencekik keadilan dengan cara menyematkannya ke dalam institusi

* Tulisan ini pernah dimuat di *www.literasi.co* pada 3 April 2015.

aparatus negara. Aparatus negara di sini, dalam kacamata Foucault (1980a), dilihat sebagai tiga bundel pemaknaan. *Pertama*, ia adalah rangkaian berbagai hal yang terdiri dari wacana, institusi, arsitektonik, aturan hukum, tindakan administratif, pernyataan keilmuan, filsafat, moral, dan dalil filantropis. *Kedua*, ia dalam dirinya memiliki sifat kesalinghubungan. Dan *ketiga*, konfigurasi ini memiliki fungsi dan momen kesejarahan tertentu sebagai tanggapan terhadap kebutuhan yang timbul.

Kasus yang disampaikan Foucault secara telanjang memperlihatkan kepada kita bagaimana aparatus bekerja. Namun, kita beruntung karena pada saat yang sama kita justru diselamatkan dari arogansi kekuasaan, yakni dalam kasus Rembang karena ia ditantang oleh gerakan progresif yang dipelopori oleh aksi pendudukan tapak pabrik oleh kelompok Ibu-ibu Rembang yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Di satu sisi, kita bisa melihat bagaimana kekuasaan yang hadir dalam keinginan untuk menambang batu kapur di Rembang dari pihak PT Semen Indonesia (SI), dan dengan demikian ini bisa dilihat sebagai satu gerakan yang akan mencerabut akses dan kontrol sumberdaya berupa tanah, air, atau secara umum ruang hidup, dari warga lokal, untuk dipindah pengelolaannya kepada PT SI. Ini adalah proses rekonfigurasi ruang di Pegunungan Kendeng Utara (PKU) yang akan menghubungkan komoditas batu kapur dan tanah liat yang selanjutnya diolah menjadi semen ke pasar global, karena PT SI adalah

perusahaan yang sudah berekspansi sampai di luar teritori Indonesia.

Di sisi lain, muncul gerakan perlawanan (*countermovement*) yang dipelopori oleh Ibu-ibu petani Rembang dan kemudian mendapatkan dukungan aliansi dari berbagai kelompok masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, kaum terpelajar, pembuat film, dan tokoh masyarakat. Dukungan yang semakin meluas ini dapat kita lihat dari munculnya berbagai aksi pemutaran film dokumenter "SAMIN vs SEMEN" di berbagai kota misalnya Semarang, Yogyakarta, Solo, Makassar, Jakarta, Cirebon, dan Malang serta aksi-aksi solidaritas yang juga muncul di berbagai kota seperti misalnya di Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Rembang, Samarinda, dan Makassar.

Tulisan ini akan melihat bagaimana alat-alat kekuasaan ini bermain dan diorkestrasi guna memuluskan kehendak kapital yang akan menambang batu kapur di PKU melalui instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal); pengetahuan berupa klasifikasi ekosistem karst; tentara, polisi, dan preman; para pakar; pengacara ternama; tokoh masyarakat; serta pengadilan. Preman, pengacara ternama, dan beberapa tokoh masyarakat tidak secara langsung merupakan aparatus negara. Namun, dalam kasus ini mereka memilih untuk beraliansi dan menjadi bagian dari konjungtur—paket relasi kekuasaan pada tempat dan waktu tertentu—aparatus negara yang berkuasa.

Instrumen kekuasaan pertama adalah Amdal. Sudah lama diketahui bahwa Amdal adalah sebuah stempel yang dipakai perusahaan untuk merusak lingkungan. Dengan dilegitimasi oleh berbagai kelompok seperti dosen, Amdal hadir untuk menjadi dokumen kunci bahwa proses perusakan ruang hidup secara "analisis mengenai dampak lingkungan" sudah sah dilakukan. Sudut pandang seperti ini misalnya muncul dari analisis Ibu Sukinah (salah seorang Ibu dari Rembang) yang saya dengar sendiri pada sekitar pertengahan tahun lalu dalam sebuah kesempatan diskusi di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Analisis yang sama muncul dari petani di Papua yang juga terancam rusak ruang hidupnya melalui stempel Amdal (Savitri 2013). Ini bukan cuma kasus Indonesia.

Di Turki hal yang sama terjadi dalam kasus pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air yang dibutuhkan oleh sektor industri swasta. Meskipun berbagai kasus sudah memperlihatkan bahwa bendungan-bendungan telah menghancurkan ruang hidup, memicu konflik sosial karena aliran sungai dipotong tanpa cukup air mengalir ke hilir bendungan, memutus ekosistem aquatik hulu dan hilir, memotong jalur migrasi ikan, menghilangkan momen banjir periodik yang membawa sedimen yang subur untuk tanah-tanah pertanian di dataran banjir, menenggelamkan desa-desa seperti dalam kasus Bendungan Kedung Ombo (juga di Jateng); namun, pembangunan bendungan di Turki tetap dilanjutkan: dengan stempel Amdal (Islar 2012).

Dalam kasus Rembang, tangan-tangan kekuasaan itu lebih koersif. Salah seorang komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M Nur Khoiron, menyatakan terdapat pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan Amdal pabrik semen di Rembang. Menurut Khoiron, pelanggaran terletak pada tiga titik. Pertama, tidak dilibatkannya seluruh masyarakat dalam pembuatan Amdal, dan ini berarti hak masyarakat mendapatkan informasi tentang kelayakan lingkungan pabrik sudah diabaikan. Pada kenyataannya, tim pembuat Amdal hanya berkonsultasi dengan kepala desa dan keluarganya, alias pembuatan Amdal cuma disosialisasikan di tingkat elit desa. Kedua, hal di atas menyebabkan secara prosedur legalistik Amdal terpenuhi persyaratannya, namun secara substansial hal seperti transparansi informasi terhadap publik justru terabaikan. Dan ketiga, ada konflik kepentingan dalam tim penyusun Amdal PT SI di Rembang. Berdasarkan UU 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya pembuat Amdal adalah tim independen, namun dalam kasus Rembang yang memilih tim independen malah menjadi pendukung perusahaan (Kompas.com 2014).

Kenyataan ini menjadi semakin hambar ketika terantuk dengan laman Provinsi Jateng yang berkampanye akan "Ciptakan Jateng Provinsi Ramah HAM" (jatengprov.go.id, 2014), dimana dipampang foto Pak Gub, Ganjar Pranowo, sedang berada di podium memberikan sambutan.

Sebuah potongan pernyataan dari Eko Haryono, staf pengajar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dalam salah satu dokumen Amdal PT SI tertulis sebagai "Ahli karst dan speleologi" dalam posisinya sebagai "narasumber" tim pelaksana studi Amdal PT SI, juga menjadi saksi ahli pihak PT SI di PTUN Semarang yang berujung pada digrudugnya kampus UGM oleh massa #Rembang Melawan, beredar di media sosial dan menjadi bahan tertawaan.

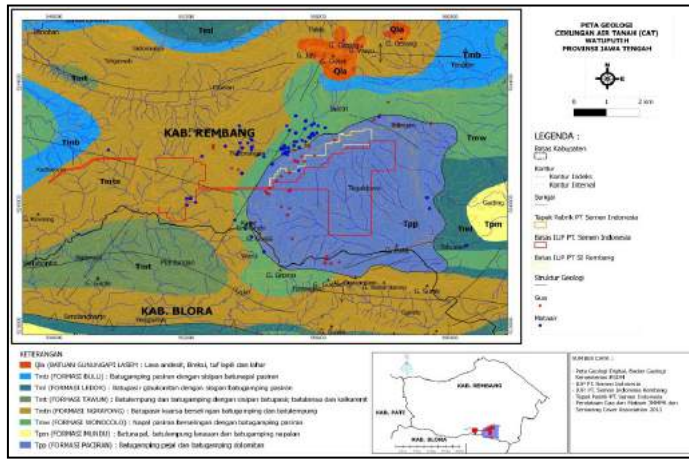
> "Karena di AMDAL kedudukan saya hanya sebagai Nara Sumber, BUKAN Penyusun Amdal, maka saya juga tidak tahu isinya AMDAL termasuk adanya pengurangan jumlah gua dan mataair. Biasanya narasumber AMDAL tugasnya hanya sebagai moderator antara pihak penyusun dan pihak-pihak lain. Kalau diperkenankan sy [sic] diberi datanya Mbak Ming Ming saya sangat berterima kasih untuk mengcross-check an data di dokumen AMDAL, karena narasumber juga punya hak untuk mengoreksi penyusunan dan sampai detik inipun saya belum pernah baca dokumen AMDAL nya," demikian Eko Haryono.

Tampaknya pengakuan Eko Haryono itu adalah bagian percakapan sosial dengan Ming Ming Lukiarti, salah seorang aktivis #RembangMelawan. Percakapan itu berlangsung sekitar medio 2014. Sebagai catatan, Izin Lingkungan untuk PT SI dimana Eko Haryono menjadi narasumber Amdal dikeluarkan pada 7 Juni 2012.

Dari sinilah kita bisa menyaksikan dengan mata dan telinga terbuka betapa banalnya kekuasaan. Pada saat seorang terpelajar bertitel Doktor seperti Eko Haryono, pakar karst dan speleologi, narasumber Amdal, saksi ahli PT SI di PTUN Semarang "belum pernah baca dokumen AMDAL" bahkan sekira dua tahun setelah ia menjadi narasumber di Amdal itu, justru pemimpin politik seperti Gubernur Ganjar Pranowo kita mempertanyakan dan meminta warga membaca Amdal (Apriando 2014)!

Dalam tulisan ini, perlu kiranya ditampilkan sebuah pertanyaan lain yang tidak disinggung oleh kedua saksi ahli PT SI, dan ini bisa dilakukan dengan menampilkan peta geologi wilayah PKU, seperti pada Gambar 6 berikut.

Gambar 6
Peta Geologi Cekungan Air Tanah (CAT)
Watuputih Provinsi Jateng



Sumber:http://tataruangpertanahan.com/kliping-1490-pemetaan-cat-watuputih-perlu-detail.html.

Dalam diskusi di media sosial dengan beberapa kolega geolog di Facebook (terima kasih untuk peran kunci mereka semua yang telah baku-komen dalam diskusi itu: Rovicky Dwi Purohari [ketua umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia/IAGI 2012-4], Minarwan Yap [geolog senior yang sudah malang melintang dalam dunia *kang-ouw* pergeologian dunia], Thomas Triadi Putranto [Dosen Jurusan Teknik Geologi Universitas Diponegoro], Agung Harijoko [Dosen Jurusan Teknik Geologi UGM], Daru Prihatmoko [ketua umum IAGI 2014-6], Amien Widodo [Dosen Jurusan Teknik Sipil ITS], dan Djoko Wintolo [Dosen Jurusan Teknik Geologi UGM], karena banyak ide dalam tulisan ini yang terinspirasi dari diskusi itulah); muncul satu pertanyaan yang bagi saya sangat penting dan bergizi dari sudut pandang geologi.

Pertanyaan tersebut saya narasikan ulang kira-kira sebagai berikut. Kalau kita lihat dari peta geologi di atas, maka justru mata air (titik biru) dan gua (titik merah) terletak banyak pada sebelah barat-laut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SI (kotak merah). Lantas apakah ada hubungan, atau apakah sudah dibuktikan tidak ada hubungannya, antara satuan geologi Tpp (Formasi Paciran, terdiri dari batugamping pejal dan batugamping dolomitan, sesuai legenda peta di atas) dengan gua dan mata air yang banyak muncul di sebelah barat laut IUP PT SI?

Sependek yang dapat saya ikuti dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) hal ini tidak dibahas. Dalam pembahasan soal kuantitas air, terbaca sebagai berikut:

> "Kegiatan PT Semen Gresik terhadap kondisi hidrologi dan hidrogeologi diperkirakan terutama akan berdampak pada mata air yang berada di tenggara areal IUP PT Semen Gresik. Dampak ini dapat diperkiran dengan keberadaan jaringan lembah permukaan di areal IUP yang bermuara ke arah tenggara. Dalam hal ini areal IUP Semen Gresik merupakan sebagian dari daerah tangkapan dari mata air yang muncul di sebelah Tenggara IUP. Mataair utama yang muncul di sebelah Tenggara adalah Mataair Brubulan dan Mataair Sumber Semen." [PT Semen Gresik (Persero) Tbk. 2012, Bab V hlm. 48].

Dari kutipan di atas terlihat si penyusun Andal berpendapat bahwa "Kegiatan PT Semen Gresik terhadap kondisi hidrologi dan hidrogeologi diperkirakan terutama akan berdampak pada mata air yang berada di tenggara areal IUP PT Semen Gresik" karena "keberadaan jaringan lembah permukaan di areal IUP yang bermuara ke arah tenggara". Namun, penting diperhatikan di sini, bahwa "keberadaan jaringan lembah permukaan di areal IUP yang bermuara ke arah tenggara" tidak serta merta berarti tidak ada hubungan antara 'gua dan mata air yang muncul di sebelah barat-laut IUP PT SI' dengan 'satuan geologi Tpp seperti dalam peta'. "Keberadaan jaringan lembah permukaan di aeral IUP yang bermuara ke arah tenggara," adalah bentuk permukaan. Sementara 'gua dan

mata air yang banyak muncul dalam peta pada sebelah barat-laut IUP PT SI' adalah ekspresi sistem air tanah yang muncul di permukaan. Di titik inilah pertanyaan "apakah ada hubungan, atau apakah sudah dibuktikan tidak ada hubungannya, antara satuan geologi Tpp dengan gua dan mata air yang banyak muncul di sebelah barat laut IUP PT SI" menjadi sangat penting untuk dijawab.

Dan sebenarnya, dokumen Andal yang sama sudah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa perbukitan batugamping di daerah ini sangat penting bagi mata air-mata air di sana, "Berdasarkan hasil analisis, perbukitan gamping di daerah penelitian merupakan akuifer penting bagi mata air-mata air di sekitarnya" [PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. 2012, Bab III hlm. 75]. Jadi, meskipun dokumen Andal sudah menyatakan bahwa "Berdasarkan hasil analisis, perbukitan gamping di daerah penelitian merupakan akuifer penting bagi mata air-mata air di sekitarnya," Izin Lingkungan tetap saja dikeluarkan pada 2012 yang lalu. Ini contoh gamblang lain yang menunjukkan betapa koersifnya kekuasaan.

Instrumen kedua yang tak kalah koersif yang dipakai adalah polisi, tentara, dan preman. Dalam film dokumenter SAMIN vs SEMEN (Indonesia Biru 2015) kita bisa melihat bagaimana Ibu-ibu yang mencegah alat berat masuk ke lokasi direnjang, ditarik, didorong, dan dipiting oleh aparat bersenjata. *"No more comment,"* komentar seorang kawan di Facebook ketika melihat foto-foto kekerasan

yang dilakukan aparat terhadap Ibu-ibu Rembang beredar di dunia maya.

Instrumen ketiga adalah pengetahuan melalui klasifikasi atau kategorisasi karst. Salah satu substansi keterangan dua saksi ahli PT SI di PTUN Semarang, Heru Hendrayana dan Eko Haryono, adalah bahwa proses karstifikasi di Rembang masih bersifat awal atau muda, jadi rongga-rongga bawah permukaannya belum berkembang. Karena dia karst yang masih muda, maka dia bukan kawasan yang dilindungi (BUMNnews 2015). Dan tentu saja tak lupa ditambahkan dengan mantra bahwa penjelasan itu bisa "dipertanggungjawabkan secara ilmiah."

Di sini kita melihat bagaimana pengetahuan tentang "klasifikasi karst" digunakan sebagai legitimasi dilindungi atau tidaknya sebuah kawasan. Jadi, pertimbangan dan sisi ilmiahnya adalah tingkat karstifikasi, bukan misalnya keberatan gerakan #RembangMelawan soal rencana penambangan di PKU. Padahal, lewat beragam analisa yang tak kalah ilmiahnya meski basis pengerjaannya sukarela, apa yang dihadirkan oleh gerakan #RembangMelawan bukan cuma bisa "dipertanggungjawabkan secara ilmiah," namun menubuh: memiliki darah, tulang, daging, ruh, dan hati!

Instrumen kekuasaan keempat dalam kasus ini adalah apa yang disebut sebagai "pakar". Di media, Heru Hendrayana ditampilkan sebagai pakar hidrologi, sementara Eko Haryono sebagai pakar karst. Kepakaran kedua

orang inilah yang dipakai PT SI untuk melegitimasi aktivitasnya di PKU.

Keberadaan Eko Haryono sebagai saksi ahli di PTUN Semarang beberapa waktu lalu sekaligus memperpanjang apa yang sudah disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Nur Khoiron seperti yang sudah disampaikan di atas. Orang yang sama dipakai dua kali: satu kali terlibat sebagai narasumber Amdal, yang kedua sebagai saksi ahli pihak PT SI di PTUN Semarang. Semoga saja Eko Haryono sudah membaca dokumen Amdal PT SI ketika ia bersaksi pada Maret 2015 di PTUN Semarang. Keterlibatan berkali-kali ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disampaikan filsuf Michel Foucault bahwa aparatus dalam dirinya memiliki sifat kesalinghubungan itu memang benar adanya.

Instrumen kelima adalah pengacara ternama. Ini menjelma dalam diri kuasa hukum PT SI, Adnan Buyung Nasution. Buyung Nasution adalah seorang pengacara senior Indonesia, terkenal, berpengaruh, pendiri salah satu organisasi hukum garda depan di Indonesia: Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Ia pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, pernah menjadi anggota DPRS/MPRS, setidaknya itu menurut Wikipedia. Fakta bahwa namanya ada sebagai entri di Wikipedia, sudah menunjukkan kapasitas Buyung Nasution. Dalam salah satu pertemuan dengan Gubernur Ganjar Pranowo, Buyung Nasution meminta dukungan Gubernur sebagai penguasa politik tertinggi di Jawa Tengah agar pembangunan dan

pengoperasian pabrik semen di Rembang sesuai jadwal yang direncanakan (Tribunnews 2014).

Instrumen keenam adalah tokoh masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap berdirinya tambang dan pabrik semen di Rembang, namun keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat seperti Habib Lutfi bin Yahya dan pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Karangmangu Sarang Rembang, Kyai Haji Maimun Zubair (Mbah Maimun), petugas pelaksana Bupati Rembang Abdul Hafidz, dan para pejabat Rembang dikerangkai sebagai dukungan terhadap berdirinya pabrik semen di Rembang.

'Mbah Maimun memimpin doa untuk kemaslahatan pabrik Semen Indonesia di Rembang. "Jadikan pabrik Semen Indonesia pabrik yang dapat mengayomi bangsa, pabrik yang dapat memberkahi bangsa, pabik [sic] yang dapat menjunjung harkat dan martabat bangsa, jadikan negara ini gemah ripah loh jinawi ya Allah. .,"' (Semenindonesia.com 2015).

Terlihat bahwa doa Mbah Maimun yang dikutip adalah "Jadikan pabrik Semen Indonesia pabrik yang dapat mengayomi bangsa, pabrik yang dapat memberkahi bangsa, pabik [sic] yang dapat menjunjung harkat dan martabat bangsa, jadikan negara ini gemah ripah loh jinawi ya Allah. .," Namun, pada bagian sebelum pengutipan, terlihat kutipan itu "dibingkai" terlebih dulu sebagai "doa untuk kemaslahatan pabrik Semen Indonesia di Rembang".

Instrumen ketujuh yang dipakai oleh PT SI adalah pengadilan itu sendiri. Adalah Gubernur pula yang mendorong penyelesaian kasus ini di PTUN. "Silakan bagi yang keberatan ya gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika memang tidak setuju," katanya (Kompas.com 2014a). Seiring berjalannya waktu, Gubernur kita ini tak lupa menyatakan bahwa ia adalah orang yang menghormati hukum, "saya adalah Gubernur Jateng yang harus taat pada konstitusi," ujarnya pada publik(Tribunnews 2014).

Meskipun ia berkilah bahwa dirinya adalah gubernur yang taat pada konstitusi, pernyataan Ganjar Pranowo selaku gubernur Jawa Tengah ini menjadi hambar. Karena, kalau ia memang "Gubernur Jateng yang harus taat pada konstitusi," maka ia wajib mencabut Izin Lingkungan PT SI demi penegakan hukum. Mengacu pada Peraturan Pemerintah 27/2012 tentang Izin Lingkungan, seharusnya Izin Lingkungan PT SI dikembalikan kepada pemrakarsa karena ia bertentangan dengan Perda Jateng 6/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Rembang 14/2011 juga tentang RTRW (Batubara 2014).

Saya berharap kali ini Michel Foucault salah. Meskipun sudah terbukti ia benar pada titik bagaimana kekuasaan menggerakkan aparatus seperti yang sudah diuraikan di atas, keputusan belum diambil di PTUN Semarang. Semoga keputusan yang muncul nanti merupakan ekspresi asali rasa keadilan orang banyak, bukan malah "menjerat, mengontrol, dan mencekik keadilan" seperti yang dikutip dari Foucault di atas. Ini memang bukan

perkara mudah. Semua elemen yang terlibat dalam aliansi #RembangMelawan harus memperjuangkannya. []

Literatur:

Apriando, T. (2014). "FOKUS LIPUTAN: Risiko Bencana PT Semen Indonesia Mengancam Warga dan Alam di Rembang (Bagian 2 Dari 2 Tulisan)". 26 Agustus. Diakses di: http://www.mongabay.co.id/2014/08/26/fokus-liputan-risiko-bencana-pt-semen-indonesia-mengancam-warga-dan-alam-di-rembang-bagian-2-dari-2-tulisan/ [pada 2 April 2015].

Batubara, B. 2014. "Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang Harus Dibatalkan Demi Hukum". 7 Desember. Diakses di: http://www.daulathijau.org/?p=414; pada 2 April 2015.

BUMNnews. 2015. "Semen Indonesia Ajukan Saksi Ahli Jawab Persoalan Lingkungan". 23 Maret. Diakses di: http://www.bumnnews.co/index.php/component/k2/item/409-semen-indonesia-ajukan-saksi-ahli-jawab-persoalan-lingkungan [pada: 2 April 2015].

Foucault, M. 1980. "On Popular Justice: A Discussion with Maoists". Dalam Gordon, C. (ed.). *Power/Knowledge Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books. hlm. 1-36.

Foucault, M. 1980a. "The Confession of the Flesh". Dalam Gordon, C. (ed.). *Power/Knowledge Selected Interviews*

and Other Writings 1972-1977. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books. hlm. 195-228.

Indonesia Biru. 2015. SAMIN vs SEMEN (film dokumenter). Diunduh di: https://www.youtube.com/watch?v=1fJuJ28WZ_Q [pada: 2 April 2015].

Islar, M. 2012. "Privatised Hydropower Development in Turkey: A case of water grabbing?" Water Alternatives. 5(2): 376-391.

Jatengprov.go.id. 2014. "Ciptakan Jateng Provinsi Ramah HAM". 14 Desember. Diakses di: http://www.jatengprov.go.id/id/berita-utama/ciptakan-jateng-provinsi-ramah-ham [pada: 2 April 2015].

Kompas.com. 2014. "Komnas HAM: Pembuatan Amdal Pabrik Semen di Rembang Langgar HAM". 2 Desember. Dapat diakses di: http://regional.kompas.com/read/2014/12/02/20330301/Komnas.HAM.Pembuatan.Amdal.Pabrik.Semen.di.Rembang.Langgar.HAM [diakses pada 2 April 2015].

Kompas.com. 2014a. "Didesak Cabut Izin Amdal Pabrik Semen, Ini Jawaban Ganjar Pranowo". 20 Juni. Diakses di: http://regional.kompas.com/read/2014/06/20/0515237/Didesak.Cabut.Izin.Amdal.Pabrik.Semen.Ini.Jawaban.Ganjar.Pranowo [pada: 2 April 2015].

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. 2012. "Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)".

Savitri, L.A. 2013. *Korporasi & Politik Perampasan Tanah*. Yogyakarta: Insist Press.

Semenindonesia.com. 2015. "Mbah Maimun Doakan SMI untuk Bangsa". 12 Februari. Diakses di: http://www.semenindonesia.com/page/read/mbah-maimun-doakan-smi-untuk-bangsa-2735 [pada 2 April 2015].

Tribunnews. 2014. "Adnan Buyung Minta Dukungan Ganjar Terkait Pabrik PT SI". 20 November. Diakses di: http://www.tribunnews.com/regional/2014/11/20/adnan-buyung-minta-dukungan-ganjar-terkait-pabrik-pt-si [pada: 2 April 2015].

(BAGIAN 10)

Mengapa Saya Tidak Percaya Argumen Semen dan Bersikap Menolak Semen di Rembang?

Hendra Try Ardianto

Sebenarnya saya memiliki beberapa pertimbangan untuk tak melahirkan tulisan ini. Namun, karena banyak sekali orang merasa atau bahkan menghakimi bahwa apa yang saya lakukan dianggap tidak punya dasar pijakan, maka saya akhirnya memutuskan untuk menjelaskan apa yang saya yakini dan perbuat selama ini dalam sebuah tulisan yang lebih sistematis. Latar belakang mengapa tulisan ini lahir adalah ketika setiap ajakan pada orang-orang yang saya kenal agar bersimpati terhadap kasus Rembang, saya selalu dihadapkan pada kenyataan, "Ya, nanti kami akan kaji dulu, Bung?"

Jawaban atau tanggapan mereka membuat saya lama-lama merasa heran (juga kesal): benarkah mereka semua serius mau melakukan kajian? Atau jawaban mereka sebenarnya wujud penolakan halus karena ajakan saya

hanya berdasarkan empati terhadap ibu-ibu yang tinggal di tenda terpal selama 9 bulan lebih, dan di musim hujan yang begini lebat. Kemungkinan lainnya adalah pertimbangan bahwa mereka kaum terdidik yang harus melihat persoalan secara akademis melalui kajian-kajian terlebih dahulu. Kalau benar demikian, alasan empati pada ibu-ibu yang berpanas-panasan dan berhujan-hujanan masih belum bisa menggugah kesadaran mereka mengingat empati bukanlah persoalan akademis yang membutuhkan kajian mendalam lebih dulu.

Tapi kecurigaan saya mengapa mereka tidak mau terlibat pada persoalan di Rembang tampaknya bukan lantaran mereka tidak tergugah, namun karena banyak sekali informasi simpang-siur yang muncul tentang persoalan di sana. Kesimpang-siuran itu terjadi karena pihak korporasi dan negara memainkan banyak *framing*, baik yang disebar di media sosial (facebook, twitter), maupun dilakukan lewat kerja-kerja jurnalistik profesional dari media massa (koran/majalah). Oleh karena itulah, saya mencoba menjelaskan sedikit kesimpangsiuran itu dengan pengetahuan yang saya miliki dan percayai.

Saya akan merangkai ide tulisan ini dengan pertanyaan: "Mengapa saya tidak percaya argumen semen?" Semen yang saya maksud adalah perusahaan semen yang akan menghajar Pegunungan Kendeng Utara menjadi komoditas melalui eksploitasi pertambangan. Saya sering membaca argumen-argumen mengapa pertambangan semen di Kawasan Pegunungan Kendeng boleh

dilakukan. Melalui tulisan ini saya akan membantah argumen-argumen yang dibangun di atas proposisi bahwa pertambangan semen boleh dilakukan di Kawasan Pegunungan Kendeng Utara.

Benarkah tujuan pertambangan semen ini untuk kesejahteraan rakyat?

Ada beberapa argumen yang digunakan pihak semen untuk mengatakan bahwa pertambangan di Pegunungan Kendeng itu untuk kesejahteraan warga di sana, diantaranya: (1) meningkatkan PAD, (2) membuka lapangan pekerjaan, dan (3) memberikan dampak (positif) ekonomi bagi warga sekitar. Tiga argumen ini yang biasa dipakai oleh PT. Semen Indonesia, Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo), Bupati Rembang (Abdul Hafidz), Camat Gunem (Teguh Gunawarman) hingga Kepala Desa Tegaldowo (Suntono) sampai orang-orang yang pro-pertambangan.

Saya akan mengurai kekeliruan satu-per-satu argumen tersebut. *Pertama*, PAD jelas tidak bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan warga. Bagaimana mungkin PAD bisa mengukurnya, jika PDB per kapita (Produk Domestik Bruto) saja tidak bisa dipakai untuk mengukur kesejahteraan. Saya akan sederhanakan uraian ini. Jika sebuah daerah PDB per kapita meningkat, maka bukan berarti terjadi peningkatan kesejahteraan. Mengapa? Karena PDB dihitung dari kemampuan produksi sebuah daerah yang terserap pasar secara keseluruhan, dibagi dengan total penduduk. Akibatnya, dalam PDB per

kapita ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin disamaratakan begitu saja. Konsekuensi logis dari alur yang saya bangun di atas adalah: bisa jadi PDB per kapita itu dihasilkan oleh kondisi dimana yang kaya semakin gila kayanya, dan yang miskin tetap saja miskin. Agar tidak panjang lebar menjelaskan persoalan ini, saya sarankan untuk membaca buku *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto bukan tolok ukur yang tepat untuk menilai kesejahteraan?* yang dibahas oleh Joseph. E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi[1].

Kedua, pembangunan pabrik semen dinilai akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Mari kita urai satu-persatu argumen ini. Berapakah pekerjaan yang dibuka? Saya tentu tidak akan mengikuti paparan wartawan yang tidak mau memverifikasi data dengan mengatakan ada 3.500 pekerja yang dibutuhkan.[2] Saya mencari langsung dalam dokumen AMDAL PT. SI, dan di sana saya temukan kebutuhan tenaga kerja ada 1.751 pekerja, dengan spesifikasi 1200 pekerja untuk pra-kontruksi dan kontruksi, 356 pekerja saat operasi pabrik, 178 pekerja untuk penambangan, 14 operator peledakan. Jika Anda membuka dokumen AMDAL, maka akan terlihat bahwa pekerjaan yang dibutuhkan ternyata jenis pekerjaan yang membutuhkan *skill* khusus. Hal ini tidak aneh, karena pertambangan memang usaha padat modal, bukan padat karya. Jadi, jika mau membuka lapangan pekerjaan yang luas, maka usaha padat modal merupakan jawaban yang keliru.

Logika membuka lapangan pekerjaan semakin tidak masuk akal dengan adanya kenyataan profil sosiologis yang ada di kawasan tersebut. Satu contoh, di Desa Tegaldowo, jumlah penduduk pada 2012 ada 4.990 orang, dan dari semua penduduk itu yang berkerja di sektor pertanian ada 4.056 orang (petani). Sedangkan tingkat pendidikan di sana, rata-rata Sekolah Dasar (SD). *Nah*, pertanyaan saya, logika seperti apakah yang bisa menjelaskan profil semacam ini akan terserap dalam lapangan pekerjaan usaha padat modal seperti pabrik semen? Itu tentu logika yang *ngawur* dan tidak berdasar.

Ketiga, keberadaan tambang tidak selalu berdampak positif bagi perekonomian warga sekitar. Analisis ini sebenarnya sudah diuraikan dengan detail oleh Michael Power dalam *Digging to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development* untuk kasus di Amerika, Kanada, dan Australia. Atau ada baiknya Anda membaca tulisan saya yang berjudul *Mitos Kesejahteraan Melalui Pertambangan*.[3] Bantahan paling konkret dari argumen dampak ekonomi ini adalah berapa ribu orang yang akan kehilangan kemampuan hidupnya akibat kehilangan lahan pertanian. Hal ini akan berbuntut panjang karena akan kehilangan banyak hal yang lain, misal kemampuan menabung melalui mekanisme ternak sapi. Jadi saya kira memang ada dampak ekonomi, tapi relasinya justru negatif, bukan positif sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh pihak PT Semen Indonesia maupun oleh pemerintah daerah.

Benarkah pembangunan tambang ini terkait nasionalisme dimana kekayaan alam harus dikelola bangsa sendiri (BUMN)?

Saya orang paling tidak bisa terima jika hanya karena PT. SI adalah BUMN, saya dipaksa percaya bahwa pendirian pabrik semen ini soal nasionalisme dimana kekayaan Pegunungan Kendeng harus dikelola bangsa sendiri (BUMN). Ini ibarat saya dipaksa untuk mempercayai bahwa Ganjar Pranowo adalah marhaenis sejati, padahal buktinya dirinya sama sekali tidak berpihak pada kaum marhaen (*red*. petani).[4] Ada alur logika yang salah yang menganggap BUMN berarti rakyat mengelola aset milik raktyat sendiri. Mengapa demikian? BUMN yang ada saat ini bukan seperti BUMN yang ada di era Soekarno saat nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dulu. Mari kita lihat profil berikut:

Gambar 7
Profil Kepemilikan Saham PT. Semen Indonesia



Sumber: divisualisasikan oleh A.B. Rodhial Falah

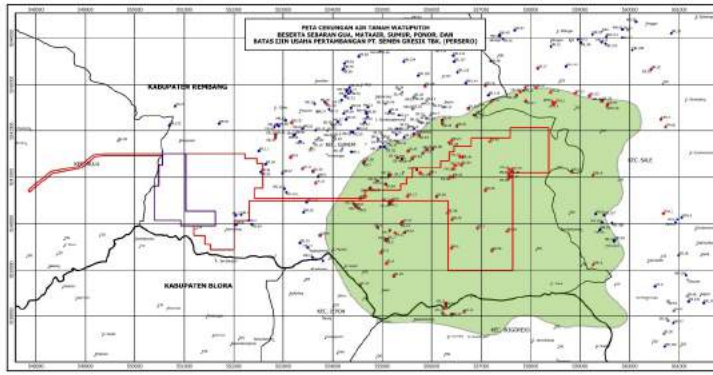
Nah, dari diagram di atas ini kita bisa melihat, bahwa kepemilikan saham PT. Semen Indonesia tidak sepenuhnya milik Pemerintah RI, bahkan ada 38% saham milik asing. Apakah yang demikian ini profil BUMN dengan kewenangan sepenuhnya ditangan rakyat? Logika "BUMN merupakan kepanjangan tangan pengelolaan asset bangsa sendiri" saja saya kira masih bermasalah, tapi tidak perlu saya bahas disini argumen itu. Jika pemerintah atau siapapun mau taat logika soal nasionalisme pengelolaan aset-aset bangsa, saya kira nasionalisasi maupun proteksi industri ekstraktif dari perusahaan-perusahaan asing lebih masuk akal. Jadi, membawa soal tambang semen di Rembang dalam nalar nasionalisme tentu saja hal yang sangat tidak relevan dan *ngawur* tentunya.

Benarkah pertambangan semen tidak ada hubungan dengan krisis air?

Jujur saja, setelah memahami logika apa itu pegunungan karst, saya tidak bisa menerima argumen bahwa pertambangan di pegunungan karst (Kendeng) itu tidak ada sangkut pautnya dengan konteks air. Saya akan jelaskan pengetahuan sederhana saya—yang berasal dari proses memahami, bukan mendalami—tentang apa itu karst. Bagi saya, pegunungan karst merupakan sebuah kawasan yang secara alami menciptakan tandon air di dalamnya. Ciri-ciri dari karst biasanya akan ditemukan banyak mata air di bagian bawah, dan banyak ditemukan *ponor*[5] di bagian atas. *Nah,* kenyataan ini persis yang terjadi di kawasan yang akan di tambang PT. Semen

Indonesia di Rembang. Tanpa berdalih itu pun, sebenarnya secara hukum kawasan yang akan ditambang semen itu telah ditetapkan pemerintah[6] sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Yang hendak saya katakan di sini, argumen bahwa pertambangan di Rembang tidak memiliki hubungan dengan konteks air merupakan argumen yang salah dan penuh kebohongan. Apalagi Perda RTRW Jateng secara jelas menyebutkan kawasan itu (CAT Watuputih) adalah kawasan lindung geologi, yang dikategorikan sebagai kawasan imbuhan air.

Gambar 8
Penampakan Posisi IUP PT. Semen Indonesia dan Cakungan Air Tanah



Sumber: divisualisasikan oleh A.B. Rodhial Falah

Keterangan:

Garis Kotak-kotak: pabrik dan area pertambangan yang akan dilakukan PT. SI

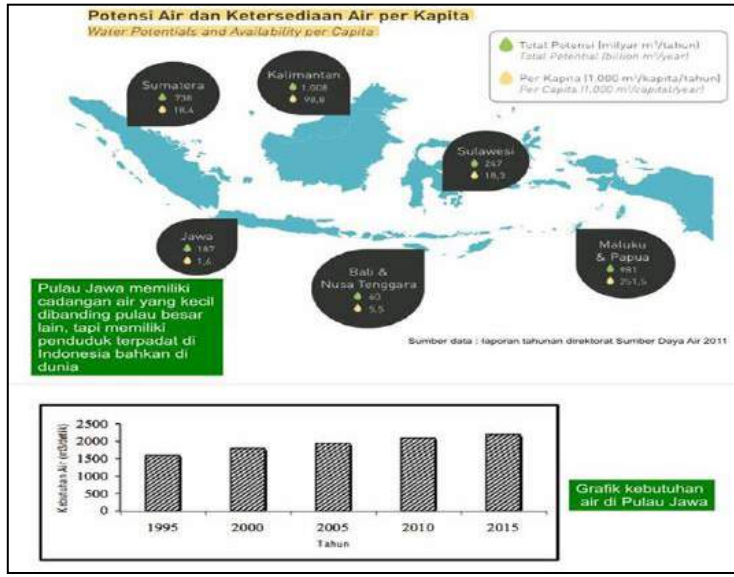
Area yang Diarsir: kawasan CAT Watuputih

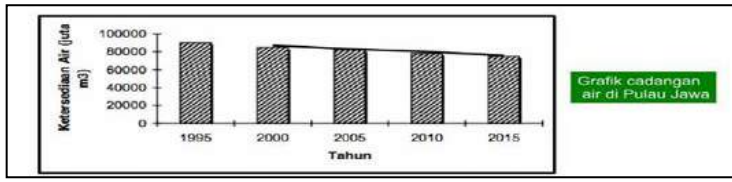
Dari peta yang saya tunjukan di atas, terlihat jelas bahwa kawasan yang akan dihajar dan dikeruk habis-habisan adalah kawasan CAT Watuputih itu sendiri. Bagaimana mungkin nalar pertambangan ini tidak mengancam eksistensi air, padahal daerah yang dikeruk adalah kawasan imbuhan air?

Dalam konteks lebih makro, bagaimana posisi air di Indonesia, dan Jawa khususnya? Jangan membayangkan bahwa Indonesia yang berkarakter kepulauan ini tidak memiliki persoalan terhadap air. Logika itu salah besar! Mari saya tunjukkan data berikut:

Gambar 9

Profil Antara Kebutuhan dan Cadangan Air di Jawa





Sumber: divisualisasikan oleh A.B. Rodhial Falah

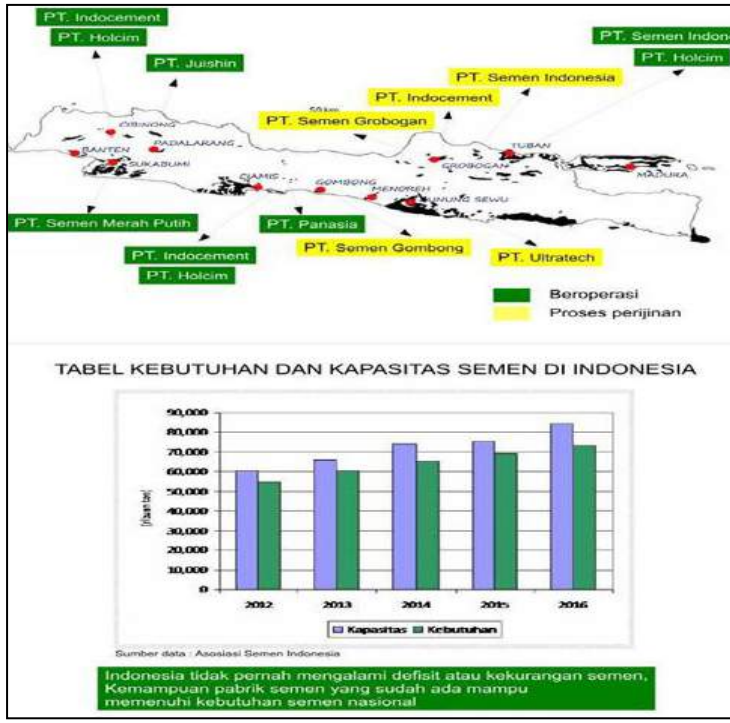
Dari gambar di atas tampak jelas bahwa dari tahun ke tahun terjadi defisit antara kebutuhan air dan cadangan air di Jawa (lihat gambar). Kondisi cadangan air ini akan semakin parah pada tahun-tahun ke depan. Keadaan semakin parah ini disebabkan karena pembabatan hutan dan pengerukan kawasan pegunungan karst masih terus dilakukan hingga detik ini. *Nah*, di titik ini sebenarnya para pelaku tambang yang harusnya bertanggung jawab. Contoh PT. Semen Indonesia di Rembang, selain akan menghancurkan kawasan CAT Watuputih, mereka juga sudah membabat hutan yang sangat hijau menjadi pabrik semen. Bukti apa lagi yang harus saya sodorkan untuk mengatakan hubungan pembangunan pertambangan semen sangat berpengaruh besar pada ekologi sekitar, terutama eksistensi air didalamnya.

Benarkah saat ini kita defisit semen sehingga harus ada banyak pertambangan semen di berbagai daerah?

Argumen defisit produksi semen selalu digunakan setiap kali ada investor tambang semen akan menghajar sebuah kawasan yang menjadi incarannya. PT. SMS yang akan mengeksploitasi Pati misalkan, mereka berkoar-

koar kepada wartawan-wartawan yang kurang teliti soal kebutuhan semen di Jateng masih defisit alias masih kurang banyak.[7] Dengan alasan yang sama pula, PT. Semen Indonesia berargumen defisit produksi semen setidaknya membutuhkan 2 pabrik baru.[8] Pertanyaannya kemudian, sebenarnya seperti apakah produksi semen dan kebutuhan semen itu saat ini. Saya akan tunjukkan dalam data berikut ini.

Gambar 10
Sebaran Industri Semen di Jawa



Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh A. B. Rodhial Falah

Menurut data yang diolah dari Asosiasi Semen Indonesia, ternyata kita tidak pernah mengalami defisit apapun, sebab selama ini (2012-2016) jumlah kapasitas produksi semen ternyata lebih besar dari kebutuhan semen yang ada. Lalu, bagaimana dengan pernyataan investor-investor semen itu bisa muncul? *Nah*, jika kita membaca isi berita secara detail, memang sebenarnya tidak ada isi yang menunjukkan kita defisit secara nasional, hal yang menurut saya sengaja dikontraskan sebagaimana judul berita yang ditulis para wartawan yang bombastis itu. Yang terjadi saat ini sebenarnya adalah distribusi semen yang tidak merata, bukan kapasitas produksi yang defisit. Dalam kasus pernyataan direktur PT. SMS, Jawa Tengah pada 2014 diklaim sedang defisit, tapi yang sesungguhnya ternjadi itu bukan karena defisit produksi, tapi distribusi yang tidak merata sampai ke Jawa Tengah (cek catatan no.7). Sebab, jelas bahwa tahun 2014 kapasitas produksi semen secara nasional lebih tinggi dari kebutuhan semen. Artinya, pernyataan kita sedang defisit produksi semen sebenarnya hanya permainan tipu-tipu saja dan disebarkan oleh para wartawan yang malas berfikir!

Benarkah ibu-ibu Rembang di tenda perjuangan itu dibayar dan digerakkan pihak lain?

Satu lagi hal yang perlu saya luruskan meski sebenarnya saya sangat enggan menjelaskan persoalan ini. Saya berkeyakinan tidak ada orang di dunia yang mau tinggal di tenda yang begitu ironik (sangat panas disiang hari, begitu dingin di malam hari, dan hujan lebat di

musim penghujan) selama lebih dari 280 hari kecuali orang yang sudah tak waras akalnya. Saya yakin apabila kita berfikir jernih dan normal, nalar semacam itu tidak perlu dipertanyakan ulang. Namun, saya sungguh geram oleh orang bernama Alfin Tofler, wartawan media bareksa.com.[9] Tanpa sungkan, malu-malu, dan sesuka hatinya menulis sebuah berita yang menyebutkan bahwa ibu-ibu yang tinggal di tenda mendapat uang. Ibu-ibu dianggap mengais rezeki melalui bayaran-bayaran tinggal di tenda. Ini jelas jurnalisme paling gila dan *ngawur,* meski praktik semacam ini sudah banyak sekali terjadi dalam konflik ekologi semacam ini.

Kejadian seperti Alfin Tofler ini sebenarnya bukan yang pertama yang dialami Ibu-Ibu. Jauh sebelumnya para wartawan sudah mempopulerkan adanya pihak-pihak lain yang menyuruh para ibu-ibu tinggal di tenda.[10] Meski saya bukan orang yang sering menemani ibu-ibu di sana, tapi saya tahu bagaimana nalar keikhlasan dan bentuk serta cara-cara perjuangan yang ibu-ibu yakini.[11] Perjuangan harus tinggal di tenda memang sangat berdarah-darah; meninggalkan lahan, anak-anak, bahkan banyak tanggung jawab keluarga hanya untuk mengusir PT. Semen Indonesia dari bumi Rembang. Yang saya sesalkan, kenapa bukan empati yang keluar, malah para wartawan ini ikut pula mencaci maki para ibu-ibu yang demikian saya agungkan ini. Di hadapan penguasa dan korporasi yang tak lelah mengibaskan suapan, para jurnalis

yang harusnya mengabarkan kebenaran berbalik arah dengan menyebar fitnah dan kebohongan-kebohongan.

Jika mau jujur, siapa yang sebenarnya membayar para demonstran ini. Saya akan cerita sebuah gambaran kontras tentang sebuah aksi di Semarang pada awal 2015 lalu. *Pertama*, saya pernah menyaksikan pemandangan ada ratusan ibu-ibu penolak tambang turun dari truk terbuka lalu berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Ganjar Pranowo untuk menolak pembangunan tambang semen di Rembang. *Kedua*, di lain hari, saya menyaksikan ratusan orang-orang turun dari 5 bus pariwisata eksklusif ber-AC kemudian demonstrasi di depan kantor Gubernur untuk mendukung investasi PT. SI di Rembang. Sekarang, jika kita menggunakan nalar yang baik, kira-kira mana massa demonstran bayaran dari kedua belah pihak ini? Silahkan renungkan sendiri! Yang perlu saya beritahukan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memilih lebih mendengarkan suara demonstran kedua, yang turun dari Bus eksekutif ber-AC itu. Inilah realitas yang kita hadapi atas persoalan di Rembang.

Jika Anda bertanya apakah saya hanya ikut-ikutan dalam gerakan #demirembang, #saverembang, #rembang-melawan, atau apapun namanya, Anda salah besar. Saya terlibat dalam barisan penolakan tambang di Kawasan Kendeng, murni karena pergulatan yang terjadi antara pengetahuan dan pemikiran saya, sehingga secara sadar penuh saya memberanikan diri bersikap seperti ini. Semoga Anda mengerti mengapa saya begini, dan agar

bisa sedikit menggerakkan nurani Anda sekalian. Tapi jika Anda tidak mau bergerak karena masih mau mengkaji ini itu dulu, ya sudahlah, saya hanya sampaikan: Rakyat sudah digebuk, Bung/Mbak! []

Catatan:

[1] Joseph. E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi. 2011. *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto bukan tolok ukur yang tepat untuk menilai kesejahteraan?*. Jakarta: Marjin Kiri.

[2] Baca http://www.antarajateng.com/detail/pabrik-semen-senilai-rp37-triliun-masuk-rembang.html

[3] Baca http://literasi.co/Mitos-Kesejahteraan-Melalui-Pertambangan

[4] Baca http://lintas7.com/tolak-pabrik-semen-mahasiswa-tuding-ganjar-pranowo-marhenis-gadungan/

[5] Secara sederhana, ponor merupakan pipa alami yang berfunsi menyalurkan air dari permukaan tanah menuju tandon air di bawah tanah.

[6] Baca Kepres No.26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

[7] Baca http://ekbis.sindonews.com/read/896232/34/produksi-semen-jateng-defisit-5-4-juta-ton-1409284758

[8] Baca http://duniaindustri.com/indonesia-defisit-pasokan-semen-butuh-minimal-2-pabrik-baru/

[9] Baca http://www.bareksa.com/id/text/2015/03/16/pabrik-semen-indonesia-di-rembang-dan-demonstran-tenda-biru/9741/analysis

[10] Baca http://www.meristanews.co.id/anggota-dprd-rembang-menduga-ada-pihak-lain-yang-bermain-atas-aksi-penolakan-pabrik-semen/

[11] Lihat klarifikasi warga di https://www.youtube.com/watch?v=veS1atZ8Qik

(BAGIAN 11)

Seruan Penyelamatan Lingkungan Gus Mus: Tafsir Atas Wawancara KH. Musthofa Bisri Tentang Pabrik Semen di Rembang*

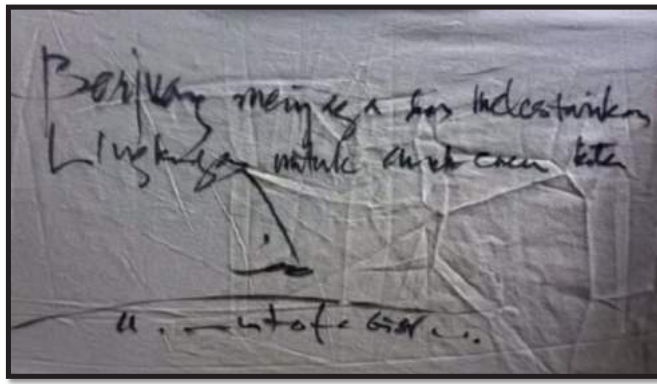
Hendra Try Ardianto

Ketika menyimak wawancara KH. Musthofa Bisri (Gus Mus) di youtube.com, saya senang sekali akhirnya salah satu kyai besar NU yang sangat dihormati di Jawa tersebut turut bersuara lantang tentang persoalan besar pula, yakni pertambangan semen di kawasan Kendeng. Selama ini jarang sekali ada tokoh nasional yang berani bersuara lantang terhadap isu-isu lokal macam ini. Mereka sibuk hilir mudik membela KPK dari bahaya cengkraman mafia-mafia korupsi, karena memang itu sedang *hit* di media massa. Tidak sekedar cerewet di media sosial, mereka juga menggelar berbagai konferensi pers untuk menyatakan dukungan terhadap KPK. Bagi saya, ini

* Tulisan ini pernah dimuat di *www.nu.or.id* pada 12 Maret 2015.

sebuah pilihan, apakah mesti cerewet persoalan lokal atau persoalan yang berada di Jakarta. Hanya, saya agak risau jika para tokoh ini lantang betul terhadap persoalan di Jakarta, sementara persoalan di tingkatan lokal yang secara geografis dekat malah melempem atau tidak ada suara sama sekali.

Foto 7
Pernyataan Sikap Gus Mus



(Berjuang menjaga dan melestarikan lingkungan untuk anak cucu kita)

Sumber: youtube.com

Tulisan ini tidak bermaksud menaifkan mereka yang bersuara kencang tentang persoalan-persoalan di Jakarta. Saya hanya ingin mengajak segenap pihak untuk ikut ambil bagian dalam barisan menyelamatkan gunung-gunung kapur di Jawa, khususnya dari ancaman pertambangan yang membabi buta. Jawa sudah berjubel manusia. Ancaman lingkungan mulai muncul satu per satu. Gunung-gunung mulai dikeruk, hutan-hutan sudah digunduli, dan air sudah banyak yang yang di*privatisasi*. Bencana

lumpur Lapindo, dimana nasib ribuan orang kehilangan segalanya dan hingga kini tidak jelas penyelesaiannya, seolah belum cukup memberi pelajaran pada kita semua. Dengan seluruh kebebalan yang tak terperikan, kita seolah menunggu lubang-lubang besar muncul terlebih dahulu seperti di Kalimantan atau di Papua (seperti Freeport) sebelum benar-benar mau bergerak.

Kembali ke wawancara Gus Mus, saya merasa perlu melakukan tafsir atau sepenggal penjelasan tentang isi wawancara di *youtube* itu. Bagi saya, semua jawaban Gus Mus sudah *make sense* betul dengan logika berfikir saya. Ini lantaran saya juga sedang mendalami persoalan yang sama: permasalahan penambangan semen di kawasan Kendeng. Namun, karena motif saya ingin mengajak segenap pihak terlibat dan ambil bagian dalam persoalan ini, saya akan menafsirkan dan memberikan catatan tambahan, agar wawancara Gus Mus tentang Pabrik Semen bisa dicerna lebih jernih oleh pihak atau publik yang lebih luas.

(I)

Gus Mus:

> *Ini persoalan lingkungan itu mestinya harus menyeluruh. Jangan di Pati selesai, lalu pindah ke Rembang. Rembang selesai, nanti pindah ke Purwodadi. Selalu pindah, begitu terus. Itu akan memusingkan rakyat! Iya kan. Harus ada planning, ada kebijaksanaan yang umum. Pokoknya kalau merusak lingkungan tidak boleh. Itu yang saya inginkan. Jadi, nanti sekaligus untuk tidak bisa pindah-pindah ke*

tempat lain. Itu menurut saya. Makanya saya pesankan Mas Manaf, Mas Yahya supaya menyampaikan kepada pihak-pihak atasan sana. Tidak hanya ini saja, juga banyak sekali penambang-penambang liar lain yang merusak lingkungan, kadang-kadang tanpa izin.

Penjelasan:

Rencana pengerukan kawasan Kendeng—baik di Pati, Rembang, dan sekitarnya—sudah disiapkan sejak lama. Di tahun 2006, PT. Semen Gresik (sekarang PT. Semen Indonesia) pernah berencana mengeruk bahan baku semen di Sukolilo, Pati. Namun, karena besarnya gerakan sosial yang menolak rencana pertambangan itu dan hasil keputusan PTUN di Mahkamah Agung tahun 2009, akhirnya salah satu perusahaan BUMN ini angkat kaki dari Pati. Sayang, rakyat benar-benar dipusingkan ulah para pejabat yang gampang sekali memberi izin pertambangan. Entah karena motif apa izin-izin ini mudah sekali keluar meski masyarakat setempat sangat keras menetangnya. Di tahun 2010, anak perusahan *Indocement* mengajukan izin serupa di kecamatan lain, yakni di Kayen dan Tambakromo, Pati. Sedangkan PT. Semen Indonesia yang gagal berinvestasi di Pati, mendapat izin penambangan di Rembang. Saat ini, selain dua perusahaan besar tersebut, kawasan pegunungan Kendeng sedang diserbu perusahaan-perusahaan semen. Beberapa diantaranya adalah: PT. Semen Grobogan, PT. Vanda Prima Lestari, PT. Holcim, PT. Ultratec Mining, dan banyak lagi yang rencananya akan mengeruk jutaan ton kapur pertahun

di kawasan Kendeng, terutama di Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan. Ibarat semut, perusahaan-perusahaan ini saling berebut dan mengkapling-kapling kawasan Kendeng untuk eksploitasi pertambangan.

Di Rembang sendiri penambangan kapur sebenarnya sudah ada cukup lama. Di sekitar desa Tegaldowo dan Tahunan saja, saat ini ada sekitar sembilan perusahaan penambang kapur. Perusahaan-perusahaan inilah yang sebenarnya ikut disentil oleh Gus Mus. Bagaimana proses perizinan perusahaan-perusahaan ini diberikan tidak diketahui publik sama sekali. Apalagi diantara perusahaan itu terdapat perusahaan mantan Bupati Rembang yang saat ini menjadi pesakitan dalam kasus korupsi. Meledaknya penolakan dan protes rencana penambangan PT. SI merupakan kulminasi dari abainya pemerintah menjalankan kebijakan yang transparan dan akuntabel, bahkan cenderung serampangan memberikan izin lingkungan tanpa mengajak warga sekitar.

Oleh karena itu, rasa penasaran Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng yang mengesankan bahwa dirinya merasa bingung dengan aksi penolakan warga tentu sangat tidak mendasar. Menurut Ganjar dulu, "penambangan itu sudah puluhan tahun (ada di Rembang), ...jadi sebenarnya saya penasaran saja kenapa protes?". Pernyataan ini jelas sekali mengesankan ada yang salah dengan rakyat, dan di saat bersamaan juga membangun kesan yang kencang sekali bahwa rakyat diprovokasi orang luar. Dulu saya juga merasakan kesan itu karena saya juga termasuk orang

luar yang masuk area konflik. Ganjar jelas pura-pura lupa bahwa yang bermasalah adalah negara sendiri, mengapa izin-izin pertambangan serampangan diberikan tanpa membuka ruang dialog dengan warga sekitar kawasan tambang.

(II)

Penanya:

Dengan cara apa kami melawan?

Gus Mus:

Dengan kesederhanaan.Kita harus lawan dengan gaya hidup sederhana. Gaya hidup menyenangi materi berlebih-lebihan akibatnya merusak.

Penjelasan:

Gus Mus adalah kyai besar kharismatik di Jawa yang tinggal di Rembang, juga seorang Rais Aam Nahdatul Ulama (NU). Petuah-petuahnya selalu menjadi obor penerang sekaligus spirit hidup bagi kalangan Nahdliyin. Jadi wajar jika penanya meminta petuah terhadap para kyai, karena demikianlah tradisi NU umumnya berlangsung. Adapun ibu-ibu di Gunem yang tinggal di tenda sebagian besar merupakan warga Nahdliyin. Petuah "melawan dengan kesederhanaan" merupakan jawaban bernas dan tepat sekali dalam konteks protes menolak tambang. Sebab, di kawasan itu, politik pecah belah (*devide et impera*) berlangsung kencang melalui instrumen uang (materi). Tidak hanya muncul demonstrasi bayaran pro-pertambangan, namun banyak juga tokoh-tokoh setempat

yang pro-investasi akibat distribusi materi yang diberikan oleh perusahaan. Hal semacam ini jamak terjadi dalam rencana investasi pertambangan.

"Melawan dengan kesederhanaan" sama artinya dengan menjaga moralitas warga penolak agar tetap kokoh menyuarakan penyelamatan lingkungan. Menyenangi materi secara berlebihan, yang dilakukan oleh segelintir orang, hanya akan menyeret pada penderitaan yang lebih besar dan luas. Warga yang sebagian besar merupakan petani, tentu akan kehilangan daya penopang hidupnya jika alam sekitar dikeruk jutaan ton pertahunnya. Kenyataan ini nampaknya betul-betul disadari oleh Gus Mus sehingga beliau memberikan petuah di atas. Sekali saja orang-orang mencintai materi secara berlebihan, maka apapun profesinya (pejabat, ustad, atau warga) akan terseret pada kesengsaraan yang lebih besar. Itulah makna dibalik "melawan dengan kesederhanaan".

(III)

Penanya:

Apakah ada pesan untuk ibu-ibu Rembang yang masih bertahan di tenda demi menyelamatkan lingkungan dan kehidupan?

Gus Mus:

Mudah-mudahan niat yang baik, mendapat balasan dari Tuhan, dan diberi kekuatan lahir batin. Sambil berjuang secara lahiriah, juga berdo'a secara batiniah. Dua-duanya dikerjakan. Jangan ikhtiar lahir saja, tapi ikhtiar batin juga.

Penjelasan:

Saya merasa ini bukan sekedar jawaban sederhana. Bagi saya inilah jawaban paling presisi dalam melihat persoalan. Perjuangan lahiriah dan batiniah merupakan dua ikhtiar yang harus dilakukan warga di Rembang. Akibat kerasnya konflik yang berlangsung, saya melihat masalah terbesar yang dihadapi warga saat ini adalah daya tahan mereka dalam waktu lama melawan kekuatan besar dari koporasi dan pejabat-pejabat "tuli" yang tak punya kemampuan mendengar aspirasi rakyat. Secara lahiriah, mereka telah berjuang mati-matian, mulai dari tinggal di tenda selama 263 hari (hingga sekarang), puluhan kali demonstrasi, hingga mendapat hinaan dan ejekan dari lingkungan sekitar. Belum lagi, praktik pecah belah (adu domba) telah membuyarkan ketentraman hidup mereka sehari-hari, bahkan ada yang merusak rumah tangga. Kondisi-kondisi semacam itu jelas tidak merusak fisik saja, tapi mengancam keteguhan batin. Inilah alasan mengapa Gus Mus memberikan pesan agar perjuangan lahir dan batin selalu beriringan.

(IV)

Penanya:

Apakah ada saran untuk pemerintah terkait tambang perusak lingkungan?

Gus Mus:

Pokoknya kalau merusak lingkungan itu mestinya harus tidak boleh. Pemerintah harus melindungi lingkungan hidup. Untuk

apa ada menteri lingkungan hidup. Menteri lingkungan itu kan untuk menjaga lingkungan, dan merawat lingkungan. Kalau Kementerian lingkungan tidak merawat lingkungan, terus siapa yang merawat.

Penjelasan:

Jawaban Gus Mus ini sebenarnya merupakan pengingat akan peran dan fungsi masing-masing pihak. Saya rasa, Gus Mus menyadari betul kenyataan bahwa pasca Reformasi fungsi dan peran negara telah bergeser ke arah yang keliru. Saya yang belajar ilmu politik, melihat kecenderungan ada praktik-praktik *bossism*, *local strongmen, shadow state*, dan segala hal buruk tentang pengelolaan negara. Inilah yang kembali diingatkan Gus Mus. Kementerian lingkungan hidup harus jelas menunjukkan pembelaannya terhadap keberlangsungan lingkungan. Apalagi, warga di Rembang sudah pernah mengadu secara langsung pada Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup, bahkan kepada Jokowi ketika dirinya belum dilantik sebagai presiden. Sayangnya, janji-janji penyelesaian itu tak pernah mendapat respon konkret, baik dari Siti Nurbaya maupun Jokowi selaku pemimpin politik tertinggi di negeri ini.

Di luar kementerian lingkungan, saya kira pesan ini juga disampaikan pada seluruh pejabat negara. Gubernur/bupati yang dipilih rakyat, harus mau mendengar apa menjadi aspirasi rakyat, bukan teguh pada kebebalannya sendiri akibat tersandera kepentingan-kepentingan yang berseberangan dengan kehendak rakyat. Apalagi, posisi

Ganjar selaku gubenur Jateng ini agak unik. Hampir sebagian besar warga penolak tambang di Jateng, terutama di Rembang, Pati, Grobogan, Blora, dulunya adalah tim sukses Ganjar di tingkat bawah (*grassroot*). Mereka aktif bergerak mencari suara di desa-desa. Kesadaran mendukung Ganjar sangat masuk akal karena saat itu lawan dalam Pilkada adalah Bibit Waluyo, yang merupakan musuh bersama (*common enemy*) warga penolak tambang. Bibit dikenal sebagai Gubenur yang memberikan izin-izin tambang semen pada korporasi besar, dan dalam kasus Pati, Bibit menggunakan pendekatan militeristik dalam menundukkan warga penolak, bahkan mengkriminalisasi warga penolak tambang.

***

Demikianlah tafsir saya membaca wawancara Gus Mus mengupas persoalan pabrik semen di Rembang. Saya memahami wawancara ini sebagai seruan penyelamatan lingkungan yang dilakukan Gus Mus. Seruan ini, tidak saja ditujukan pada warga agar tetap teguh lahir-batin menjaga kelestarian kawasan Kendeng, namun juga ditujukan pada para pejabat yang keliru dalam menjalankan peran dan fungsi yang mestinya mereka jalankan. Secara pribadi, seruan ini saya titipkan pada kawan-kawan saya: para akademisi, aktivis LSM, maupun gerakan mahasiswa untuk ambil bagian menyelamatkan gunung-gunung kapur di Jawa dari kehancuran akibat operasi pertambangan semen. []

(BAGIAN 12)

Perjuangan Ibu-ibu Petani Rembang Melawan Korporasi Tambang*

Ming-Ming Lukiarti

Sudah sebulan perempuan-perempuan perkasa itu menduduki jalan masuk menuju tapak Pabrik Semen Indonesia yang sedang dibangun sejak heboh peristiwa 16 Juni 2014 kemarin. Kejadian yang tak mungkin dilupakan mereka, ketika sudah sejak subuh berduyun-duyun berangkat dari desa menuju lokasi tapak pabrik dengan naik truk dan bersiap menghadapi berbagai kemungkinan dari perlawanan mereka pada korporasi kemaruk dan penguasa yang tuli. Dengan mulut dilakban, kaki mereka berderap bersama menuju tapak pabrik. Mereka melakukan aksi pemblokiran jalan untuk menolak acara peletakan batu pertama yang dilaksanakan oleh PT Semen Indonesia, Tbk. Ratusan aparat TNI dan Polri berjaga-jaga di sepanjang jalan masuk lokasi tapak pabrik. Ibu-ibu

---

* Tulisan ini pernah dimuat di *www.jurnalperempuan.org* pada 15 Juli 2014.

terus merangsek, merebahkan tubuhnya di tengah jalan, menghalang-halangi jalan menuju tapak pabrik. Ibu-Ibu diangkat aparat kemudian disingkirkan di tepian jalan. Mereka bersikukuh menduduki tengah jalan. Puluhan ibu-ibu itu tanpa lelah dan takut kembali merebahkan dirinya di tengah jalan. Aparat mulai bertindak represif, ibu-ibu dilemparkan ke semak-semak di tepian jalan. Dua ibu-ibu jatuh pingsan dan terluka karena duri semak, ada pula yang bajunya robek karena ditarik aparat. Di tengah desakan aparat yang demikian keras, ada beberapa ibu-ibu yang memberanikan diri melepas baju, setengah telanjang. Iya, mereka setengah telanjang menantang aparat. Tindakan itu diambil di tengah desakan yang demikian keras, di saat mereka tak lagi mampu berkata dan melawan dengan tenaga.

Jerit dan tangis terus mengiris, ada beberapa warga yang ditangkap. Mereka ditangkap dengan tuduhan wartawan palsu karena membawa kamera dan mendokumentasikan aksi tersebut. Salah satu yang ditangkap adalah seorang ibu-ibu yang dituduh sebagai provokator. Tindakan kekerasan tidak berhenti sampai di situ. Sampai pada malam hari ketika ibu-ibu memutuskan untuk bermalam dan membuat tenda di lokasi tersebut, aparat tidak mengizinkan dan mengobrak-abrik tenda yang akan didirikan. Tangis, jerit dan sholawat pecah di tengah kegelapan hutan Gunung Bokong. Ketika ada warga yang membawakan makanan dan keperluan penerangan juga tidak boleh masuk, pengawalan aparat begitu ketat,

ketakutan semakin menyelimuti perempuan-perempuan itu, mereka terus menangis dan bersholawat berserah diri kepada Yang Kuasa. Sampai kemudian dibolehkan membuat tenda serta penerangan di lokasi tersebut.

Perjuangan ibu-ibu bukan tanpa alasan, bukan *"poko'e",* namun mereka punya landasan yang kuat yaitu menyelamatkan lingkungannya dari ancaman tambang semen. Mereka yang mayoritas sebagai petani merasa terancam akan rencana keberadaan tambang semen yang lokasinya berada di desanya yaitu desa Tegaldowo dan Timbrangan Kecamatan Gunem.

Tanggapan Pemerintah

Ibu-ibu menuntut agar alat berat segera dikeluarkan dan aktivitas pembangunan pabrik semen dihentikan. Perwakilan warga mendatangi kantor Gubernur untuk menyampaikan surat keberatan Izin Lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah berikut dengan dasar-dasar pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pihak pabrik semen. Namun Gubernur sama sekali belum menanggapi secara resmi surat keberatan tersebut. Sampai ketika Gubernur datang berkunjung ke tenda ibu-ibu, Gubernur bertanya kepada mereka "Sudahkah membaca Amdal?" Spontan Sukinah (38) warga Tegaldowo langsung menjawab dalam bahasa Jawa "Kami ini warga desa yang kebanyakan buta huruf, bagaimana kami bisa membaca buku setebal itu, yang kami tahu adalah ancaman tambang yang akan merusak pertanian kami karena mata air yang rusak dan debu tambang yang menutupi

tanaman kami". Sukinah menjelaskan kepada Gubernur mengenai keberadaan perusahaan tambang kecil yang sudah beroperasi di dekat pemukiman desanya. Dengan keberadaan perusahaan tersebut, pertanian warga sudah terganggu. Namun Gubernur malah bertanya mengapa warga tidak protes terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Pertanyaan serupa selalu disampaikan orang-orang yang belum tahu bagaimana sejatinya arah perjuangan ibu-ibu. Dengan lantang Yani menjawab, "kami menolak semua perusahaan tambang yang sudah merusak tanah kami, sumber mata air kami dan pertanian kami. Tambang semen adalah ancaman besar karena itu kami mengawali gerakan dengan menolak rencana penambangan tersebut, kami tidak mau menderita akibat tambang".

Foto 8
Protes Ibu-Ibu di Depan Tapak Pabrik PT. SI



Sumber: dokumentasi JMPPK Rembang

Gubernur menawarkan pertemuan "rembukan" antara warga dan pihak pabrik semen didampingi pakar masing-masing, warga dijanjikan waktu seminggu untuk mencari pakar yang sanggup mendampingi. Setelah perjalanan mencari pakar yang bersedia mendampingi, mereka menyanggupi tantangan Gubernur, kemudian mengirim surat secara langsung kepada Gubernur mengenai kesanggupan warga untuk dipertemukan dengan pihak pabrik semen dengan didampingi pakar masing-masing. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan warga sama sekali belum mendapat surat balasan dari Gubernur.

Larangan Badan Geologi

Pada tanggal 1 Juli 2014, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Repubrik Indonesia mengirim surat bernomor 3131/05/BGL/2014 kepada Gubernur Jawa Tengah mengenai tanggapan rencana penambangan batu gamping di wilayah Kabupaten Rembang. Dalam surat tersebut Kepala Badan Gelologi menyampaikan bahwa menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No 26 tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah Indonesia, menyatakan bahwa batu gamping yang akan ditambang olek perusahaan semen merupakan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Akuifer CAT Watuputih terbentuk pada batu gamping formasi paciran, termasuk dalam kategori akuifer dalam aliran celahan, rekahan dan saluran dan bahwa CAT Watuputih sebagian besar wilayahnya merupakan daerah imbuhan

air tanah. Berdasarkan pasal 40 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008, tentang Air Tanah, mengamanatkan bahwa untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah dilakukan dengan cara mempertahankan imbuhan air tanah dan melarang kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 meter dari lokasi kemunculan mata air. Berdasarkan pasal 40 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008, tentang Air Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008, tentang Air Tanah, untuk menjaga daya dukung akuifer dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer. Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer adalah antara lain pembuatan terowongan dan penambangan batuan. Berdasarkan alasan tersebut, Badan Geologi menyatakan untuk menjaga kelestarian akuifer CAT Watuputih maka agar tidak ada kegiatan penambangan batu gamping pada area tersebut.

Surat dari Kepala Badan Geologi tersebut merupakan kabar gembira bagi warga namun tidak bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang. Pada tanggal 7 Juli 2014, Gubernur Jawa Tengah mengadakan pertemuan antara Badan Geologi bersama Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Rembang, Pihak Semen Indonesia dengan pakar dan pakar dari warga. Dalam kesempatan itu warga turut diundang

untuk menyaksikan pertemuan, namun sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berbicara dalam forum. Dalam pertemuan tersebut Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Rembang menyatakan keberatannya mengenai surat dari kepala Badan Geologi. Pertemuan tersebut belum membuahkan hasil dan masih buntu, Gubernur memutuskan akan membawa permasalahan ini ke Menteri dan Presiden.

Pernyataan dalam surat tersebut mendukung fakta lapangan yang ditemukan oleh SCA *(Semarang Caver Association)* dan JMPPK Rembang bersama warga mengenai penemuan sejumlah mata air dan gua di sekitar lokasi rencana Izin Usaha Penambangan (IUP) Pabrik Semen Indonesia. Penemuan tersebut jauh berbeda dengan yang tertera dalam Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) PT Semen Indonesia Tbk. Dalam dokumen AMDAL disebutkan hanya ada 50 mata air, namun fakta di lapangan ditemukan 109 mata air. Jumlah sumur hanya disebutkan 58 namun fakta di lapangan lebih dari 900 sumur, di dalam AMDAL tidak disebutkan jumlah gua yang berada disekitar IUP, namun faktanya ada 49 gua yang empat di antaranya ada sungai bawah tanah dan ditemukan pula fosil-fosil yang menempel pada dinding gua.

Selama ini Gubernur selalu menyatakan tidak pernah ada yang memberikan penjelasan mengenai pelanggaran yang dilakukan PT Semen Indonesia serta alasan mengapa

warga menolak, padahal dalam kesempatan bertemu dengan Gubernur, warga sudah mengirimkan surat keberatan Izin Lingkungan yang di dalamnya sudah dituliskan mengenai dugaan pelanggaran serta menyampaikan secara langsung hasil karya ilmiah dari SSC *(Student Speleological Club)* Yogyakarta mengenai pemetaan dan potensi gua di watuputih dan hasil penelitian resmi oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa tengah pada tahun 1998 mengenai Penelitian Ar Bawah Tanah Watuputih.

Menurut hasil penelitian oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber daya Mineral pada tahun 1998, perbukitan Gunung Watuputih merupakan bentang alam karst yang terbentuk pada zaman Pliosen dengan fenomena khas berupa lapis, gua kering dan berair, lembah kering, dan bentuk depresi yang teramati dari foto udara. Sebagian gua pada batu gamping karst merupakan gua kering yang berbentuk vertikal, serta masih bersifat alami dan tidak dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Secara hidrogeologis, pada tempat-tempat tertentu akan terbentuk saluran bawah permukaan yang mengalirkan air tanah ke daerah luar sehingga memungkinkan terdapatnya mata air dengan debit relatif besar.

Foto 9
Doa Bersama Ibu-Ibu di Tenda Perjuangan



Sumber: dokumentasi JMPPK Rembang

Tetap Bertahan

Hampir sebulan Ibu-ibu bertahan di tenda keprihatinan. Memasuki bulan puasa mereka masih bertahan tanpa lupa menjalankan syariat agama. Di bawah tenda seadanya, dengan terik matahari yang menyengat di siang hari dan dingin yang menusuk di malam hari serta guyuran hujan deras tidak menyurutkan langkah mereka. Tudingan miring dari media yang tidak netral maupun sekelompok orang yang pro dengan pendirian pabrik semen tidak membuat mereka gentar. Sukinah, salah satu perempuan perkasa itu mengaku sudah diizinkan suaminya untuk memperjuangkan ini. Suaminya tirakat di pondok pesantren demi mendoakan istrinya yang sedang berjuang mempertahankan tanah mereka. Demikian juga

dengan ibu-ibu yang lain, mereka sudah berbagi tugas dengan suaminya mengenai urusan rumah tangga. Istri berjuang di tenda, suami mengurus sawah, ladang dan rumah. Seringkali bapak-bapak ke tenda membawa anak mereka untuk menjenguk ibu-ibu yang bertahan. Malam hari mereka juga ada yang bertugas menjaga ibu-ibu yang bertenda di tengah hutan itu.

Bulan yang suci bagi umat muslim ini semakin membuat ibu-ibu khusyuk dalam beribadah untuk memohon kekuatan, kesabaran dan keikhlasan kepada Allah SWT dalam berjuang. Kehidupan di tenda yang tidak seperti biasanya harus mereka jalani. Beribadah, tidur, memasak, mandi di tempat seadanya. Segala cobaan selalu menerpa mereka. Fitnah, cemoohan dan cacian hadir, namun mereka selalu belajar ikhlas dan terus fokus kepada tujuan, yaitu menolak penambangan dan pendirian pabrik semen demi menyelamatkan ibu bumi dan masa depan anak cucu kelak. Di tengah terpaan isu dan berita yang selalu menyudutkan, ternyata masih banyak yang peduli dengan pergerakan ini. Ada beberapa kota di Indonesia mengadakan aksi solidaritas untuk warga Rembang seperti di Semarang, Salatiga, Solo, Yogyakarta, Tertane, Makassar, Bandung, Jakarta, Surabaya, Tuban, Pati, Blora, Palembang dan masih banyak lagi. Gema suara semakin membesar dan membuat ibu-ibu semakin bersemangat.

Pemerintah selalu berpihak pada pemodal dan sama sekali tidak memedulikan keberadaan ibu-ibu di tenda keprihatinan. Belum ada pembahasan mengenai

tuntutan ibu-ibu. Seharusnya pemerintah mengeluarkan moratorium untuk pabrik semen supaya menghentikan kegiatan pembangunan pabrik yang masih menyisakan banyak persoalan. Kebohongan-kebohongan yang dilakukan selama proses pembebasan tanah harus diusut tuntas. Warga mengakui mau menjual tanahnya dikarenakan pada awalnya makelar tanah menawarkan akan membeli tanah mereka untuk program penghijauan penanaman jarak, mahoni dan jati yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada petani lagi. Selama proses pembujukan dalam pembelian, mereka merasa terganggu dengan desakan makelar yang terus saja mendatangi mereka, sampai akhirnya mereka melepaskan tanahnya. Modus semacam ini membuat kita teringat pada masa penjajahan, ketika VOC merampas lahan warga untuk kepentingannya sendiri. Menguasai sumber daya alam demi kepentingan kelompok bukan kepentingan rakyat. Sampai saat ini masih ada tanah yang belum terjual, namun mereka yang belum menjual tanahnya selalu diancam akan dikeruk tambang jika tidak menjualnya. Intimidasi selalu dilakukan, yang memprihatinkan ada oknum perangkat desa dan aparat yang terlibat.

Keterancaman kerusakan ekologi jelas meresahkan masyarakat yang mayoritas sebagai petani. Penambangan kawasan karst akan merusak sumber mata air. Sumber mata air di Gunung Watuputih juga dimanfaatkan oleh PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah) Rembang untuk melayani puluhan ribu masyarakat Rembang dan Lasem.

Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk perusahaan-perusahaan semen akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian, sehingga petani dan buruh tani akan kehilangan lapangan pekerjaan. Praktik pertambangan juga akan menurunkan produktivitas sektor pertanian pada wilayah sekitar, karena dampak buruk yang akan timbul, misalnya, matinya sumber mata air, polusi debu, dan terganggunya keseimbangan ekosistem alamiah. Pada ujungnya, semua hal ini akan melemahkan ketahanan pangan daerah dan nasional.

Perjuangan perempuan melawan tambang tidak hanya terjadi di Rembang, banyak perempuan di belahan tanah air ini yang berjuang melawan tambang seperti Yosepha Alomang, perempuan dari tanah Papua yang berjuang melawan Freeport, Mama Aleta dari tanah Molo NTT berjuang mempertahankan tanahnya dari ancaman tambang, ibu-ibu petani kendeng di Pati yang berhasil mengusir Semen Gresik dan masih banyak perempuan-perempuan yang berjuang untuk menjaga kelestarian ibu bumi. Perempuan adalah tulang punggung kehidupan, pemilik rahim yang akan melahirkan anak-anak bangsa. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam setiap perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan. Api itu masih menyala di Rembang: Kejujuran dan Kebenaran. Selamatkan Bumi Rembang. []

(BAGIAN 13)

Ibu-ibu Rembang dan Mata Pusaran Revolusi Indonesia*

Dwicipta

Pulang sudah puluhan perempuan Tegaldowo dan Timbrangan setelah mereka melakukan perjalanan panjang dari Rembang ke Jakarta, kembali ke Rembang, lalu bergerak ke Semarang, berputar balik ke Pati dan berakhir dengan *nglurug* UGM di Yogyakarta. Sebuah rangkaian pergerakan yang melelahkan sekaligus mencengangkan! Kalau mau dihitung, ibu-ibu dari Rembang tersebut telah bergerak sejak hari Senin sebelum sampai di Rembang pada Jumat tengah malam atau Sabtu dini hari. Perjalanan ini tak kalah meletihkan dibandingkan *roadshow* para musisi dalam memperkenalkan lagu-lagunya, tak kalah nilai ibadahnya dari rangkaian dakwah para ulama untuk menyuarakan kebenaran agamanya, atau tak kalah

* Tulisan ini pernah dimuat di website *www.literasi.co* pada 23 Maret 2015.

muatan politisnya dari safari politik petugas partai dalam mengampanyekan program politiknya.

Apa yang dikerjakan para perempuan yang sekilas tampil lugu dan udik ini bahkan memiliki banyak nilai lebih dibandingkan ketiga pembanding di atas. Pertama, mereka adalah puluhan ibu-ibu dari desa terpencil di Rembang yang sering dicap bodoh, *sendika dhawuh* pada pejabat atau orang besar. Banyak di antara mereka lulus sekolah dasar saja tidak. Sementara tempat-tempat yang mereka datangi adalah tempat yang terkesan angker dan tak pernah tersentuh oleh orang-orang dari kelas sosial seperti mereka. Yang kedua, taraf ekonomi mereka pas-pas-an. Hanya orang-orang gila yang bisa melakukan rute dan tujuan-tujuan perjalanan yang susah terpenuhi oleh modal ekonomi mereka yang pas-pasan. Yang ketiga, relasi sosial mereka dengan pihak luar sebelum berkonflik dengan pihak Semen Indonesia relatif terbatas. Banyak kalangan yang tidak mempercayai mereka bisa memiliki daya tahan tubuh dan kemampuan bergerak begitu hebat dalam memperjuangkan hak atas tanah dan tumpah darah mereka sendiri.

Namun kenyataan kadang hadir lebih ganjil dari fiksi yang diciptakan pengarang jempolan. Kenyataan, lewat caranya yang mengagumkan, bisa hadir di luar horizon imajinasi seseorang. Ia bahkan tak tersentuh oleh naluri para perekayasa sosial yang piawai membaca gelagat manusia dan masyarakat. Apalagi tersentuh oleh mata batin orang-orang yang tak pernah mengasah kepekaan

nalurinya pada hal-hal 'gila' yang perlu dilakukan untuk mengguncang kemapanan manusia dan masyarakatnya. Perempuan perkasa dari Rembang ini sedang melakukan hal-hal gila bagi masyarakat kita yang *kadung* menerima kenyataan buruk ciptaan penguasa lalim dan modal yang menindas. Mereka melakukan hal-hal gila yang secara menakjubkan mempermalukan sikap diam masyarakat kita yang sudah terlanjur apatis atas penderitaan mereka. Dan mereka melakukan pembelajaran diri gila-gilaan yang secara mengagetkan mempermalukan kaum terpelajar kita yang begitu bangga akan ilmu pengetahuan yang mereka miliki.

Perjalanan panjang guna menggedor pintu kekuasaan yang macet ini tidak terjadi sekali saja. Jauh-jauh hari, mereka telah melakukan perjalanan panjang serupa, meskipun senyap dari publikasi dan tak mendapatkan perhatian masyarakat luas. Seminggu sebelumnya mereka telah melakukan perjalanan mengunjungi kantor harian Kompas dan Tempo di Jakarta, lalu pulang ke Rembang, sebelum berangkat lagi ke Semarang untuk mengikuti jadwal sidang PTUN tiap hari Kamis. Untuk menyebut sedikit dari berbagai tempat yang telah disinggahi, mereka keluar-masuk kantor Gubernur Jawa Tengah, melakukan penggalangan dana di Yogyakarta, mengunjungi kantor Walhi di Jakarta, kementerian KLH, Kontras, Komnas HAM, sampai masuk ke istana Negara dan bertemu untuk mengadukan masalah mereka pada presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Apa yang membuat mereka mau melakukan perjalanan panjang dan meletihkan ini? Apa yang membuat mereka mau berpanas-panas di bawah terik matahari dan dipeluk hawa dingin di tenda keprihatinan, berpeluh sekaligus mengucurkan airmata di lapangan saat demonstrasi, terpagut angin dan udara malam di atas truk terbuka atau bis ekonomi, dan kedinginan di ruang-ruang AC gedung-gedung Jakarta yang angkuh dan tak berperasaan? Bagaimana bisa mereka tak putus asa menghadapi puluhan—bahkan ratusan—wajah dan telinga penguasa yang membusukkan telinga hingga mata batinnya di hadapan penderitaan rakyat; bagaimana bisa mereka tetap memiliki energi untuk mengajak pihak-pihak yang terus merasa tak bisa melakukan apa-apa atas penderitaan yang mereka alami; dan bagaimana bisa mereka bisa memperhebat perjuangan di hadapan ketidakpastian masa depan?

Alasan pokok dari rangkaian demi rangkaian aksi yang mereka lakukan tentu saja kesadaran untuk mempertahankan hak atas tanah tumpah darah yang mereka cintai sepenuh hati. Itulah sebabnya hampir di sepanjang tempat yang didatangi, mereka selalu menyanyikan kidung tentang rasa cinta pada ibu pertiwi. Sungguh mengherankan mendapati kenyataan bahwa rasa cinta pada tanah air ditunjukkan oleh ibu-ibu desa di tengah kenyataan pahit bahwa elit penguasa mereka melakukan perbuatan memalukan dengan cara menjual harta kekayaan negerinya ke pihak asing. Kontras ini makin

menunjukkan bahwa guru terbaik untuk memahami kenyataan relasi elit-massa yang problematik di masa kini bukanlah kaum elit, namun massa bawah seperti ibu-ibu dari Rembang tersebut.

Alasan berikutnya adalah adanya kesadaran bahwa perubahan nasib mereka sepenuhnya tergantung pada diri mereka sendiri. Dengan begitu mereka tak menggantungkan harapan begitu berlebihan pada orang atau pihak luar, apalagi orang atau pihak luar yang telah dibuat acuh tak acuh pada sesama. Ini tak berarti mereka menafikan pihak-pihak lain. Namun sebelum pihak lain menunjukkan aksi solidaritas atas deraan penindasan yang mereka alami, harus ada kerja keras untuk lepas dari persoalan itu. Alasan terakhir, adalah kesadaran bahwa untuk melawan penindasan oleh kekuasaan dan modal yang kejam haruslah dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman mumpuni. Dengan pendidikan formal mereka yang jauh dari memadai dan dengan modal ekonomi maupun politik pas-pasan, maka cara terbaik untuk mempersenjatai diri adalah dengan bertemu, berinteraksi dan belajar langsung dengan orang dan institusi-institusi tersebut. Betapa dahsyatnya ibu-ibu yang di hari-hari normal hanya akrab dengan persoalan domestik dan lahan garapannya sekarang belajar tentang ilmu lingkungan pada para ahlinya secara langsung, belajar logika hukum dengan secara konsisten menghadiri sidang amdal di PTUN Semarang, belajar melakukan lobi-lobi politik dengan mendatangi pihak-pihak yang terlibat

dalam pusaran persoalan pendirian pabrik semen, dan belajar melakukan perluasan gerakan sosial dengan aksi-aksi di berbagai tempat.

Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu Tegaldowo dan Timbrangan sejak kekerasan aparat kepolisian dan tentara pada 16 Juni 2014 hingga sekarang secara telak menghantam berbagai pihak. Pertama, keputusan yang mereka ambil dengan tinggal di Tenda Perjuangan selama Sembilan bulan terakhir menunjukkan pada publik betapa kuatnya daya tahan perempuan dalam menghadapi kesewenang-wenangan korporasi dan kebebalan penguasa. Mereka meneguhkan sama tingginya harkat dan martabat perempuan ketika dihadapkan dengan laki-laki.

Kedua, meski tak belajar lewat institusi pendidikan formal layaknya kelas menengah dan elite kita, lewat 'sekolah alam,' mereka jadi tahu rangkaian panjang penistaan kelompok-kelompok marginal atau pinggiran oleh elite penguasa dan sikap acuh tak acuh kelas menengah Indonesia yang lebih memilih sibuk dengan dirinya sendiri. Proses belajar dan mendalami secara serius persoalan konkret yang tengah mereka hadapi diperoleh baik lewat argumen-argumen ilmiah dari institusi pendidikan dan melakukan pembuktian lewat kenyataan-kenyataan faktual yang mereka temukan. Dari sana mereka menemukan bagan alur penyelesaian konflik yang mendera mereka. Tentu saja hampir di setiap alur itu tersimpan berbagai sandungan yang membuat semangat dan batin mereka hancur lebur. Namun kalau hanya

dengan cara ini mereka bisa menampar muka orang-orang yang selama ini menikmati privilese-privilese ekonomi-politik tanpa mengeluarkan banyak keringat, mereka akan melakukannya dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Apa yang telah mereka lakukan selama sembilan bulan terakhir berbicara lebih banyak dari apa yang kita pikirkan.

Foto 10
Aksi Bersama Ibu-Ibu Menggruduk UGM



Sumber: dokumentasi warga penolak tambang Rembang

Inilah cara jitu yang ditunjukkan oleh ibu-ibu Rembang pada kalangan kelas menengah itu—agamawan, kaum terpelajar, aktivis LSM, budayawan dan pekerja seni, serta mahasiswa. Tanpa banyak cingcong *ala* intelektual kita yang tergila-gila pada ilmu pengetahuan yang *shopisticated* tapi menipu, mereka terbukti menguasai *teritori* yang didaku secara pongah sebagai wilayah atau teritori kaum intelektual dan terpelajar. Siapa yang lebih memiliki watak

terpelajar: ibu-ibu Rembang yang secara formal tak lulus SD ataukah kelas menengah kita yang memiliki gelar dan capaian keilmuan mentereng? Dengan kebobrokan mental macam apa kaum kelas menengah terdidik tahan menyaksikan wajah buruk dan busuk mereka sendiri di hadapan kaca benggala kebenaran tak terbantahkan ini?

Di atas semua serangan-serangan moral, spiritual, dan akademik dari ibu-ibu Rembang yang tak pernah bisa dibalas sedikit pun oleh kalangan kelas menengah dan kaum elite kita, apa yang dilakukan para perempuan pegunungan Kendeng ini juga menyimpan potensi revolusi massa bawah yang dahsyat. Sadar atau tidak sadar, kini mereka menjadi mata pusaran bagi revolusi di kalangan kaum terpinggirkan. Jalan berliku menuju penyelesaian masalah perampasan tanah lewat kerjasama busuk penguasa dan korporasi, batu-batu sandungan yang mereka temui di sepanjang jalan, dan gedoran tak kenal henti untuk tidak tunduk pada kekuasaan memberikan pelajaran hebat pada masyarakat marginal di wilayah-wilayah lain di negeri ini. Teknologi komunikasi dan informasi yang makin canggih, lalu-lintas berita dan analisis di media sosial atas berbagai isu yang mereka garap akan diserap menjadi bahan pelajaran sekaligus inspirasi untuk memperjuangkan hak atas tanah, ruang hidup, dan segala yang ada di atasnya. Dari satu ruang konflik akan tumbuh satu atau beberapa *organizer* gerakan sosial yang jempolan dalam menggebuk musuh-musuh rakyat tertindas seperti mereka. Bermain dari kaki ke

kaki dengan para *organizer* gerakan sosial yang terdidik dan berpengalaman dalam berbagai gerakan sosial, kita bisa menyaksikan gambaran masa depan 'daulat rakyat' yang makin cerdas. Sementara elite penguasa dari lapisan terbawah sampai mereka yang berada di puncak kekuasaan akan semakin susah bergerak dalam menipu rakyat. Kelas menengah apolitis dan netralis akan dipaksa oleh sejarah untuk menyatakan sikap politik dan keberpihakan mereka.

Di Amerika Latin, Eduardo galeano pernah mengisahkan tentang revolusi Bolivia yang diawali oleh lima perempuan perkasa. Gerakan ini diawali dari sebuah area pertambangan timah di Catavi, dan kemudian meluas ke berbagai daerah lainnya. Kelima orang perempuan itu mengawalinya dengan mogok makan. Karena kondisi perekonomian Bolivia dan buruh pertambangan yang buruk, seiring waktu gerakan itu membesar, dan akhirnya berhasil menjatuhkan rejim diktator militer. 16 tahun pasca reformasi yang makin membusuk ini, kita tengah menjadi saksi dari lahirnya kisah bukan hanya 5 perempuan perkasa, namun puluhan perempuan perkasa dari Tegaldowo dan Timbrangan dalam melawan kepongahan kekuasaan dan sikap diam masyarakat yang telah dibisukan berbagai kenyamanan kehidupan personal mereka.

Saya masih percaya, nafas revolusi Indonesia yang tumbuh subur sejak awal abad dua puluh tak pernah bisa dimatikan oleh apapun. Setelah lama tak muncul ke

permukaan, mata pusaran revolusi di negeri ini bisa jadi berawal dari aksi ibu-ibu Rembang yang terus menggedor pintu macet kekuasaan yang tak pernah berpihak pada mereka. Kalau sudah begitu, kenapa tak mengambil inisiatif untuk bergabung dengan mereka? []

(EPILOG)

Ketika Tanah Air Indonesia Porak-poranda "Di Sanalah Aku Berdiri, Jadi Pandu Ibuku"

Noer Fauzi Rachman

Pengantar

Masihkah adakah di antara kita yang ingat lagu "Rayuan Pulau Kelapa" karya Ismail Marzuki (1914-1958) berikut ini?

Tanah Airku Indonesia
Negeri elok amat kucinta
Tanah tumpah darahku yang mulia
Yang kupuja sepanjang masa

Tanah airku aman dan makmur
Pulau kelapa yang amat subur
Pulau melati pujaan bangsa
Sejak dulu kala

Melambai-lambai, nyiur di pantai
Berbisik-bisik, raja kala
Memuja pulau, nan indah permai
Tanah airku, Indonesia

Kalau masih ingat, kita bisa membaca sambil menyanyikannya. Romantik sekali *kan*? Setiap kali menyanyikan lagu itu, gelora perasaan cinta tanah air kita bisa kembali hidup dan mengaliri seluruh relung jiwa dan raga kita. Mari coba satu lagi karya pujangga Ismail Marzuki. Baca sambil lantunkan dengan khidmat lagu "Indonesia Tanah Air Beta" berikut ini.

Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
Tetap dipuja-puja bangsa

Di sana tempat lahir beta
Dibuai di besarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Sampai akhir menutup mata

Siapakah yang masih sering melantunkan lagu-lagu itu sekarang? Atau, masih seringkah kita mendengar lantunan lagu-lagu itu?

Bagi rakyat di desa-desa, "tanah air" bukanlah wilayah abstrak yang menjadi rujukan identitas belaka. Tanah air bagi mereka adalah wilayah material yang konkret, suatu

kampung halaman. Coba nyanyikan dengan perlahan dan penuh perasaan karya terkenal dari Saridjah Niung (1908-1993), yang lebih terkenal dengan nama panggilan Ibu Sud, berikut ini:

Tanah air ku tidak kulupakan
Kan terkenang selama hidupku
Biarpun saya pergi jauh
Tidakkan hilang dari kalbu
Tanah ku yang kucintai
Engkau kuhargai

Walaupun banyak negeri kujalani
yang mahsyur permai di kata orang
Tetapi kampung dan rumahku
Disanalah ku rasa senang
Tanah ku tak kulupakan
Engkau kubanggakan

Bayangkan keindahannya, dan biarkan diri kita menyerahkan diri pada keindahan kampung-kampung halaman yang beragam di pulau-pulau kecil, di pantai-pantai, di hutan-hutan, ladang-ladang pertanian, permukiman kaki gunung, di dalam hutan dataran tinggi, di kampung-kampung, di sabana-sabana. Semua keanekaragaman bentang alam itu indah tiada taranya. Tariklah nafas dalam beberapa kali sambil memejamkan mata.

Buka mata sekarang. Mari kembali lihat keadaan nyata. Bagaimanakah kondisi tanah air, kampung halaman

rakyat yang porak-poranda di desa-desa di seantero kepulauan Nusantara sekarang ini?

Krisis Agraria Terkini

Rakyat Indonesia di desa-desa selayaknya menyambut abad XXI dengan penuh kegembiraan dan optimisme. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Banyak kelompok rakyat miskin di berbagai desa, pinggiran kota, di pedalaman hingga di pesisir pulau-pulau dilanda rasa galau. Rakyat pedesaan menanggung beban berat secara kolektif sehubungan dengan akses pada tanah pertanian, hutan, dan lingkungan hidupnya yang makin hari makin menyempit, produktivitasnya yang makin hari makin merosot, dan lingkungan ekosistemnya yang semakin rusak.

Konsentrasi penguasaan tanah, rendahnya nilai tukar pertanian, konversi tanah-tanah pertanian ke non-pertanian, perkembangan teknologi produksi, dan pertumbuhan penduduk miskin telah melahirkan akibat nyata pada jumlah rumah tangga petani dan luas total pertanian rakyat. Data sensus pertanian 2013 menunjukkan rumah tangga pertanian di Indonesia mencapai 26,13 juta. Ini berarti telah terjadi penurunan sebesar 5 juta rumah tangga pertanian dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian 2003.

Secara retorik, setiap satu menit satu rumah tangga petani hilang, berganti pekerjaan dari pertanian ke bidang lainnya. Bila kita lihat lebih jauh, seperti ditunjukkan oleh Khudori (2014), laju konversi lahan pertanian rakyat

mencapai angka 110.000 ha/tahun (pada rentang 1992-2002). Ini berarti terjadi lonjakan sebesar 145.000 ha/tahun pada periode 2002-2006, serta 200.000 ha/per tahun pada periode 2007-2010. Bila diambil rata-rata konversi 129.000 ha/tahun, maka secara retorik setiap menit, sekitar 0,25 hektar tanah pertanian rakyat berubah menjadi lahan non-pertanian.

Secara umum, dibanding dengan mereka yang membutuhkan pekerjaan, kesempatan kerja di sektor pertanian semakin menyempit dari tahun ke tahun. Minat bekerja pada bidang pertanian juga semakin menipis. Banyak lapisan orang miskin di pedesaan, mayoritas yang tidak bertanah dan tidak bisa menikmati sekolah tinggi, harus mengambil resiko pergi ke luar desa untuk mendapatkan pekerjaan melalui kerja migran di kota-kota propinsi, metropolitan hingga ke luar negeri. Sebagian besar dari rakyat pekerja migran ini sesungguhnya berhasil memperoleh upah kerja yang lebih baik, mengirimkan pendapatannya ke desa, dan kemudian menjadi daya tarik pula bagi pemuda-pemudi desa generasi berikutnya untuk mengikuti mereka. Di sana-sini, pengalaman pahit bekerja sebagai migran mulai kondisi kerja yang tidak layak—ditipu, diskriminasi hingga kekerasan umumnya—dipersepsi sebagai cerita nasib buruk, yang tidak mampu mencegah rombongan lain untuk pergi.

Dunia pertanian dan pilihan hidup di desa bukanlah masa depan yang menjanjikan bagi pemuda-pemudi, dan masa depan pertanian rakyat bergantung pada siapa

yang akan bertani (White 2011, 2012). Semakin tinggi pendidikan orang desa, semakin kuat pula motivasi dan dorongan untuk meninggalkan desanya. Desa ditinggalkan pemuda-pemudi yang pandai-pandai, termasuk untuk mengenyam pendidikan tinggi. Mereka inilah yang semakin memenuhi kota-kota kabupaten, provinsi dan metropolitan. Sebagian kecil dari mereka berhasil menjadi kelas menengah di kota-kota, dan bersifat konsumtif—termasuk membeli/menyewa tanah dan rumah untuk tinggal di pinggir kota, serta motor dan mobil baru untuk transportasi yang pada gilirannya membuat infrastuktur jalan di kota-kota propinsi dan metropolitan tak lagi memadai. Di kota-kota metropolitan, kemacetan terjadi dimana-mana sejak jam berangkat ke kantor dari pinggiran ke pusat kota setiap pagi hingga jam pulang kantor dari pusat kota ke pinggiran.

Sejarawan terkenal, Eric Hobsbawm dalam karyanya yang terkenal, *Age of Extremes,* membuat deklarasi bahwa "perubahan paling dramatis dalam paruh kedua abad (ke dua puluh) ini, yang menjadi sesuatu pembeda yang selamanya dari dunia masa lampau, adalah kematian petani (*the death of peasantry)*" (Hobsbawm, 1994:288-9).[1]

Untuk memberi nama pada berkurangnya jumlah orang desa yang bekerja sebagai petani, para sarjana yang meneliti masalah agraria membuat istilah-istilah khusus, yakni *depeasantization* dan *deruralization* (Araghi 1995, McMichael 2014). Fenomena ini menunjukkan bagaimana

berbagai kekuatan ekonomi politik bekerja pada tingkat global menghasilkan kecenderungan pengurangan jumlah kelas petani di pedesaan dan semakin kecilnya pengaruh pedesaan pada kehidupan rakyatnya. Lebih lanjut, ahli lain membuat istilah *deagrarianization* (Bryceson 1996) untuk menunjukkan semakin kecilnya andil kerja-kerja dari dunia agraris bagi ekonomi rakyat pedesaan, perubahan orientasi hidup penduduk desa, identifikasi sosial, dan perubahan lokasi hidup dari penduduk desa.

Bagaimana gejala *depeasantization, deruralization, dan deagrarianization* di pedesaan kita? Sebagian besar rakyat Indonesia semula melanjutkan hidup di desa-desa dengan menguasai dan memanfaatkan tanah dan wilayahnya dengan sistem pertanian keluarga, perladangan suku, wana-tani, pengembalaan suku, kebun-hutan bersama, hingga pengelolaan pesisir dan laut. Bagaimanakah keadaan kampung, ladang, sawah, hutan, sungai, dan pantai mereka yang diporak-porandakan oleh kehadiran industri pengerukan barang tambang (batu bara, timah, nikel, pasir besi, bauksit, emas, semen, marmer, dsb), kehadiran industri pohon kayu untuk perusahaan *pulp and paper* dan perkebunan kelapa sawit, dan lain sebagainya; dan kehadiran berbagai mega proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, lapangan terbang beserta *aero-city*, kompleks industri pengolahan, dsb?

Perusahaan-perusahaan raksasa di bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan dan lainnya bekerja berdasarkan lisensi atau surat ijin yang diperoleh dari

pejabat publik yang berwenang. Keputusan pejabat publik (Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertambangan dan Energi) berupa lisensi-lisensi (Ijin HPH/HPHTI, HGU, Kontrak Karya Pertambangan, dan lainnya) menjadi alas legal baik oleh perusahaan pemegang lisensi maupun apparatus keamanan/polisi yang bekerja bagi perusahan pemegang lisensi itu untuk menyingkirkan dan meminggirkan rakyat petani, nelayan, masyarakat adat yang mengumpul hasil hutan/laut dari tanah dan wilayah hidupnya. Konsesi-konsesi berupa Taman Nasional dan kawasan konservasi lain, yang dihasilkan oleh keputusan-keputusan Menteri Kehutanan, juga menjadi dasar penyingkiran rakyat atas nama *biodiversity hotspot* dimana spesies-spesies flora-fauna yang langka dan ekosistemnya perlu dikonservasi.

Akibat dari perluasan konsesi-konsesi pertambangan, kehutanan dan perkebunan, produktivitas rakyat yang hidup di sistem-sistem produksi ini cenderung dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Sebaliknya, kebijakan dan fasilitas pemerintah diarahkan untuk mempermudah perusahaan raksasa (biasa disebut dengan istilah keren: *investor!*) bekerja untuk memperbesar kapasitas produksi komoditas-komoditas global, mensirkulasikannya, dan menjual-belikannya sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan dan penumpukan kekayaan.

Bagaimana bisa situasi di atas melanda rakyat dan tanah air kita? Apa penyebab utamanya?

Menengok ke Sebab Porak-porandanya Tanah Air: Reorganisasi Ruang untuk Perluasan Kapitalisme

Sebagaimana pernah dilansir oleh Ketetapan MPR RI No. IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, masalah agraria dan pengelolaan sumber daya alam dari bangsa Indonesia sekarang ini secara umum masih dan belum beranjak dari tiga golongan. Pertama, Ketimpangan (terkonsentrasinya) penguasaan tanah dan sumber daya alam di tangan segelintir perusahaan. Yang kedua adalah konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang meletus di sana-sini dan tidak ada penyelesaiannya. Dan yang ketiga adalah kerusakan ekologis yang parah dan membuat layanan alam tidak lagi dapat dinikmati rakyat.[2]

Secara gamblang saya mengajak pembaca melihat semua itu sebagai akibat parsial dari reorganisasi ruang yang digerakkan oleh kekuatan-kekuatan yang merancang perluasan cara/sistem produksi kapitalisme. Reorganisasi ruang yang dimaksudkan di sini lebih luas dari apa yang disebut oleh pemerintah sebagai ”penataan ruang.” Secara umum, yang dimaksudkan dengan reorganisasi ruang mencakup (a) ruang imajinasi dan penggambaran, termasuk perancangan teknokratik yang diistilahkan *master plan*, *grand design*, *architectural design,* dan sebagainya; (b) ruang material, tempat dimana kita hidup; dan (c) praktek-praktek keruangan dari berbagai pihak dalam membuat, memanfaatkan, memodifikasi, serta menutup ruang, dalam rangka berbagai upaya memenuhi

keperluan, termasuk mereka yang berada dalam posisi sebagai bagian Negara, atau korporasi, atau rakyat.[3]

Reorganisasi ruang yang dimaksudkan di sini adalah cara hidup yang bersumber dari nafsu untuk terus menerus melipatgandakan keuntungan semata lewat sistem produksi kapitalistik yang mendasarkan diri pada privatisasi kekayaan alam, pemisahan antara penghasil dan pemilik barang yang dihasilkan, dan ekpsloitasi tenaga kerja untuk menghasilkan barang dagangan yang memiliki nilai lebih. Barang dagangan itu disirkulasikan secara global sedemikian rupa mulai dari tempat ia diproduksi hingga di tempat barang dikonsumsi baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun melayani kebiasaan berbelanja (budaya konsumtif). Secara historis, kapitalisme bertumbuh kembang di Indonesia sebagai hasil dari kolonialisme. Pengertian mengenai kolonialisme sebagai anak dari kapitalisme, dan ketidakterpisahan antara keduanya menjadi landasan historis dari reorganisasi ruang ini.

Itulah kapitalisme, suatu sistem berproduksi yang menguasai Indonesia dan dunia sekarang ini. Manusia-manusia yang sepenuhnya menikmati menjadi alat kapitalisme, dan yang diperalat oleh sistem kapitalisme, terus menyebarluaskan kehebatan dari cara produksi ini. Kita tidak bisa mengelak kecuali menjadi bagian dari padanya. Yang umumnya tidak mereka ceritakan adalah cara kapitalisme ini meluas melalui operasi-operasi kekerasan yang menghilangkan kepemilikan rakyat atas

tanah dan membatasi bahkan membuat rakyat tidak bisa lagi memanfaatkan tanah dan sumber daya alamnya, mengubah tata guna tanah dan layanan alam secara drastis dan dramatis, dan menciptakan kelompok-kelompok pekerja yang terpaksa maupun sukarela didisiplinkan menjadi tenaga kerja dalam sistem ekonomi kapitalis guna memproduksi barang-barang dagangan.

Sisi lainnya, adalah konsumsi barang-barang yang diproduksi oleh cara dan sistem produksi kapitalisme itu. Barang-barang dagangan selalu harus dibeli dan rakyat kita dipacu untuk terus menjadi konsumen belaka. Mekanisme-mekanisme baru untuk memperbesar konsumsi terus-menerus diperbaharui: yang lama diganti dan yang baru diciptakan. Kapitalisme akan mati bila tidak ada yang membeli barang dagangan (komoditas) yang mereka hasilkan. Dari hari ke hari, sistem produksi kapitalis terus menerus menghasilkan barang-barang baru, termasuk untuk menggantikan Barang-barang dagangan yang dihasilkan oleh sistem produksi non-kapitalis. Saat ini, kita lihat kenyataan bahwa selera rakyat dibentuk melalui iklan, gaya hidup, dan pembiasaan hingga fasilitas pasar dengan hadirnya *mall-mall*, supermarket di kota-kota hingga toko-toko mini-market di kelurahan dan desa-desa, hingga revolusi pemasaran secara *online*.

Kesemua itu tidak mungkin tanpa pabrik-pabrik yang memproduksi barang dagangan secara massal. Secara nasional, Indonesia telah melintasi berapa kali periode Industrialisasi. Kita telah mengalami suatu pengalaman

industrialisasi substitusi impor (ISI) yang dimulai awal tahun 1970-an hingga industrialisasi orientasi eksport (IOE) yang dimulai tengah tahun 1980an. Muaranya adalah pembangunan kawasan-kawasan industri khusus (*special economic zone*) yang menjadi lokasi pabrik-pabrik dengan sistem produksi kapitalis yang mendasarkan diri pada model *Fordism*. *Fordism* sendiri berasal dari nama industrialis Amerika, Henry Ford, yang membangun pabrik mobil Ford dengan suatu sistem sosial dan ekonomi modern berbasiskan bentuk produksi massal industri yang terstandardisasi. Teknik dalam manajemen industrinya adalah yang disebut sebagai *production line* dengan alat "ban berjalan" dan tugas buruh yang repetitif.

Di akhir tahun 1990, Presiden Jenderal Soeharto turun tahta dan rejim otoritarian Orde Baru kehilangan cengkramannya. Sebagai respon manajemen industri terhadap gerakan-gerakan serikat buruh yang semakin menguat di era reformasi, dimulailah mekanisme *sub-contracting* dimana tidak diperlukan suatu hubungan industrial yang memberi peran bagi serikat-serikat buruh, terutama dalam kontrak kerja yang mencakup kondisi kerja dan penentuan nilai upah. Lebih dari itu, suatu model manajemen industri baru, yang disebut sebagai *post-fordism*—yakni suatu sistem manajemen industri bagi produksi barang dagangan massal melalui mekanisme yang lebih lentur dalam skala produksi, spesialisasi, lokasi produksi, dan sebagainya dengan basis penggunaan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi baik

dalam rantai pasokan untuk produksi (*supply chain*)hingga sirkulasi barang dagangan hingga sampai ke konsumen—diterapkan di negeri ini.

Ujung paling baru dari fenomena ini adalah yang disebut sebagai jaringan produksi global (*global production network*). Akibat adanya jaringan produksi global, tidak bisa lagi ada tanda lokasi produksi pada label barang dagangan, seperti "*made in Japan*", "*made in India*", "*made in* Indonesia", dan sebagainya. Contoh terbaik dari bentuk baru ini adalah produksi *hand-phone*. Tontonlah film (4 menit, 23 detik) yang dibuat oleh Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization (WTO) berjudul *Made in The World*.[4] Pembaca akan terkesan akan kecenderungan baru yang mengagumkan sekaligus mengkhawatirkan!

Sesungguhnya sirkuit/rantai produksi-konsumsi yang dibentuk oleh cara/sistem produksi kapitalis di satu pihak, dan fasilitas dan kebiasaan berbelanja (konsumsi) di pihak lain, memerlukan reorgansiasi ruang yang khusus. Akibat dari reorganisasi ruang itulah yang memporak-porandakan tanah air rakyat di desa-desa kita.

Berbeda dengan pandangan yang memandang pasar kapitalis sebagai suatu kesempatan, pasar kapitalis juga dipenuhi oleh keharusan-keharusan yang dipaksakan. Logika modal dari perkembangan kapitalisme menjadi sebab dari perubahan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, perubahan kepemilikan dan tata guna tanah dan sumber daya alam, serta pada gilirannya berujung pada kesenjangan kekayaan: akumulasi kekayaan dan

kemakmuran pada segelintir orang dan kesengsaraan mayoritas rakyat.

Mari kita kembali ke dasar untuk memahami apakah modal itu, bagaimana mekanisme kerjanya sebagai suatu kekuatan pengubah tanah air rakyat di seantero kepulauan Indonesia dan memporakporandakan cara berproduksi yang ada dalam ruang hidup rakyat beserta seluruh kelangsungan layanan alamnya. Lebih lanjut, mari sadari betapa pentingnya kita hadir dan berperan sebagai pejuang tanah air, merintis cara berjuang baru menghadapi konteks perkembangan kapitalisme yang baru, dan menjadi bagian dari perjuangan tanah air itu.

Semua itu bukanlah topik yang baru. Cara kapitalisme bekerja memporak porandakan tanah air Indonesia sudah sejak dulu ditunjukkan secara gamblang oleh Soekarno dalam karyanya *Indonesia Menggugat* (1930). Lebih lanjut, bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia dimaknai sebagai upaya menghapus kapitalisme, imperialism dan kolonialisme diuraikan Tan Malaka lewat *Naar de 'Republiek-Indonesia'* (*Menudju Republik Indonesia*) (1925), Muhammad Hatta (1928) *Indonesie Vrij* (Indonesia Merdeka), Soekarno (1933) *Menuju Indonesia Merdeka* (1933).

Siapakah di antara kita yang sekarang masih membaca naskah-naskah itu?

Merasani Kutukan Kolonial

Soekarno fasih mengkritik kapitalisme dan imperialisme. Naskah pledoinya di hadapan pengadilan kolonial

1930, *Indonesia Menggugat,* menjadi rujukan utama bagi semua orang Indonesia yang berusaha mencari tahu akar-akar kesengsaraan rakyat Indonesia. Selanjutnya pamflet *Menuju Indonesia Merdeka* ditulis 1933 menjadi rujukan untuk mengerti mengapa Indonesia Merdeka adalah suatu cita-cita sekaligus pembentuk cara rakyat berjuang. Selanjutnya, dalam pidato di BPUPKI 1 Juni 1945 ia menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan jelas dan jenius ia menunjukkan bagaimana Negara Republik Indonesia musti difungsikan sebagai Ibu Pertiwi yang memangku rakyat sebagai warganegaranya. "Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?"

Arah politik agraria Indonesia di masa awal kemerdekaan adalah menghilangkan sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme guna memberi jalan bagi sistem ekonomi nasional bekerja sesuai pasal 33 ayat 3 "Bumi, air dan kekeyaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"—kalimat yang perumusannya dibuat oleh Drs. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Meski wacana reforma agraria berhasil menjadi kebijakan nasional, namun dua sistem agraria warisan kolonialisme, yakni perkebunan-perkebunan besar di Jawa dan Sumatera dan penguasaan lahan hutan oleh Perhutani

di Jawa, berhasil berlanjut hidup dengan menempatkan diri sebagai perusahaan-perusahaan milik negara, yang dikerangkakan sebagai bagian dari Ekonomi Terpimpin. Selanjutnya, kebijakan *land reform* berfokus pada urusan membatasi penguasaan tanah-tanah pertanian rakyat, melarang penguasaan tanah swapraja dan tanah-tanah guntai, redistribusi tanah-tanah negara dan pengaturan bagi hasil (Fauzi 1999, Rachman 2012).

Land reform kemudian bergeser dari agenda bangsa untuk mewujudkan keadilan agraria menjadi isu politik yang membelah pengelompokan sosial-politik dan membuat perebutan tanah menjadi basis dari konflik yang lebih luas di pedesaan di pedesaan Jawa, Bali, sebagian Sumatera dan sebagian Nusa Tenggara. Konflik itu berkulminasi menjadi pembunuhan massal, penangkapan dan pemenjaraan puluhan ribu orang yang digolongkan komunis, pelarangan PKI, ideologi komunis, dan organisasi yang digolongkan sebagai *underbouw*-nya. Konflik itu juga berpuncak dengan digulingkannya Soekarno melalui kudeta merangkak dan naiknya jenderal Soehato sebagai Presiden RI yang memulai rejim otoritarianisme militer.

Seperti ditunjukkan sejarawan Hilmar Farid (2005), kekerasan massal yang berlangsung 1965-1966 merupakan bentuk *primitive accumulation*, bagian dari proses awal kembalinya kapitalisme berkembang di Indonesia. Apa yang terjadi di periode itu terus akan menanti untuk diungkap, dan memerlukan keberanian, sikap kritis, dan moral bijaksana untuk memahami yang terjadi dalam

babak sejarah itu, termasuk dengan menghubungkannya dengan perkembangan kapitalisme, yang sempat jeda terhenti sepanjang sekitar 23 tahun, yakni 1942-1945, 1945-1949, 1949-1957, dan 1958-1965.

Sekarang kita bisa memandang betapa penting periode ketika Sukarno memimpin 1958-1965 itu. Sukarno telah menegaskan fondasi ideologis untuk menandingi kapitalisme kolonialisme. Selain Sukarno, kita ingat juga Muhammad Hatta telah meletakan dasar-dasar baru pengaturan agraria nasional yang berdasarkan kritik terhadap cara politik agaria kolonial bekerja. Muhammad Hatta meletakkan dasar-dasar yang melarang tanah (dan sumber daya alam) untuk diperlakukan sebagai komoditi (barang dagangan) belaka. Kita ingat juga Muhammad Tauchid dalam bukunya *Masalah Agraria* jili 1 dan 2 (1953), yang memberikan penjelasan paling menyeluruh tentang masalah agraria Indonesia, termasuk akibat-akibat politik agraria kolonial.

Selain Pancasila yang telah menjadi ideologi negara, Sukarno telah pula melahirkan formula Trisakti (Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan) untuk menginspirasi perjuangan dekolonisasi dalam segala bentuknya, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk perjuangan kemerdekaan negeri-negeri terjajah lainnya, sebagaimana secara fundamental ditegaskan dalam deklarasi "Dasa Sila Bandung" yang dihasilkan Konferensi Asia-Afrika 1955.

Namun, di masa kepemimpinan langsung Presiden Soekarno (1958-1965), Indonesia belum juga berhasil mengatasi "tiga kutukan kolonial" yang secara lantang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno pada sidang pleno pertama Dewan Perantjang Nasional (1959) di Istana Negara, 28 Agustus 1959. Kutukan itu, pertama, *"Indonesia mendjadi pasar penjualan daripada produk-produk negeri pendjadjah atau negeri-negeri luaran di tanah air kita"*; kedua, *"Indonesia mendjadi tempat pengambilan bahan-bahan pokok bagi industriil kapitalisme di negeri pendjadjah atau negeri-negeri lain"*, dan ketiga, *"Indonesia mendjadi tempat investasi daripada modal-modal pendjadjah dan modal-modal asing jang lain"*.

Kutukan kolonial ini menemukan penguasa politik yang mewujudkannya, yakni sepanjang Indonesia berada di bawah rejim otoritarian-militer Orde Baru (1966-1998). Indonesia kembali menjalankan politik agraria kolonial. Bahkan, hal itu tetap masih berlanjut ketika kita berada di jaman Reformasi, paska 1998.

Sesungguhnya, kutukan kolonial itu oleh Soekarno dikontraskan dengan keperluan untuk secara leluasa "menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi". Secara jelas hal ini dipidatokan oleh Ir. Soekarno di Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan 1 Juni tahun 1945, setelah memaknai kemerdekaan Indonesia sebagai "jembatan emas".

Mengapa kita mesti leluasa? Karena, dalam memikirkan mengenai masa depan Indonesia, kita tidak boleh

dikekang dan dikungkung oleh cara-cara penyelenggaraan Negara yang lalu. Kita sudah menyelesaikan revolusi nasional yang menghasilkan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Saat ini, kita tidak dapat mencapai cita-cita mulia kemerdekaan itu dengan hanya melanjutkan cara-cara penyelenggaraan Negara yang lalu, yang ternyata hanya sanggup melanjutkan Indonesia berada dalam kutukan kolonial.

Betapa ironisnya bahwa Indonesia masih berkedudukan persis sama di tahun 2014, setelah enam puluh sembilan tahun berjalan melewati "jembatan emas" kemerdekaan. Indonesia seharusnya tidak lagi melanggengkan kedudukannya sebagai "*Een natie van koelies enen koelie onder de naties*", "*A nation of coolies and a coolie amongst nations*".

Quo vadis? Atawa, mau kemana kita ini?

Warisan yang kita alami saat ini adalah krisis sosial ekologis yang kronis. Komponen utama krisis itu adalah berlangsungnya cara hidup yang bersumber dari cara/sistem produksi kapitalis, yang mengancam keselamatan rakyat, merusak produktivitas rakyat, menghancurkan layanan alam, dan membuat kesejahteraan rakyat merosot. Kapitalisme memperlakukan rakyat agraris sebagai tenaga kerja belaka, dan rakyat akan diubah secara drastis menjadi tenaga kerja. Tanah rakyat serta kekayaan alam yang berada dalam wilayah hidup dan kepunyaan rakyat dijadikan bahan mentah dan sumber daya yang dikeruk lalu menjadi alas bagi berlangsungnya cara/

sistem produksi kapitalis itu. Lebih lanjut, kapitalisme memperalat Negara, dan bila mereka berhasi, aparatur Negara berubah dari fungsinya sebagai pelayan dan badan penguasa penjelmaan kedaulatan rakyat menjadi sekedar sebagai "panitia pengurus kepentingan kaum borjuis", begitu kata Karl Marx.

Adakah tersedia kesempatan dan keberanian dari pejabat publik untuk menyatakan berhenti menjadi alat/sistem produksi kapitalis. Sebaliknya, apakah kita sanggup berbelok menempuh jalan baru bangsa ini, jalan yang mampu membalikkan situasi krisis sosial-ekologis, dan memulai usaha memulihkannya dari satuan-satuan yang paling dasar, yakni kampung-kampung, sekolah-sekolah, sanggar-sanggar kebudayaan, kelompok-kelompok studi lokal, kelompok-kelompok tani, komunitas-komunitas masyarakat adat, usaha-usaha ekonomi kecil, dan sebagainya, hingga satuan-satuan nasional, seperti partai politik, parlemen, senator, organisasi masyarakat sipil dan universitas?

Pertanyaanya, pedoman apa yang bisa dipakai untuk menempuh jalan baru itu? Soekarno pernah mengingatkan bahwa *"kesulitan-kesulitan hendaknja tidak mendjadi penghalang daripada tekad kita, tidak mendjadi penghalang daripada kesediaan kita oentuk terus berdjoeang dan terus bekerdja, bahkan kesulitan-kesulitan itu hendaknja mendjadi satu tjambukan bagi kita untuk berdjalan terus, bekerdja terus oleh karena memang diharapkan daripada kita sekarang ini realisasi daripada penjelenggaraan daripada*

masjarakat jang adil dan makmur jang telah lama ditjita-tjitakan oleh rakjat Indonesia".

Pada sidang pleno pertama Dewan Perantjang Nasional (1959) di Istana Negara, 28 Agustus 1959, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia harus *"dengan tegas harus menuju kepada masjarakat adil dan makmur",* yang pada waktu itu disebutnya sebagai *"masyarakat sosialis a la Indonesia",* dan upaya merealisasikannya *"tidak boleh tidak kita harus mengadakan* planning *dan kita harus mengadakan pimpinan dan harus kita mengadakan kerahan tenaga."* Ia menegaskan bahwa "*Tanpa* planning*, tanpa pimpinan, tanpa pengerahan tenaga tak mungkin masyarakat yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia itu bisa tercapai dan terrealisasi*".

Pemimpin dari semua satuan harus bekerja secara gotong-royong berpartisipasi dengan *planning* yang matang untuk menjalankan norma-norma dasar dari Undang-udang Dasar 1945. Dengan merujuk pada niat dan cita-cita proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kita bukan mau hidup-hidupkan kembali masa lampau, apalagi mau hidup di masa lampau. Namun lebih dari itu: Negara Indonesia ini didirikan dan diatur oleh prinsip-prinsip dan norma-norma dan pengaturan dasar telah diletakkan dalam Konstitusi UUD 1945. Jadi, adalah tugas kita semua untuk kembali menjadikan cita-cita pendirian negara sebagai pedoman, dan mengembangkan suatu pandangan berdasarkan pada Konstitusi. Ia menjadi rujukan utama bagi pemerintah dalam memposisikan diri

dan menjalankan perannya "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".

Penutup

Saat ini, tidak bisa tidak, kita niscaya membicarakan kapitalisme, dan cara bekerjanya. Fernand Braudel, Sejarawan Perancis pemimpin Aliran Annales (*Annales School*) dalam ilmu sejarah, menulis kalimat yang dikutipkan di atas dalam salah satu karya klasiknya *Civilization and Capitalism 15th – 18th Century Volume II: the Wheels of Commerce*: "manakala kapitalisme diusir keluar dari pintu, ia akan masuk kembali lewat jendela." Ia melanjutkan, "Suka atau tidak, … terdapat suatu bentuk kegiatan ekonomi yang tak bisa dihindari memanggil ingatan kita pada kata ini dan tidak bisa tidak" (Braudel 1979:231).

Adalah sulit dimengerti bila membicarakan perjuangan tanah air sekarang ini tanpa didasari oleh pemahaman tentang cara kapitalisme berkembang, dan berkembang secara berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di seantero nusantara. Belajar memahami perkembangan kapitalisme ini diperlukan seiring sejalan dengan keperluan untuk senantiasa belajar menghadapinya, termasuk melakukan tindakan bersama untuk menyelamatkan dan memperbaiki kesejahteraan rakyat, memulihkan alam yang dirusak, dan meningkatkan produktivitas rakyat.

Kalau kekuatan pasar (*baca*: kapitalisme) saat ini telah memporak-porandakan Desa, kampung halaman tanah air kita, bahkan diri kita sendiri pun telah diperlakukan sebagai barang dagangan (komoditi, atau dalam bahasa lain: sumber daya manusia). Apakah ada para pejuang tanah air yang berani menjadi pemandu rakyat kita?

Sesungguhnya, seluruh teks lagu kebangsaan Indonesia Raya versi asalinya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan disajikan ke publik dalam Kongres Pemuda 1928, adalah tiga stanza.[5] Sebagai penutup, mari nyanyikan dan hayati Lagu Indonesia Raya versi asali itu. Nyanyikan sambil berdiri dan sikap sempurna!

Stanza 1

Indonesia Tanah Airkoe Tanah Toempah Darahkoe
Di sanalah Akoe Berdiri Djadi Pandoe Iboekoe
Indonesia Kebangsaankoe Bangsa Dan Tanah Airkoe
Marilah Kita Berseroe Indonesia Bersatoe

Hidoeplah Tanahkoe Hidoeplah Negrikoe
Bangsakoe Ra'jatkoe Sem'wanja
Bangoenlah Djiwanja Bangoenlah Badannja
Oentoek Indonesia Raja

Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe Jang Koetjinta
Indonesia Raja Merdeka Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja (Reff Diulang 2 kali)

Stanza 2

Indonesia Tanah Jang Moelia Tanah Kita Jang Kaja
Di sanalah Akoe Berdiri Oentoek Slama-Lamanja
Indonesia Tanah Poesaka P'saka Kita Semoenja
Marilah Kita Mendo'a Indonesia Bahagia

Soeboerlah Tanahnja Soeboerlah Djiwanja
Bangsanja Ra'jatnja Sem'wanja
Sadarlah Hatinja Sadarlah Boedinja
Oentoek Indonesia Raja

Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe Jang Koetjinta
Indonesia Raja Merdeka Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja (Reff Diulang 2 kali)

Stanza 3

Indonesia Tanah Jang Soetji Tanah Kita Jang Sakti
Di sanalah Akoe Berdiri 'Njaga Iboe Sedjati
Indonesia Tanah Berseri Tanah Jang Akoe Sajangi
Marilah Kita Berdjandji Indonesia Abadi

S'lamatlah Ra'jatnja S'lamatlah Poetranja
Poelaoenja Laoetnja Sem'wanja
Madjoelah Negrinja Madjoelah Pandoenja
Oentoek Indonesia Raja

Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe Jang Koetjinta

Indonesia Raja Merdeka Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja (Reff Diulang 2 kali)

Apa yang Anda rasakan setelah menyanyikannya? Sudah lama kita membiarkan tanah air, kampung halaman rakyat, dijadikan sebagai akibat. Kapan saatnya tanah air ini kembali menjadi kosa kata kita semua. Penulis menjadi ingat pada kata-kata utama dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya: "disanalah aku berdiri jadi pandu ibuku".[]

Catatan:

[1] Kalimat aslinya: "*the most dramatic change in the second half of this century, and the one which cuts us forever from the world of the past, is the death of the peasantry*".

[2] Ketiga perkara ini telah disebut secara lugas sebagai masalah nasional dalam Ketetapan MPR RI No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Satu mandat utamanya dari TAP MPR ini adalah penyelesaian pertentangan, tumpang tindih dan tidak sinkronnya berbagai perundang-undangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang berlaku. Ironisnya tidak ada satupun Presiden Republik Indonesia yang menjalankan arah kebijakan dan mandat yang termuat di dalam Ketetapan MPR itu. Semenjak dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 melalui UU Nomor 24/2003 sudah cukup banyak undang-udang agraria dan pengelolaan sumber

daya alam yang telah diuji konstitusionalitasnya, dan sebagian telah dibatalkan karena tidak sesuai dengan UUD 1945 yang berlaku. Yang terbanyak diuji adalah Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Yang barusan saja dibatalkan adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Air sebagai sumber daya yang vital tidak boleh diswastakan, dan harus dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

[3] Rujukan komponen ini berangkat dari pemikiran Henri Lefebrve (1992).

[4] Kunjungi situs *https://www.youtube.com/watch?v=-KMkJu8S8ztE*

[5] Uraian memukau tentang Lagu Indonesia Raya versi Asali, lihat karya Gunawan Wiradi https://sajogyoinstitute.wordpress.com/2013/09/20/lagu-kebangsaan-dan-nasionalisme/ (diunduh 4 April 2015).

Literatur:

Braudel , Fernand. 1979. *Civilization and Capitalism 15th–18th Century. Vol. 2. The Wheels of Commerce*. New York: Harper & Row.

Juliantara, Dadang. 1997. "Agraria adalah Akibat, Kapitalisme adalah Sebab!", Jurnal Suara Pembaruan Agraria No. 3/1997.

Davis, Mike. 2006. *Planet of Slums*. New York: Verso.

De Angelis, Massimo. 2007. *The Beginning of History. Value Struggles and Global Capital*. London: Pluto Press.

Fauzi, Noer. 1997b. "Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Indonesia Paska Kolonial", dalam *Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia* p.67-122, Jakarta: LP-FEUI dan KPA.

_____. 1999. *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan Insist Press dan Pustaka Pelajar.

_____. 2001. *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria*. Yogyakarta: Karsa bekerjasama dengan Insist Press.

Harvey, David. 1990. *The Condition of Postmodernity: An Inqiury into the Origins of Cultural Change*. Oxford: Oxford University Press.

_____. 2003. *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

_____. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.

_____. 2006. *Space of Global Capitalism: Toward a Theory of Uneven Geographical Development*. London: Verso.

Hobsbawm, Eric. 1994. *Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991*. London: Penguin.

Khudori. 2014. "Darurat Lahan Pertanian" Kompas, 30 Januari 2013

Lefebvre, Henri. 1992. *The Production of Space*. Donald Nicholson-Smith (Translator). London: Wiley-Blackwell.

Marx, Karl. 1976/1898. *Capital, Vol. One*, trans. Ben Fowkes. Harmondsworth, Penguin Books

Perelman, Michael. 2000. *The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation*. Durham: Duke University Press.

Polanyi, Karl. 1967 (1944). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.

_____. 2001 (1944) *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.

Schumpeter, Joseph A. 1944. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Allen & Unwin.

Tauchid, Muhammad. 1952/3. *Masalah Agraria, Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Penerbit Tjakrawala.

Tacher, Margaret. 2002. *Statecraft. Strategies for a Changing World*. New York: HarperCollins Publisher.

White, Ben. 2011. "Who will own the countryside" Disposession, rural youth and the future of farming". Valedictory Address delivered on 13 October 2011 on The Occasion of The 59th Dies Natalis of the International Institute of Social Studies, The Hague.

_____. 2012. "Agricultur and the Generation Problem: Rural Youth, Employment and Farming". *DS Bulletin* Volume 43 Number 6 November 2012. Hlm. 9-19.

Wibowo. I. And Francis Wahono (Eds.). 2003. *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

Wood, Ellen Meiksins. 2002. *The Origin of Capitalism. A Longer View*. London: Verso.

_____. 2006. "Logics of Power: A Conversation with David Harvey." Historical Materialism 14:9-34.

Tentang Penulis

A. Syatori



Penulis adalah adalah alumnus sejumlah pesantren, diantaranya Pesantren Attarbiyatul Wathoniyah (PATWA) Cirebon, Pesantren Lirboyo Kediri, dan Pesantren Ciganjur Jakarta. Menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Program Master (S2) bidang Sosiologi di Universitas Indonesia, dan sekarang menjadi kandidat Doktor bidang Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia. Kini mengabdikan diri sebagai dosen dan peneliti di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon, serta didaulat menjadi Koordinator Umum *Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam* (FNKSDA). Bisa dihubungi di bang_syatori@yahoo.com.

Abe Rodhialfalah



Penulis kelahiran Bojoegoro ini sejak sekolah hingga kuliah menyukai aktivitas sebagai pecinta alam. Hingga sekarang bahkan masih aktif sebagai bagian dari *Acintyacunyata Speleological Club*. Sempat menjadi peneliti pendamping tim Universitas Karlsruhe (Jerman) dalam proyek *Integrated Water Resources Management* (IWRM). Pada 2011 juga pernah terlibat dalam pembuatan film dokumenter untuk jaringan televisi dari Berlin bertema "teknologi hijau dan pemanfaatan energi terbarukan". Bisa dihubungi di rodhialfalah@gmail.com.

Bosman Batubara



Penulis adalah alumnus Jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (2005) dan *Interuniversity Programme in Water Resources Engineering*, KU Leuven dan VU Brussel, Belgia (2012) dengan predikat cum-laude. Saat ini sedang menempuh studi doktoral di UNESCO-IHE, Institute for Water Education, Delft, Belanda. Sejauh ini sudah terlibat baik sebagai penulis, editor, maupun penulis antologi tulisan, diantaranya: *Titanic Made by Lapindo* (2010, Lafadl Initiatives); *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat Sipil* (2010, Desantara Foundation); *Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran*

Migas di Sidoarjo (2012, Insist Press); *Membingkai Lapindo: Pendekatan Konstruksi Sosial Atas Kasus Lapindo Sebuah Bunga Rampai* (2013, Kanisius). Bisa dihubungi di bosman.batubara@gmail.com.

Dwicipta



Penulis adalah aktivis yang lama bergelut di dunia gerakan dan kebudayaan. Ia merupakan inisiator *Gerakan Literasi Indonesia* (GLI, sebuah gerakan sosial-politik berbasis kemandirian dan koperasi. Sepaket dengan GLI, ia menginisiasi media kooperasi pertama di Indonesia, *literasi.co*, dan masih aktif sebagai salah satu redaktur di media berbasis online tersebut. Pernah menempuh kuliah di Jurusan Kimia, Univesitas Diponegoro Semarang dan Jurusan Hubungan Internasional Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta, namun kedua-duanya tidak pernah diselesaikan. Tulisannya seputar gerakan dan kebudayaan tersebar diberbagai media. Bisa dihubungi di dwicipta1977saja@gmail.com.

Hendra Try Ardianto



Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Selain aktif sebagai jurnalis di *literasi.co*, juga merupakan organisator *Gerakan Literasi Indonesia* (GLI) dan peneliti politik ekologi *Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam* (FN-KSDA) Regional Yogyakarta. Bisa dihubungi melalui hendratrya@gmail.com.

Imron Fauzi



Penulis lahir di Malang pada 4 November 1977. Belajar Speleologi sejak tahun 1997 (IMPALA Universitas Brawijaya) hingga sekarang. Saat ini tercatat aktif sebagai anggota Tim Kerja Penyusunan Data dan Informasi Gua dan Karst Indonesia *(www.caves.or.id)*. Selain itu, masih terlibat aktif dalam komunitas *Indonesia Caver Society*. Bisa dihubungi di imronfauzi@gmail.com.

Irfanianto



Penulis lahir di Semarang, 14 Juli 1989. Meski lulusan Teknik Mesin dari Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNas) Yogyakarta, sejak mahasiswa telah menggeluti dunia pecinta alam. Saat mahasiswa tergabung dalam GAPADRI, komunitas mahasiswa pecinta alam STTNas Yogyakarta. Sekarang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dan penelitian dengan *Acintyacunyata Speleological Club*. Bisa dihubungi di irfanianto@yahoo.com.

Ming-Ming Lukiarti



Penulis adalah akademisi sekaligus aktivis kelahiran Rembang. Pernah menempuh studi sarjana di STIE YPPI, Rembang, dan menyelesaikan program magister Ilmu Manajemen dari Universitas Diponegoro, Semarang. Saat ini sedang menekuni profesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. Semasa tinggal di Rembang terlibat aktif di *Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng* (JMPPK) Rembang. Bisa dihubungi di mingminglukiarti@gmail.com.

Noer Fauzi Rachman



Penulis adalah Ketua Dewan Pengarah *Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan* (BP2DK). Saat ini juga adalah anggota Dewan Pakar *Konsorsium Pembaharuan Agraria* (KPA), peneliti *Sajogyo Institute*, dan pengajar di Program S2 Sosiologi Pedesaan, Institute Pertanian Bogor. Menyelesaikan PhD dari University of California, Berkeley, dalam bidang *Environmental Science, Policy and Management*. Telah menulis beberapa buku, diantaranya: *Petani dan Penguasa, Perjalanan Politik Agraria di Indonesia* (1999, Pustaka Pelajar, kerjasama dengan Insist Press dan KPA); *Land Reform dari Masa ke Masa, Perjalanan Kebijakan Pertanahan di Indonesia 1945-2014* (2012, Tanah Air Beta, dan cetakan kedua diterbitkan STPN Press). Bisa dihubungi di noerfauziberkeley@gmail.com.

Petrasa Wacana



Penulis merupakan aktivis lingkungan dengan kelimuan yang sangat komplet. Gelar sarjana diperoleh dari Teknik Geologi, UPN "Veteran" Yogyakarta, sedangkan gelar masternya berasal dari Ilmu Lingkungan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Memiliki keahlian khusus dalam bidang pemetaan goa, hidrogeologi kars, dan manejemen resiko bencana. Hingga sekarang masih aktif dalam kegiatan dan penelitian di *Acintyacunyata Speleological Club*. Bisa dihubungi di petrasawacana@gmail.com.

Sunu Widjanarko



Penulis adalah pria kelahiran Sukoharjo, 7 Oktober 1968. Sejak 1992, telah aktif dalam berbagai kegiatan penelusuran goa. Memiliki keterlibatan aktif dalam *Acintyacunyata Speleological Club*, dengan spesialisasi keahlian di bidang penelusuran goa dan Sistem Informasi Geografis. Saat ini tercatat sebagai pengurus *Indonesian Caver Society*. Bisa dihubungi di sunu_asc@yahoo.com.

#RembangMelawan adalah istilah populer di media sosial begitu konflik warga penolak tambang dengan PT Semen Indonesia meledak. Istilah ini muncul sebagai reaksi dari perlawanan ibu-ibu Rembang yang ratusan hari tinggal di tenda perjuangan sebagai protes atas rencana pertambangan di Pegunungan Kendeng. Tidak hanya di media sosial, lahirnya ratusan bentuk solidaritas di berbagai daerah membuat konflik lingkungan di Rembang menjadi masalah nasional yang semakin serius dan melibatkan semakin banyak pihak. Mengapa demikian? Sebab dalam kasus di Rembang inilah, wajah negara yang kehilangan rakyat dan korporasi yang menyetir pemerintahan bisa tampak secara lebih telanjang.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang ditulis oleh beberapa orang dengan latar belakang beragam, mulai dari akademisi, aktivis, jurnalis, hingga para peneliti yang kredibelitas tidak diragukan. Sebagian besar penulis ini merupakan figur-figur yang sejak lama gelisah dengan fenomena pengerukan sumber daya alam yang makin tidak terkendali. Melalui komunitas dan ruang geraknya masing-masing, mereka melakukan kerja-kerja berbasis gerakan hingga yang berbasis pengetahuan epistemik. Jadi, para penulis ini bukan semata orang-orang yang berfokus pada persoalan lingkungan di Rembang, namun lebih luas dari itu: keadaan darurat ekologi dan agraria yang melanda negeri ini.

Ini persoalan lingkungan mestinya harus menyeluruh. Jangan di Pati selesai, lalu pindah ke Rembang. Selalu pindah, begitu terus. Itu akan memusingkan rakyat! ... Pokoknya kalau merusak lingkungan tidak boleh – *nu.or.id (15/3/2015)*
KH. Musthofa Bisri (Gus Mus)
Rois Am PBNU

Wilayah yang ada di daerah Gunem Rembang itu harus dilindungi karena di sana ada air, yang sangat rawan dan mempengaruhi hidup orang banyak – *daulathijau.org (27/2/2015)*
KH. Yahya Staquf (Gus Yahya)
Mantan Juru Bicara alm. Presiden KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur)

Kasus Rembang sangat mencolok dan menjadi indikator perbaikan tata kelola sumber daya alam berkeadilan di Jawa dan seluruh Indonesia – *Kompas (25/3/2015)*
Dr. Riwanto Tirto Sudarmo
Peneliti senior Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

Lokasi penambangan PT. Semen Indonesia ada di zona imbuhan air tanah, yang sesuai peraturan tidak boleh ditambang – *Kompas (16/8/2014)*
Dr. Surono
Kepala Badan Geologi, Kementrian ESDM

LADANG KATA
LITERASI PRESS
ISBN: 978-602-1093-11-5

#RembangMelawan

Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng

LITERASI PRESS